**7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

1. **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi tonggak dimulainya sistem otonomi daerah. Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomis daerah secara mandiri dan bertanggungjawab, yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Transformasi paradigma terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber ekonomis yang semula bersifat akuntabilitas vertikal kepada Pemerintah Pusat menjadi akuntabilitas horizontal kepada masyarakat di daerah. Pengelolaan sumber-sumber ekonomis erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah di daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan dan aset-aset Pemerintah Daerah sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem pengelolaan secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dalam rangka untuk menciptakan *Good Governance* dalam pemerintahan di Kota Prabumulih.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2015. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), danCatatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan tersebut merupakan laporan keuangan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana diluar APBD Kota Prabumulih (Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi).

1. **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintah daerah selama satu periode.

1. **Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan berdasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3);
32. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 14 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 36 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah-Lanjutan;
34. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih;
35. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Prabumulih, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Prabumulih.
36. **Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020disusun dengan sistematika sebagai berikut.

1. **Pendahuluan**

Memuat informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan.

1. **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

Memuat informasi tentang: ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD.

1. **Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Memuat informasi tentang: ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaiantarget yang telah ditetapkan.

1. **Kebijakan Akuntansi**

Memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, prinsip akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. **Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan, yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, dan Beban, yang semuanya tercantum dalam unsur-unsur laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL).

1. **Penjelasan atas Informasi-informasi Non keuangan**

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

1. **Penutup**

Memuat uraian penutup berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

1. **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD**
2. **Ekonomi Makro**
3. **Gambaran Umum Daerah**

Kota Prabumulih adalah kota yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 merupakan kota baru hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Prabumulih. Pembentukan Kota Prabumulih sebagai hasil peningkatan status dari Kota Administratif Prabumulih diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta dan pada tanggal 12 November 2001 Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri melantikDrs. Sudjiadi, MM sebagai Pejabat Walikota Prabumulih.

Pada awal berdirinya, Kota Prabumulih terdiri dari 4 Kecamatan yaitu Prabumulih Barat, Prabumulih Timur, Cambai, dan Rambang Kapak Tengah. Mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah dan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan wilayah kecamatan, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah melakukan Penataan Wilayah Kecamatan dengan menambah 2 Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Prabumulih Utara dan Prabumulih Selatan.

Adapun luas wilayah dan banyaknya kelurahan/desa tiap kecamatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1 Luas Wilayah Kota Prabumulih per Kecamatan**

| No. | Kecamatan | Luas Wilayah (Km2) | Kelurahan | Desa | Dusun | RW | RT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prabumulih Barat | 126.06 | 5 | 1 | 5 | 27 | 100 |
| 2 | Prabumulih Timur | 65.43 | 8 | - | - | 49 | 224 |
| 3 | Cambai | 73.54 | 3 | 2 | 12 | 16 | 55 |
| 4 | Rambang Kapak Tengah | 13.,66 | 1 | 8 | 25 | 4 | 10 |
| 5 | Prabumulih Utara | 10.74 | 5 | - | - | 32 | 105 |
| 6 | Prabumulih Selatan | 48.55 | 3 | 1 | 5 | 11 | 52 |
|  | Jumlah | **456.98** | **25** | **12** | **47** | **139** | **546** |

*Sumber : BPS Kota Prabumulih*

JumlahpendudukKota Prabumulih pada Tahun 2019 sebanyak 197.123 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Prabumulih Timur sebanyak 78.385 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Rambang Kapak Tengah sebanyak 13.145 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Prabumulih tahun 2018-2019 adalah sebesar 5,98% dan diatas laju pertumbuhan penduduk rata-rata Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,39%. Sedangkan kepadatan penduduk Kota Prabumulih tahun 2019 telah mencapai 431,36 jiwa/km2 menempati peringkat kedua setelah Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau, serta jauh diatas rata-rata

kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 92,48 jiwa/km2.

**Tabel 7.2 Jumlah Penduduk Kota Prabumulih per Kecamatan Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kecamatan | Penduduk  Laki-laki (Jiwa) | Penduduk  Perempuan  (Jiwa) | Jumlah  Penduduk  (Jiwa) | Kepadatan  Penduduk (jiwa/km2) |
| 1 | Prabumulih Barat | 16.121 | 15.442 | 31.563 | 250,38 |
| 2 | Prabumulih Timur | 39.547 | 38.838 | 78.385 | 1.198,00 |
| 3 | Cambai | 9.686 | 9.584 | 19.270 | 262,03 |
| 4 | Rambang Kapak Tengah | 6.678 | 6.467 | 13.145 | 99,09 |
| 5 | Prabumulih Utara | 16.819 | 16.734 | 33.553 | 3.124,12 |
| 6 | Prabumulih Selatan | 10.729 | 10.478 | 21.207 | 436,81 |
|  | Jumlah | **99.580** | **97.543** | **197.123** | **431,36** |

*Sumber : BPS Kota Prabumulih*

Secara geografis Kota Prabumulih terletak pada posisi antara 30 – 40 Lintang Selatan (LS) dan 1040 - 1050 Bujur Timur (BT). Dengan jarak lebih kurang 87 Km ke Muara Enim dan 97Km ke Palembang Ibukota Provinsi Sumatera Selatan serta berada pada jalur lintas bagi angkutan barang dan jasa baik dengan kendaraan mobil ataupun Kereta Api yang keluar masuk kota Palembang. Disamping berada di jalur lintas, di Kota Prabumulihjuga terdapat Perusahaan seperti PT. Pertamina EP Region Sumatera, Perkebunan Kelapa Sawit, dan PT. PN VII serta perusahaan lainnya dengan letak yang strategis, sangat berpotensi sebagai kota perdagangan dan jasa.

Topografi Kota Prabumulih termasuk daerah yang berada di wilayah dataran rendah, dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 10 – 50 meter diatas permukaan laut (mdpl), yaitu sebagian dari wilayah Kecamatan Prabumulih Barat dan Kecamatan Prabumulih Timur, Kecamatan Prabumulih Utara, Kecamatan Prabumulih Selatan dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah. Sementara dataran yang mempunyai ketinggian paling rendah yaitu mencapai 10meter diatas permukaan laut (mdpl) berada di Kecamatan Cambai dan sebagian Kecamatan Prabumulih Barat serta Kecamatan Prabumulih Timur.

Berdasarkan derajat kemiringan tanah, Kota Prabumulih cenderung landai. Sekitar 92,01% dari luas wilayah Kota Prabumulih berada pada wilayah yang mempunyai kemiringan kurang 120 dan sekitar 7,99% berkemiringan sedang yaitu 120 sampai dengan 400.

1. **Potensi Unggulan Daerah**
2. **Sektor Pertanian**

Sumatera tergolong sebagai daerah perdagangan dan jasa. Meskipun begitu, sektor pertanian tetap memberi kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi Kota Prabumulih tahun 2019 yaitu sebesar 5,94%mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 6,36%. Produksi padi tahun 2019 mencapai 2.152 ton dengan luas panen 325,37 ha atau memiliki produktivitas 8,57 ton/ha. Produksi palawija yang terdapat di Kota Prabumulih meliputi jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Adapun komoditi yang paling banyak produksinya adalah ubi kayu dengan produksi sebesar 6.714,54 ton dengan luas panen 222 ha.

1. **Sektor Perkebunan**

Tidak terdapat perkebunan besar di Kota Prabumulih tetapi hanya perkebunan rakyat. Jenis perkebunan rakyat yang diusahakan di Kota Prabumulih meliputi karet, kelapa sawit dan kelapa. Karet merupakan usaha perkebunan yang paling menonjol dan diusahakan oleh sebagian besar masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Produksi karet tahun 2019 mencapai 11.509 ton dengan luas areal tanaman19.131 ha, terbanyak di Kecamatan Prabumulih Barat sebanyak 3.178 ton dengan luas areal tanaman 5.633 ha.

1. **Sektor Peternakan**

Hewan ternak dibagi dalam kelompok ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Ternak yang termasuk kategori ternak besar meliputi sapi perah, sapi potong, kerbau, dan kuda. Ternak kecil meliputi kambing, domba, dan babi. Unggas meliputi ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging dan itik.

Secara umum, populasi sapi potong Tahun 2019 sebanyak 1.678 ekor. Sementara populasi kerbau sebanyak 16 ekor, kambing 7.298 ekor, dan domba sebanyak 160 ekor. Sedangkan populasi unggas mencapai 1.516.610 ekor, dengan populasi terbesar berada di Kecamatan Prabumulih Timur sebanyak 698.085 ekor dimana 683.000 ekor merupakan jenis ayam pedaging.

1. **Sektor Perikanan**

Potensi perikanan di Kota Prabumulih tidak terlalu besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan topografi Kota Prabumulih yang bukan merupakan daerah perairan. Pada Tahun 2019 produksi perikanan di Kota Prabumulih sebesar 224 ton yang merupakan produksi perikanan perairan umum dengan produksi terbesar berasal dari Kecamatan Prabumulih Barat.

1. **Sektor Kehutanan**

Wilayah pedesaan sangat cocok bagi pengembangan hutan rakyat, dengan jenis tanaman mahoni, pulai, jabon, gaharu, akasia, dan tanaman merawan. Akan tetapi hasil hutan belum memberikan kontribusi nilai tambah bruto terhadap pembentukan PDRB Kota Prabumulih karena nilai akhir dari hasil tanaman ini masih nol (*zero growth*), tetapi sebagian masyarakat memiliki lahan yang digunakan untuk pengembangan tanaman kehutanan, dengan total luas sebesar 1.069,14 ha. Tanaman kehutanan yang paling banyak ditanam adalah jenis pohon mahoni.

1. **Sektor Pertambangan**

Sektor Pertambangan dan energi kontribusinya relatif signifikan dalam menggerakkan perekonomian di Kota Prabumulih. Keadaan tersebut tercermin dari besarnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Tahun 2019 sebesar 10,61%. Adapun laju pertumbuhannya pada tahun 2019 sebesar 8,59% mengalami kenaikandibandingkan PDRB Tahun 2018 sebesar 4,87%. Kenaikanini disebabkan oleh produksi gas bumi di Kota Prabumulih yang jumlahnya meningkat cukup tajam. Peranan minyak dan gas bumi sangat strategis, dimana *output* yang dihasilkan dari komoditi ini terbukti mampu menaikkan nilai tambah bruto sektor ekonomi secara keseluruhan, namun sebagian besar masyarakat belum dapat menikmati secara langsung keberadaan sumber daya alam ini. Hal ini dikarenakan perusahaan pengelola migas masih perlu mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. Secara lebih terinci kondisi pertambangan dan penggalian disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 7.3 Kondisi Pertambangan dan Penggalian di Kota Prabumulih**

**Tahun 2015 – 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Potensi Produk** | **Satuan** | **Produksi Tahun** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| 1. | Minyak Bumi | Barel | 897.350 | 1.132.520 | 1.334.230 | 1.111.920 | 1.347.550 |
| 2. | Gas Bumi | MMBTU | 10.686.840 | 4.598.439 | 4.786.720 | 8.517.790 | 8.953.350 |

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabumulih.*

1. **Sektor Perdagangan dan Industri**

Sektor perdagangan merupakan sektor unggulan dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih. Pada tahun 2016 Kota Prabumulih telah membangun Pasar Tradisional Modern yang terletak di pusat Kota Prabumulih, sehingga pada tahun 2016 terdapat 2 pasar yang ada di Kota Prabumulih dari pasar tersebut jumlah sarana perdagangan sebanyak 3.620, dengan pembagian 1 Pasar Inpres, 17 Pasar Rakyat, 1.269 Toko, 848 Kios, 372 Lapak, 1.341 Toko Kelontong/Warung, 29 Minimarket, 145 Rumah Makan/Restoran. Selain itu Kota Prabumulih terdapat Pasar kalangan yang tersebar di Desa dan Kelurahan yang terdiri dari pasar kalangan Kelurahan Gunung Ibul, Kelurahan Payuputat, Kelurahan Gunung Kemala, Kelurahan Karang Jaya, Desa Pangkul, Kelurahan Sindur, Desa Karya Mulia, dan Desa Rambang Senuling.

Jika dilihat berdasarkan badan hukumnya, jumlah perusahaan terdaftar yang ada di Kota Prabumulihtahun 2019 sebanyak 299 perusahaan. Jenis perusahaan terbanyak adalah perusahaan berbentuk CV & Firma sebanyak 122, disusul secara berurutan yaitu Perseroan Terbatas sebanyak 100,perorangan 34,dan bentuk lainnya sebanyak 43.

Kegiatan Industri Kota Prabumulih ditandai dengan adanya beberapa jenis industri menengah dan kecil di Kota Prabumulih. Sektor industri di Kota Prabumulih Tahun 2018 terdapat 3.101 unit dan Tahun 2019 terdapat 534 unit usaha seperti dalam tabel berikut.

**Tabel 7.4 Jumlah Sektor Industri di Kota PrabumulihTahun 2015 – 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Industri** | **Jumlah Unit Usaha** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| 1. | Pangan | 402 | 1.189 | 1.696 | 1859 | 163 |
| 2. | Sandang dan Kulit | 184 | 184 | 231 | 279 | 48 |
| 3. | Kimia dan bahan Bangunan | 169 | 169 | 225 | 403 | 178 |
| 4. | Logam dan Jasa | 139 | 139 | 191 | 313 | 122 |
| 5. | Kerajinan Umum | 202 | 202 | 224 | 247 | 23 |
| **Jumlah** | | **1.096** | **1.883** | **2.567** | **3.101** | **534** |

*Sumber : Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kota Prabumulih.*

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

Angka pertumbuhan ekonomi secara teoritis menggambarkan peningkatan secara nyata jumlah barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah yang kemudian dapat menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Perkembangan ekonomi ini menjadi salah satu sasaran pembangunan ekonomi yang akan dicapai di suatu wilayah, yang kemudian pada akhirnya mampu mengurangi berbagai persoalan yang dihadapi di suatu negara, atau wilayah dalam skala yang lebih kecil, yaitu pengangguran dan kemiskinan, serta pemerataan pendapatan.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2019 sebesar 5,02% lebih rendah dibandingkan Tahun 2018 sebesar 5,17% dengan pencapaian inflasi pada level yang masih terkendali sebesar 2,72%.Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62%.

Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada Tahun 2019 sebesar 5,71% lebih rendah dibandingkan Tahun 2018 sebesar 6,04%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 15,35%.Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh sebesar 9,78%. Sedangkan tingkat inflasi Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 2,04% lebih rendah dari Tahun 2018 sebesar 2,74%.

Tingkat pertumbuhan *riil* sektor ekonomi di Kota Prabumulih mencapai 5,55% lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,83% dan mengalami penurunan juga pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,71%.

**Tabel 7.5Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Prabumulih Tahun 2015 – 2019(dalam Persen)**

| **No.** | **Sektor** | **Tahun** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **(1)** | **(2)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(7)** |
| 1 | Pertanian, kehutanan dan perikanan | 1,99 | 2,24 | 0,16 | 4,43 | 0,10 |
| 2 | Pertambangan dan penggalian | 1,31 | 4,64 | 3,26 | 4,87 | 8,59 |
| 3 | Industri pengolahan | 6,95 | 10,59 | 11,20 | 8,15 | 7,03 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 6,00 | 16,62 | 15,71 | 17,30 | 9,70 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang | 8,36 | 3,99 | 6,96 | 7,43 | 9,50 |
| 6 | Konstruksi | 0,98 | 11,48 | 5,78 | 4,26 | 3,96 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4,42 | 7,71 | 4,86 | 5,55 | 7,15 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 9,93 | 9,72 | 9,21 | 12,37 | 8,53 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 8,58 | 11,84 | 10,10 | 6,04 | 12,46 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 10,16 | 6,96 | 8,43 | 7,68 | 7,36 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 6,28 | 2,03 | 3,67 | 7,96 | -0,06 |
| 12 | Real Estat | 9,29 | 6,70 | 8,41 | 6,47 | 1,86 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 5,09 | 8,09 | 5,39 | 6,42 | 8,61 |
| 14 | Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 9,56 | 0,29 | 1,84 | 5,18 | 8,49 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 9.63 | 2,65 | 2,11 | 4,61 | 3,75 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 10,83 | -1,86 | 4,34 | 6,97 | 8,54 |
| 17 | Jasa Lainnya | 4,67 | 0,87 | 1,48 | 9,63 | 8,08 |
|  | **Pertumbuhan Dengan Migas** | **4,84** | **6,62** | **5,27** | **5,83** | **5,55** |
|  | **Pertumbuhan Tanpa Migas** | **5,41** | **6,79** | **5,33** | **5,38** | **5,29** |

Perekonomian Kota Prabumulih yang lebih baik dari tahun sebelumnya harus terus ditingkatkan di Tahun 2020. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus berusaha mencapai sasaran pembangunan. Upaya Pemerintah Daerah mencapai sasaran pembangunan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut yang selanjutnya dituangkan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020, telah mengakomodir dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan dan kota yang dilaksanakan tahun sebelumnya, hasil kunjungan kerja Walikota ke Kecamatan dan Desa, serta Reses anggota DPRD Kota Prabumulih.

Perkembangan perekonomian Kota Prabumulih sampai tahun 2019 dapat dilihat dari berbagai indikator antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Per Kapita, Laju Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Gini sebagai berikut.

1. **Produk Domestik Regional Bruto(PDRB)**

Dasar perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto. Nilai tambah bruto merupakan balas jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian yang terdiri dari upah/gaji, sewa tanah, bunga, dan surplus usaha. Total nilai tambah bruto dari semua sektor ekonomi dalam satu wilayah/daerah dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian dan kesejahteraan suatu wilayah. Meskipun begitu, wilayah dengan nilai PDRB yang tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan penduduknya secara nyata.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) lebih besar dibanding PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB per kapita berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk, sedangkan PDRB ADHK per kapita berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Pada tahun 2019, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Prabumulih dengan migas sebesar Rp7.823.060,60 jutameningkat 8,74% dari tahun 2018 sebesar Rp7.193.972,70 juta. Sedangkan PDRB ADHB tanpa migas sebesar Rp6.993.326,00 juta, meningkat 7,00% dari tahun 2018 sebesar Rp6.536.072,10 juta. Sedangkan secara nyata Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), PDRB Kota Prabumulih sebesar Rp5.385.163,40 juta(dengan migas) atau Rp4.738.927,90 juta (tanpa migas). Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dihitung dari PDRB ADHK. Pertumbuhan PDRB ADHK inilah yang dikenal juga sebagai laju pertumbuhan ekonomi. Pada Tahun 2019, perekonomian Kota Prabumulih tumbuh sebesar 5,55%.

**Tabel 7.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Kota Prabumulih Tahun 2017 - 2019**

**(dalam Juta Rupiah)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sektor** | **Tahun 2017** | | **Tahun 2018** | | **Tahun 2019** | |
| **ADHB** | **ADHK** | **ADHB** | **ADHK** | **ADHB** | **ADHK** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| 1 | Pertanian, kehutanan dan perikanan | 437.055,30 | 381.605,30 | 457.123,30 | 398.519,80 | 464.515,30 | 398.921,20 |
| 2 | Pertambangan dan penggalian | 669.458,00 | 567.492,80 | 727.450,30 | 595.112,10 | 829.734,50 | 646.235,50 |
| 3 | Industri pengolahan | 612.365,30 | 393.075,00 | 696.468,20 | 425.127,90 | 771.521,00 | 455.984,10 |
| 4 | Pengadaan Listrik & Gas | 11.648,70 | 7.180,50 | 13.842,50 | 8.422,70 | 14.786,80 | 9.239,70 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2.427,90 | 1.942,90 | 2.673,50 | 2.087,20 | 2.971,60 | 2.285,40 |
| 6 | Konstruksi | 1.265.148,30 | 848.987,70 | 1.345.124,10 | 885.125,20 | 1.408.213,70 | 920.135,30 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.558.341,60 | 1.024.426,80 | 1.710.393,70 | 1.081.292,60 | 1.899.382,90 | 1.158.655,50 |
| 8 | Transportasi, pergudangan dan komunikasi | 175.934,20 | 123.557,70 | 202.080,00 | 138.840,10 | 226.911,30 | 150.684,70 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 244.512,00 | 152.728,80 | 264.477,40 | 161.946,60 | 314.054,60 | 182.129,70 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 65.481,40 | 65.371,00 | 74.145,20 | 70.389,30 | 81.828,20 | 75.568,30 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 315.350,40 | 235.612,10 | 353.311,60 | 254.363,80 | 357.240,00 | 254.200,00 |
| 12 | Real Estate | 521.028,40 | 447.812,10 | 589.512,50 | 476.777,10 | 627.145,90 | 485.623,30 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 48.941,10 | 32.677,50 | 55.285,50 | 34.774,20 | 61.503,60 | 37.769,30 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 250.007,30 | 197.922,10 | 262.257,10 | 208.178,50 | 285.313,10 | 225.843,30 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 208.908,10 | 177.221,60 | 220.665,10 | 185.391,20 | 232.211,30 | 192.344,60 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 169.043,60 | 137.281,70 | 182.752,50 | 146.855,20 | 205.512,00 | 159.389,70 |
| 17 | Jasa lainnya | 30.137,50 | 25.447,50 | 35.510,10 | 27.898,20 | 40.215,80 | 30.153,70 |
| **PDRB Dengan Migas** | | **6.586289,10** | **4.820.343,10** | **7.193.972,70** | **5.101.101,70** | **7.823.060,60** | **5.385.163,40** |
| **PDRB Tanpa Migas** | | **6.021 396,00** | **4.311.939,00** | **6.536.072,10** | **4.544.059,20** | **6.993.326,00** | **4.738.927,90** |

1. **Pendapatan Per Kapita**

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk atau rata-rata produksi yang dihasilkan per satu orang penduduk selama satu tahun pada suatu daerah.

Secara umum, PDRB per kapita Kota Prabumulih terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari Tahun 2015 sebesar Rp31,49 juta, Tahun 2016 sebesar Rp34,02 juta dan Tahun 2017 sebesar Rp36,16juta. Pada Tahun 2019, PDRB per kapita Kota Prabumulih telah mencapai Rp41,87 juta dengan pertumbuhan sebesar 7,00% dari Tahun 2018 yang mencapai Rp39,01 juta.

1. **Laju Inflasi**

Laju inflasi menggambarkan adanya kenaikan harga-harga secara agregat. Laju inflasi yang terlalu tinggi dapat menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam perekonomian. Bagi konsumen, inflasi menjadi hal yang memberatkan karena secara tidak langsung dapat mengurangi pendapatan riil atau daya beli mereka. Sedangkan dari sisi produsen, inflasi menjadi insentif untuk terus melakukan aktivitas ekonomi.

Inflasi regional di Sumatera Selatan dihitung berdasarkan inflasi Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Hal ini mengingat bahwa pada tingkat nasional, inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 82 Kota besar di Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Selatan hanya penghitungan inflasi Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau yang diakomodir untuk kepentingan penghitungan inflasi nasional.

Pembahasan laju inflasi di Kota Prabumulih mengacu pada inflasi Kota Palembang sebagai kota terdekat.

**Tabel 7.7 Laju Inflasi Kota Palembang Tahun 2015 – 2019(dalam Persen)**

| **No.** | **Sektor** | **Tahun** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| 1 | Bahan makanan | 4,24 | 3,54 | 0,92 | 2,84 | 2,52 |
| 2 | Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau | 9,39 | 10,70 | 2,27 | 3,60 | 2,44 |
| 3 | Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan bakar | 2,91 | 1,44 | 4,96 | 1,88 | 1,76 |
| 4 | Sandang | 5,73 | 6,16 | 2,74 | 2,93 | 3,12 |
| 5 | Kesehatan | 5,59 | 5,73 | 2,98 | 2,68 | 2,35 |
| 6 | Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga | 3,45 | 3,17 | 3,45 | 3,16 | 3,84 |
| 7 | Transportasi dan Komunikasi | - 3,93 | - 0,06 | 2,87 | 3,01 | 0,48 |
| **Rata-rata** | | **3,05** | **3,68** | **2,85** | **2,78** | **2,36** |

1. **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ini artinya angka IPM mencakup segala dimensi yang dapat digunakan untuk melihat peningkatan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Indeks ini dibentuk dari 4 indikator yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Indikator angka harapan hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mencerminkan *output* dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator pengeluaran digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. IPM diklasifikasikan menurut besarannya yaitu: IPM > 80 kategori Sangat Tinggi, 80 > IPM > 70 kategori Tinggi, 70 > IPM > 60 kategori Sedang, dan IPM < 60 kategori Rendah.

Secara umum, IPM Kota Prabumulih terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan dari Tahun 2015 – 2019 sudah berada pada kategori Tinggi. Angka IPM Kota Prabumulih Tahun 2019 telah mencapai 74,4 menempati peringkat ketiga setelah Kota Palembang dan Lubuk Linggau dari 18 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dan meningkat dari Tahun 2018 yang mencapai 74,04 serta termasuk 3 Kabupaten/Kota yang mempunyai angka IPM diatas angka IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 70,02 serta masih diatas angka IPM Indonesia sebesar 71,92.

**Tabel 7.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Prabumulih**

**Tahun 2015 – 2019**

| **No.** | **IPM** | **Tahun** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
|  | **IPM** | **73,19** | **73,38** | **73,58** | **74,04** | **74,40** |
|  | Komponen Pembentuk IPM : |  |  |  |  |  |
| 1 | Angka Harapan Hidup (Tahun) | 69,59 | 69,63 | 69,67 | 69,88 | 70,00 |
| 2 | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 12,86 | 12,87 | 12,88 | 12,89 | 13,00 |
| 3 | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 9,62 | 9,67 | 9,68 | 9,71 | 10,00 |
| 4 | Pengeluaran per Kapita  (Ribu Rp) | 12.046 | 12.162 | 12.355 | 12.760 | 13.072 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih*

1. **Persentase Penduduk Miskin**

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Garis kemiskinan Kota Prabumulih Tahun 2019 sebesar Rp541.648,00 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp Rp530.748,00 dan lebih tinggi dari garis kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp446.706,00. Garis kemiskinan Kota Prabumulih merupakan yang tertinggi di Sumatera Selatan, hal ini menunjukkan tingkat kemakmuran Kota Prabumulih berada di atas rata-rata dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan.

Secara umum, persentase penduduk miskin Kota Prabumulih terus mengalami penurunan dan pada Tahun 2019 adalah sebesar 11,61%menempati peringkat keenam terendah setelah Kota Pagar Alam, Kabupaten OKUT,Kota Palembang, Kabupaten OKUS dan Kabupaten Banyuasin dari 18 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatandan termasuk 9 Kabupaten/Kota yang persentase penduduk miskinnya dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Selatan sebesar 12,80%.

Selama lima belas tahun terakhir (2004-2019) tingkat kemiskinan Kota Prabumulih cukup fluktuatif. Tingkat kemiskinan terendah terjadi pada Tahun 2007 yang mencapai 7,57%. Akan tetapi krisis ekonomi global yang terjadi Tahun 2008 mengakibatkan tingkat kemiskinan Kota Prabumulih melonjak naik hingga mencapai 15,39% dan setelah itu mengalami trend penurunan. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Pemerintah Kota Prabumulih mengingat pengentasan kemiskinan adalah salah satu program yang paling sulit dicarikan solusinya. Secara absolut jumlah penduduk miskin di Kota Prabumulih tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan dan secara persentase juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 7.9 Statistik Kemiskinan Kota Prabumulih Tahun 2015 – 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Tahun** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| 1 | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | 21,37 | 20,47 | 20,72 | 20,95 | 21,62 |
| 2 | Persentase Penduduk Miskin (%) | 12,12 | 11,44 | 11,42 | 11,39 | 11,61 |
| 3 | Garis Kemiskinan (Rp) | 441.420 | 466.459 | 493.871 | 530.748 | 541.648 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih*

1. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka (TPT)adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Prabumulih sampai dengan bulan Agustus 2020 mencapai 6,64%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yang Tingkat TPT-nya sebesar 6,05%. Jika ditinjau secara absolut angka pengangguran di Kota Prabumulih sampai dengan bulan Agustus 2020 mencapai5.617 orang.

**Tabel 7.10 Statistik Ketenagakerjaan Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Satuan** | **Tahun** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| 1 | Jumlah Angkatan Kerja (AK) | Jiwa | 92.556 | 92.837 | 96.417 |
| 2 | Jumlah Bukan Angkatan Kerja | Jiwa | 38.934 | 40.747 | 42.514 |
| 3 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 70,39 | 69,50 | 69,40 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 6,99 | 6,05 | 6,64 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih*

1. **Rasio Gini**

Rasio Gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Rasio gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Angka rasio gini Kota Prabumulih tahun 2019 adalah sebesar 0,344 berada dalam kategori sedang, rasio ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka 0,414 dan lebih tinggi dibandingkan dengan angka rasio gini Provinsi Sumatera Selatan yang berada di angka 0,331.

**Tabel 7.11Rasio Gini Kota Prabumulih 2015 – 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Tahun** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| 1 | Kota Prabumulih | 0,380 | 0,357 | 0,399 | 0,414 | 0,344 |
| 2 | Provinsi Sumatera Selatan | 0,360 | 0,348 | 0,361 | 0,358 | 0,331 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih*

1. **Kebijakan Keuangan**

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Pada akhir Maret 2020, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomo 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran. Pemerintah Pusat dan Daerah merevisi APBN/APBD TA 2020 melalui *refocusing* kegiatandan realokasi anggaran belanja non-prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19. Perubahan anggaran tersebut direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Transaksi keuangan pemerintah yang terkait dengan langkah dan kebijakan ini selanjutnya harus dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dasar Hukum pengalokasian anggaran untuk refocusing kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 di Pemerintah Daerah adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD.

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 sesuai ketentuan tersebut di atas sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian target pendapatan daerah melalui penyesuaian pendapatan transfer pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 dan penyesuaian PAD dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.
2. Melakukan penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja pegawai, rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50%, dan rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja.
3. Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dengan penyesuaian belanja digunakan untuk mendanai belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19, penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu, dan penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup.

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih pada TA 2020 adalah sebagai berikut :

1. **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD, pada dasarnya merupakan perkiraan penerimaan daerah tahun yang bersangkutan yang terukur secara rasional sehingga dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang ada. Pendapatan daerah yang diperoleh melalui sumber-sumber pendapatan yang ada, memiliki posisi sangat penting bagi kesinambungan hidup dan kemandirian di suatu daerah, mengingat pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di suatu daerah diperoleh dari hasil pengelolaan sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sesuai dengan kondisi faktual yang ada, Pemerintah Kota Prabumulih masih bertumpu pada pendapatan daerah yang bersumber dari luar PAD, terutama dana perimbangan baik Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut terindikasi bahwa kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan daerah masih relatif kecil proporsinya dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat dan APBD secara keseluruhan.

Alokasi Transfer Pemerintah Pusat Kota Prabumulih TA 2020 ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019, direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 dan terakhir revisi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Revisi alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat merupakan dampak dari realokasi dana APBN untuk penanganan Pandemi Covid-19, sehingga Pemerintah Kota Prabumulih mengalami pemotongan alokasi anggaran sebesar Rp104.470.443.000,00. Akibatnya target Dana Transfer Pemerintah Pusat pada APBD TA 2020 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar Rp675.718.618.000,00 atau 82,72% dibandingkan target TA 2019 sebesar Rp816.870.890.979,00

Selain itu target PAD Kota Prabumulih tahun 2020 juga mengalami penurunan yaitu hanya sebesar Rp101.219.000.000,00 atau 94,80% dibandingkan target PAD TA 2019 sebesar Rp106.773.091.263,00. Secara keseluruhan Pendapatan Daerah untuk TA 2020 dianggarkan sebesar Rp946.853.077.993,00.

1. **Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Prabumulih yakni kebijakan alokasi anggaran untuk membiayai semua kegiatan pemerintah daerah. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan,dan urusan fungsi penunjang terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018-2023.

Total anggaran belanja pada APBD TA 2020 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar Rp1.118.719.898.382,00 atau 88,88% dibandingkan anggaran belanja TA 2019 sebesar Rp1.258.719.616.606,00 karena terjadinya penyesuaian target pendapatan daerah, selain itu sebagian anggaran belanja direalokasikan untuk penanganan Pandemi Covid-19 terutama diarahkan pada Belanja Tak Terduga.

Dari total anggaran belanja TA 2020 sebesar Rp1.118.719.898.382,00 dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp488.617.647.623,00 yang terdiri dari alokasi untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp403.085.452.705,00; Belanja Hibah sebesar Rp12.312.486.000,00; Belanja Bantuan Sosial Rp201.000.000,00;Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol sebesar Rp24.955.269.918,00 serta Belanja Tak Terduga sebesar Rp48.063.439.000,00.

Sedangkan untuk Belanja Langsung (Belanja Kegiatan) dialokasikan sebesar Rp630.102.250.759,00 yang terdiri dari alokasi untuk membiayaiBelanja Pegawai sebesar Rp28.079.544.446,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp373.054.297.954,00 serta Belanja Modal sebesar Rp228.968.408.359,00.

1. **Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penganggaran Pemerintah Kota Prabumulih pada Tahun 2020 adalah anggaran defisit. Kebijakan tersebut terutama untuk mendukung kebutuhan belanja dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kebijakan defisit ini secara cermat juga memperhitungkan realisasi SILPA pada tahun anggaran sebelumnya sebagai sumber pembiayaan utama untuk menutup defisit yang ada.

Tidak terdapat kebijakan pengeluaran pembiayaan pada TA 2020karena terjadinya penyesuaian target pendapatan daerah dan realokasi anggaran berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19 sehingga Pemerintah Kota Prabumulih tidak menganggarkan dana untuk menambah investasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, baik pada PDAM Tirta Prabujaya maupun PT Bank Sumsel Babel.

Pada sisi Pembiayaan Daerah yang direncanakan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020 yaitu Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp171.866.820.389,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00.

1. **Pencapaian Target Kinerja APBD**

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan6(enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 15 (lima belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6(enam) urusan pemerintahan pilihan, dan 6(enam) urusan pemerintahan fungsi penunjang. Urusan wajib, pilihan dan penunjang tersebut penanganannya tidak seluruhnya satu urusan ditangani oleh satuOPD ataupun satuOPD menangani satu urusan. Hal tersebut berdampak pada performa APBD yang menyesuaikan dengan OPD yang ada.

Realisasi Belanja Langsung (Belanja Kegiatan) Pemerintah Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp582.938.180.604,66 atau 92,51% dari anggaranRp630.102.250.759,00 terdiri dari realisasi urusan wajib berkaitan pelayanan dasar sebesar Rp367.869.816.003,66atau 90,61% dari anggaran Rp405.974.050.116,00; realisasi urusan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar sebesar Rp36.710.065.504,00atau 96,36% dari anggaran Rp38.096.219.732,00;realisasiurusan pilihan sebesar Rp8.480.140.240,00 atau 88,78% dari anggaran Rp9.551.495.718,00 dan realisasi fungsi penunjang sebesar Rp169.878.158.857,00 atau 96,26% dari anggaran Rp176.480.485.193,00.

Berikut ini ringkasan anggaran dan realisasi belanja langsung untuk masing-masing urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

**Tabel 7.12Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Langsung Kota Prabumulih**

**Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2020**

| **KODE** | **URUSAN/OPD** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/3 x 100** |
| **1** | **Urusan Wajib Pelayanan Dasar** | **405.974.050.116,00** | **367.869.816.003,66** | **90,61** |
| **1.01** | **Pendidikan** |  |  |  |
| 1.01 . 1.01.01 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 63.671.321.423,00 | 61.979.672.222,00 | 97,34 |
| 1.01 . 2.17.01 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 192.510.000,00 | 166.307.000,00 | 86,39 |
|  | **Sub Jumlah** | **63.863.831.423,00** | **62.145.979.222,00** | **97,31** |
| **1.02** | **Kesehatan** |  |  |  |
| 1.02 . 1.02.01 | DINAS KESEHATAN | 54.473.347.636,00 | 42.939.209.450,00 | 78,83 |
| 1.02 . 1.02.02 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 68.237.235.828,00 | 52.921.248.461,00 | 77,55 |
|  | **Sub Jumlah** | **122.710.583.464,00** | **95.860.457.911,00** | **78,12** |
| **1.03** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |  |  |  |
| 1.03 . 1.03.01 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 172.870.563.832,00 | 165.619.093.552,66 | 95,81 |
| 1.03 . 1.04.01 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 10.117.721.347,00 | 9.993.234.617,00 | 98,77 |
| 1.03 . 4.01.11 | KEC. PRABUMULIH BARAT | 1.579.459.850,00 | 1.174.773.473,00 | 74,38 |
| 1.03 . 4.01.12 | KEC. PRABUMULIH TIMUR | 2.800.000.000,00 | 2.505.619.445,00 | 89,49 |
| 1.03 . 4.01.13 | KEC. CAMBAI | 1.050.000.000,00 | 1.030.228.755,00 | 98,12 |
| 1.03 . 4.01.14 | KEC. RAMBANG KAPAK TENGAH | 350.000.000,00 | 301.651.941,00 | 86,19 |
| 1.03 . 4.01.15 | KEC. PRABUMULIH SELATAN | 1.050.000.000,00 | 1.034.719.810,00 | 98,54 |
| 1.03 . 4.01.16 | KEC. PRABUMULIH UTARA | 1.322.580.700,00 | 556.674.588,00 | 42,09 |
|  | **Sub Jumlah** | **191.140.325.729,00** | **182.215.996.181,66** | **95,33** |
| **1.04** | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** |  |  |  |
| 1.04. 1.04.01 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | **19.639.584.800,00** | **19.177.759.820,00** | **97,65** |
| **1.05** | **Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** |  |  |  |
| 1.05 . 1.05.01 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1.246.099.000,00 | 1.243.648.142,00 | 99,80 |
| 1.05 . 1.05.02 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 2.918.287.600,00 | 2.841.303.402,00 | 97,36 |
| 1.05 . 1.05.03 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 355.869.000,00 | 349.382.875,00 | 98,18 |
| 1.05. 4.01.03 | SEKRETARIAT DAERAH | 380.000.000,00 | 380.000.000,00 | 100,00 |
|  | **Sub Jumlah** | **4.900.255.600,00** | **4.814.334.419,00** | **98,25** |
| **1.06** | **Sosial** |  |  |  |
| 1.06 . 1.06.01 | DINAS SOSIAL | 3.369.469.100,00 | 3.313.203.650,00 | 98,33 |
| 1.06 . 4.05.08 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 350.000.000,00 | 342.084.800,00 | 97,74 |
|  | **Sub Jumlah** | **3.719.469.100,00** | **3.655.288.450,00** | **98,27** |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar** | **38.096.219.732,00** | **36.710.065.504,00** | **96,36** |
| **2.01** | **Tenaga Kerja** |  |  |  |
| 2.01 . 2.01.01 | DINAS TENAGA KERJA | **1.169.772.900,00** | **1.150.272.207,00** | **98,33** |
| **2.02** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |  |  |  |
| 2.02 . 2.08.01 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK | **530.000.000,00** | **482.646.800,00** | **91,07** |
| **2.03** | **Pangan** |  |  |  |
| 2.03 . 2.03.01 | DINAS KETAHANAN PANGAN | **812.914.500,00** | **784.856.818,00** | **96,55** |
| **2.05** | **Lingkungan Hidup** |  |  |  |
| 2.05 . 1.04.01 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 4.507.979.332,00 | 4.475.704.597,00 | **99,28** |
| 2.05 . 2.05.01 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3.244.823.000,00 | 3.181.146.720,00 | **98,04** |
|  | **Sub Jumlah** | **7.752.802.332,00** | **7.656.851.317,00** | **98,76** |
| **2.06** | **Administrasi Kependudukan dan Capil** |  |  |  |
| 2.06 . 2.06.01 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | **2.748.237.000,00** | **2.618.297.816,00** | **95,27** |
| **2.07** | **Pemberdayaan Masyarakat Desa** |  |  |  |
| 2.07 . 2.07.01 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 5.789.006.000,00 | 5.441.737.167,00 | 94,00 |
| 2.07 . 4.01.11 | KEC. PRABUMULIH BARAT | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 |
| 2.07 . 4.01.12 | KEC. PRABUMULIH TIMUR | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 100,00 |
| 2.07 . 4.01.13 | KEC. CAMBAI | 27.000.000,00 | 26.200.000,00 | 97,04 |
| 2.07 . 4.01.14 | KEC. RAMBANG KAPAK TENGAH | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 100,00 |
| 2.07 . 4.01.15 | KEC. PRABUMULIH SELATAN | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 100,00 |
| 2.07 . 4.01.16 | KEC. PRABUMULIH UTARA | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 |
|  | **Sub Jumlah** | **5.998.006.000,00** | **5.649.937.167,00** | **94,20** |
| **2.08** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |  |  |  |
| 2.08 . 2.08.01 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK | **5.462.424.000,00** | **4.955.761.382,00** | **90,72** |
| **2.09** | **Perhubungan** |  |  |  |
| 2.09 . 2.09.01 | DINAS PERHUBUNGAN | **1.412.900.000,00** | **1.387.937.348,00** | **98,23** |
| **2.10** | **Komunikasi dan Informatika** |  |  |  |
| 2.10 . 2.10.01 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | **6.438.533.000,00** | **6.422.552.499,00** | **99,75** |
| **2.11** | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** |  |  |  |
| 2.11 . 2.11.01 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1.736.758.000,00 | 1.718.264.462,00 | 98,94 |
| 2.11 . 4.01.03 | SEKRETARIAT DAERAH | 235.000.000,00 | 229.300.000,00 | 97,57 |
|  | **Sub Jumlah** | **1.971.758.000,00** | **1.947.564.462,00** | **98,77** |
| **2.12** | **Penanaman Modal** |  |  |  |
| 2.12 . 2.12.01 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | **1.206.400.000,00** | **1.174.419.939,00** | **97,35** |
| **2.13** | **Kepemudaan dan Olah Raga** |  |  |  |
| 2.13 . 2.13.01 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | **1.825.757.000,00** | **1.772.433.769,00** | **97,08** |
| **2.14** | **Statistik** |  |  |  |
| 2.14 . 2.10.01 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | **48.000.000,00** | **48.000.000,00** | **100,00** |
| **2.17** | **Perpustakaan** |  |  |  |
| 2.17 . 2.17.01 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | **682.300.000,00** | **622.708.980,00** | **91,27** |
| **2.18** | **Kearsipan** |  |  |  |
| 2.18 . 2.17.01 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | **36.415.000,00** | **35.825.000,00** | **98,38** |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Urusan Pilihan** | **9.551.495.718,00** | **8.480.140.240,00** | **88,78** |
| **3.01** | **Kelautan dan Perikanan** |  |  |  |
| 3.01 . 3.03.01 | DINAS PERTANIAN | **1.650.173.000,00** | **1.103.424.942,00** | **66,87** |
| **3.02** | **Pariwisata** |  |  |  |
| 3.02 . 2.13.01 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | **100.000.000,00** | **93.000.000,00** | **93,00** |
| **3.03** | **Pertanian** |  |  |  |
| 3.03 . 2.03.01 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 1.072.387.500,00 | 1.041.795.312,00 | **97,15** |
| 3.03 . 3.03.01 | DINAS PERTANIAN | 1.841.170.000,00 | 1.688.523.612,00 | **91,71** |
|  | **Sub Jumlah** | **2.913.557.500,00** | **2.730.318.924,00** | **93,71** |
| **3.05** | **Energi dan Sumberdaya Mineral** |  |  |  |
| 3.05. 1.04.01 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | **2.458.760.000,00** | **2.408.308.700,00** | **97,95** |
| **3.06** | **Perdagangan** |  |  |  |
| 3.06 . 3.06.01 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | **1.949.005.218,00** | **1.676.478.352,00** | **86,02** |
| **3.07** | **Perindustrian** |  |  |  |
| 3.07 . 3.06.01 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 390.000.000,00 | 380.809.322,00 | 97,64 |
| 3.07 . 4.01.03 | SEKRETARIAT DAERAH | 90.000.000,00 | 87.800.000,00 | 97,56 |
|  | **Sub Jumlah** | **480.000.000,00** | **468.609.322,00** | **97,63** |
|  |  |  |  |  |
| **4** | **Urusan Fungsi Penunjang** | **176.480.485.193,00** | **169.878.158.857,00** | **96,26** |
| **4.01** | **Administrasi Pemerintahan** |  |  |  |
| 4.01 . 4.01.03 | SEKRETARIAT DAERAH | 101.180.393.250,00 | 98.681.638.507,00 | 97,53 |
| 4.01 . 4.01.04 | SEKRETARIAT DPRD | 40.928.512.593,00 | 38.240.580.962,00 | 93,43 |
| 4.01 . 4.01.11 | KEC. PRABUMULIH BARAT | 1.010.540.150,00 | 982.641.004,00 | 97,24 |
| 4.01 . 4.01.12 | KEC. PRABUMULIH TIMUR | 1.096.630.000,00 | 1.070.038.273,00 | 97,58 |
| 4.01 . 4.01.13 | KEC. CAMBAI | 678.500.000,00 | 632.422.596,00 | 93,21 |
| 4.01 . 4.01.14 | KEC. RAMBANG KAPAK TENGAH | 503.600.000,00 | 494.398.503,00 | 98,17 |
| 4.01 . 4.01.15 | KEC. PRABUMULIH SELATAN | 676.842.000,00 | 654.735.989,00 | 96,73 |
| 4.01 . 4.01.16 | KEC. PRABUMULIH UTARA | 1.283.769.300,00 | 908.001.148,00 | 70,73 |
|  | **Sub Jumlah** | **147.358.787.293,00** | **141.664.456.982,00** | **96,14** |
| **4.02** | **Pengawasan** |  |  |  |
| 4.02 . 4.02.01 | INSPEKTORAT DAERAH | **2.978.693.500,00** | **2.911.648.969,00** | **97,75** |
| **4.03** | **Perencanaan** |  |  |  |
| 4.03 . 4.03.01 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 4.757.680.000,00 | 4.319.364.049,00 | 90,79 |
| 4.03 . 4.01.11 | KEC. PRABUMULIH BARAT | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 4.03 . 4.01.12 | KEC. PRABUMULIH TIMUR | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 100,00 |
| 4.03 . 4.01.13 | KEC. CAMBAI | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 4.03 . 4.01.14 | KEC. RAMBANG KAPAK TENGAH | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 4.03 . 4.01.15 | KEC. PRABUMULIH SELATAN | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 4.03 . 4.01.16 | KEC. PRABUMULIH UTARA | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100,00 |
|  | **Sub Jumlah** | **4.803.680.000,00** | **4.365.364.049,00** | **90,88** |
| **4.04** | **Keuangan** |  |  |  |
| 4.04 . 4.04.05 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 11.522.950.400,00 | 11.396.430.613,00 | 98,90 |
| 4.04 . 4.04.06 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1.520.900.000,00 | 1.491.873.648,00 | 98,09 |
|  | **Sub Jumlah** | **13.043.850.400,00** | **12.888.304.261,00** | **98,81** |
| **4.05** | **Kepegawaian** |  |  |  |
| 4.05 . 4.05.08 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | **7.336.694.000,00** | **7.116.122.625,00** | **96,99** |
| **4.07** | **Penelitian dan Pengembangan** |  |  |  |
| 4.07 . 4.07.01 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | **958.780.000,00** | **932.261.971,00** | **97,23** |
|  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** | **630.102.250.759,00** | **582.938.180.604,66** | **92,51** |

1. **Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
2. **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Target Pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp946.853.077.993,00 dan realisasinya sebesar Rp972.242.373.625,39 atau 102,68% dibandingkan target, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp85.037.055.386,71; Pendapatan Transfer sebesar Rp859.882.828.238,68; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp27.322.490.000,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.093.764.628.464,00 dan realisasinya sebesar Rp1.024.031.018.357,66 atau 93,63% dari total anggaran.

Anggaran Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.955.269.918,00 dan realisasinya sebesar Rp30.320.916.918,00 atau 121,50%dari total anggaran yang terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp29.382.215.000,00serta Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik sebesar Rp938.701.918,00.

Realisasi penerimaan Pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp972.242.373.625,39 bila dibandingkan dengan realisasi Belanja sebesar Rp1.024.031.018.357,66 serta realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp30.320.916.918,00 maka terdapat defisit sebesar Rp82.109.561.650,27. Sedangkan, realisasi Penerimaan Pembiayaan adalah sebesar Rp171.866.820.389,63dan tidak terdapat Pengeluaran Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Prabumulih sehingga terdapat SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp89.757.258.739,36.

1. **Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penggalian potensi pendapatan daerah antara lain:

1. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana;
2. Masih adanya jenis-jenis Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum ada Peraturan Daerah sebagai landasan untuk melaksanakan pemungutannya;
3. Tingkat kesadaran wajib pajak/wajib retribusi masih rendah;
4. Peranan Desa/Kelurahan dan Kecamatan belum optimal dalam memantau pembayaran PBB Perdesaan Perkotaan (PBB P2);
5. Penetapan NJOP masih dirasakan kurang adil oleh kebanyakan warga;
6. Kurangnya pembinaan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikaitkan dengan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah;
7. Adanya Perda Kota Prabumulih No. 8 Tahun 2012 yang menghapus retribusi atas pencatatan register dan penerbitan kutipan akta kelahiran;
8. Pasar tradisional (PTM II) belum dimanfaatkan secara penuh pada tahun 2020 sehingga penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa ruko tidak tercapai.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, maka perlu dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Optimalisasi pengelolaan terhadap obyek-obyek pajak daerah yang ada;
2. Melakukan pembenahan serta meningkatkan sarana dan prasarana pemungutan pendapatan daerah;
3. Membuat Peraturan Daerah tentang sumber-sumber retribusi daerah lainnya, misalnya retribusi tempat pelelangan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas pajak melalui pendidikan dan pelatihan serta menambah jumlah personil yang berkompeten.
5. Melaksanakan program penyuluhan/sosialisasi secara intensif dan dilakukannya penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi;
6. Melakukan updating nilai piutang PBB Perdesaan Perkotaan (PBB P2) karena NJOP masih menggunakan data dari KPP Pratama Kota Prabumulih;
7. Meningkatkan peran serta aparat Kecamatan dan Desa/Kelurahan secara berdaya guna dalam rangka membantu penyampaian SPPT PBB, serta memantau pembayaran yang dilakukan melalui bank (menggunakan DHKP);
8. Melakukan pendataan di lapangan terhadap subjek dan objek pajak;
9. Dilakukan koordinasi yang intensif dengan unit satuan kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah (PAT);
10. Melaksanakan pengawasan dan menguji kebenaran data-data disampaikan oleh wajib pajak sebagai dasar penetapan Pajak Daerah;
11. Memasang tapping box kepada seluruh subyek pajak daerah sebagai dasar perhitungan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir.
12. **Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kuterbandingkan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

1. **Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang–undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih serta Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kota Prabumulih, jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih di TA 2012 adalah sebanyak 35 entitas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih terdapat penambahan 1 SKPD yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam pelaksanaan APBD TA 2014 adalah sebanyak 36 entitas SOTK.

Pada Tahun 2014 terdapat reorganisasi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih, terdapat penambahan dan pemekaran SKPD serta peningkatan eselon SKPD dari kantor menjadi dinas/badan serta peningkatan kelurahan menjadi SKPD, sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 58 entitas SOTK yang mulai berlaku pada TA 2015.

Pada tahun 2016 terdapat reorganisasi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga jumlah OPDdi lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 35 entitas SOTK yang mulai berlaku pada TA 2018.

Pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, terdapat pembentukan 2 OPD baru yaitu pemecahan Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); serta pemecahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga jumlah OPDdi lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 37 entitas SOTK terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Daerah (20 Dinas);
5. Badan Daerah (6 Badan); dan
6. Kecamatan (6 Kecamatan).

Selain SOTK tersebut di atas juga ditambah UPT Dinas Kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih yang bersifat otonom dan telah menerapkan PPK BLUD, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Setiap kepala OPD merupakan Entitas Akuntansi yang mempunyai kewenangan untuk menyusun laporan keuangan OPD, yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih mempunyai dua fungsi yaitu bertindak sebagai OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)serta bertindak sebagai entitas pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (PPKD) yaitu sebagai pembuat rangkuman (gabungan) laporan keuangan dari entitas akuntansi seluruhOPD.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

1. **Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih:

1. **Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO,beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. **Prinsip Nilai Historis *(Historical Cost Principle)***

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain, karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

1. **Prinsip Realisasi *(Realization Principle)***

Pendapatan daerah yang tersedia dan telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tahun anggaran dimaksud. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

1. **Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal *(Substance Over Form Principle)***

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1. **Prinsip Periodisitas *(Periodicity Principle)***

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

1. **Prinsip Konsistensi *(Consistency Principle)***

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Kota Prabumulih (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1. **Prinsip Pengungkapan Lengkap *(Full Disclosure Principle)***

Laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

1. **Prinsip Penyajian Wajar *(Fair Presentation Principle)***

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

1. **Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dituangkan ke dalam Peraturan walikota Prabumulih No. 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Prabumulih dan Revisinya yaitu Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2015 dan Nomor 43 Tahun 2017.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebagai berikut.

1. **Pendapatan LRA**

PendapatanLRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan IPSAP 02, pengakuan Pendapatan LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya, sehingga Pendapatan LRA mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan LRA diklasifikasikan berdasarkan sumber dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. **Pendapatan LO**

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO dapat diakui dengan kriteria:

1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned)*

Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Pendapatan LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;

1. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasikan adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang (biaya) terhadap Pendapatan LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasikan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Klasifikasi Pendapatan LO yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pendapatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa.

1. **Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari RKUD. Oleh karena itu, Belanja diakui pada saat:

1. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD;
2. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
3. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh SKPD, dimana pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetorkan RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melakukan suatu aktivitas, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.

1. **Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.

1. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran hibah, dan penggunaan persediaan.

1. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Bebandiukurdandicatatsebesarakumulasibeban yang terjadiselamasatuperiodepelaporandandisajikanpadalaporanoperasionalsesuaidenganklasifikasiekonomi (*line item*) sebagai berikut.

1. Hargaperolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Bebanhanya diklasifikasikan menurutklasifikasiekonomi, yang padaprinsipnyamengelompokkanberdasarkanjenisbeban, yaitu Beban Operasi, Beban Transfer, Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa.

1. **Transfer**

Transfer merupakan pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain. Transfer diklasifikasikan sebagai berikut.

1. **Transfer Bagi Hasil Pendapatan**

Transfer bagi hasil pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintah daerah yang lebih rendah.

1. **Transfer Bantuan Keuangan**

Transfer bantuan keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada desa dan partai politik.

1. **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

**Penerimaan Pembiayaan** diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Berdasarkan IPSAP 03, penerimaan pembiayaan mencakup transaksi berikut.

1. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUD;
2. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
3. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan SILPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Piutang, dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

**Pengeluaran Pembiayaan** diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Berdasarkan IPSAP 03, pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi berikut.

1. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
2. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

1. **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosialdi masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

1. **Aset Lancar**

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan.

**Kas dan Setara Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan di neraca dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Suatu investasi disebut Setara Kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas pada pemerintah daerah meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD.

Setara Kas meliputi Deposito dan Surat Utang Negara/Obligasi yang jangka waktu jatuh temponya kurang dari 3 (tiga) bulan.

**Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

SKPD tidak diperbolehkan melakukan investasi jangka pendek, kecuali satuan kerja BLUD. BLUD dapat melakukan investasi dalam rangka pemanfaatan kas yang menganggur (*idle cash*) dan lazimnya dalam bentuk deposito.

Investasi Jangka Pendek meliputi investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan deposito.

**Piutang**

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

1. **Piutang Pendapatan**

Digunakan untuk mencatat piutang akun pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah, antara lain: Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, Piutang Transfer Pemerintah Daerah, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah dan Piutang Pendapatan Lainnya.

1. **Piutang Lainnya**

Digunakan untuk mencatat Piutang Lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah, antara lain Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dan Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya.

1. **Beban Dibayar Dimuka**

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dibayarkan dimana pengeluaran tersebut belum menjadi beban pada tahun berjalan.

**Penyisihan Piutang**

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada Laporan Operasional.

Penyisihan Piutang mencakup antara lain Penyisihan Piutang Pendapatan dan Penyisihan Piutang Lainnya. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa uang muka belanja/beban dibayar di muka dan piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, serta piutang transfer antar pemerintahan.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Penetapan kriteria kualitas piutang dikelompokkan berdasarkan jenis piutang:

1. Piutang Pajak Daerah
   * + - Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*);
       - Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*);
2. Piutang Retribusi Daerah;
3. Piutang selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut.

**Tabel 7.13Besaran Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

| **No.** | **Kualitas Piutang** | **Taksiran Piutang Tak Tertagih** |
| --- | --- | --- |
| a. | Lancar | 0,5 % |
| b. | Kurang Lancar | 10 % |
| c. | Diragukan | 50 % |
| d. | Macet | 100 % |

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Terhadap piutang yang telah dihapusbukukan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.

**Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan dan bibit tanaman, untuk diserahkan kepada masyarakat;
5. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis, misalnya cadangan minyak dan cadangan beras.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan di neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Sistem pencatatan persediaan:

1. Metode Perpetual

Fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi dan perputarannya lambat, antara lain suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, dan tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

1. Metode Periodik

Fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadipemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode dikalikan dengan nilai per unit persediaan harga pembelian terakhir. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini digunakan untuk persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain barang konsumsi, barang habis pakai, dan barang cetakan.

1. **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang merupakan aset non lancar berupa investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode Biaya

Diterapkan jika kepemilikan kurang dari 20%. Investasi pemerintah daerah dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

1. Metode Ekuitas

Diterapkan jika kepemilikan lebih besar atau sama dengan 20% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Investasi pemerintah daerah dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen tunai yang diterima pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi, sedangkan dividen yang diterima dalam bentuk saham tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

1. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Diterapkan jika kepemilikan bersifat non permanen, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian dan investasi berbentuk dana bergulir. Investasi pemerintah daerah dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh (*net realizable value*) di akhir masa investasi sesuai jatuh temponya yaitu dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar nilai perolehan, ditambah dengan pendapatan dana bergulir yang digulirkan lagi.

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo dana bergulir, dan/atau upaya penagihan.

Penetapan kriteria kualitas dana bergulir dikelompokkan berdasarkan mekanisme penyaluran dan penanggung jawab pengelolaan dana bergulir:

* + - * Dana bergulir dengan kelola sendiri/langsung.
      * Dana bergulir dengan *executing agency.*
      * Dana bergulir dengan *chanelling agency.*

Besarnya penyisihan dana bergulir dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut.

**Tabel 7.14 Besaran Penyisihan Dana Bergulir**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Kualitas**  **Dana Bergulir** | **Taksiran Dana Bergulir**  **Tak Tertagih** |
| a. | Lancar | 0,5 % |
| b. | Kurang Lancar | 10 % |
| c. | Diragukan | 50 % |
| d. | Macet | 100 % |

Investasi Jangka Panjang meliputi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.

**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen meliputi Investasi kepada entitas lainnya, Investasi Obligasi, Investasi dalam Proyek Pembangunan, Dana Bergulir, Deposito Jangka Panjang, dan Investasi Non Permanen Lainnya.

**Investasi Jangka Panjang Permanen**

Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Jangka Panjang Permanen meliputi Penyertaan Modal Pemda dan Investasi Permanen lainnya.

1. **Aset Tetap**

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetapdi bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap di neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut.
   * + - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
       - Pengeluaran untuk tanah; gedung dan bangunan; jalan, jembatan, instalasi, jaringan dan irigasi yang sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
       - Untuk aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya dikecualikan dari nilai kapitalisasi pada poin (1) dan (2).

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, kualitas, dan volume aset tetap yang telah dimiliki diperlakukan sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi harus dianggarkan dalam belanja modal yang menambah nilai aset tetap yang bersangkutan dan bukan dianggarkan dalam belanja barang dan jasa (belanja pemeliharaan).

Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal untuk perbaikan atau pemeliharaan rutin aset tetap, termasuk didalamnya pengeluaran untuk suku cadang yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan serta tidak memperpanjang masa manfaat aset tetap maka diakui sebagai beban pengeluaran (e*xpenses*) pada periode dimana beban tersebut terjadi meskipun nilainya signifikan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

**Tanah**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

**Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**Jalan Irigasi dan Jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

**Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya, hewan dan ternak, serta tanaman.

**Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Suatu aset berwujud diakui sebagai KDP jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

**Akumulasi Penyusutan**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi Penyusutan (*accumulated depreciation*) merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan perkiraan masa manfaat (umur) untuk setiap unit aset tetap tanpa nilai residu dan perhitungan penyusutan dilaksanakan dengan pendekatan bulanan pada setiap akhir periode pelaporan.

Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual ataupun sekelompok aset sekaligus. Menghitung penyusutan untuk setiap aset yang nilai per unitnya besar dapat dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap jenis aset yang bersangkutan, tetapi untuk aset yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil akan lebih praktis jika dihitung secara berkelompok.

Aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut.

1. Asettersebutdiperolehdalamwaktuyangbersamaandanmempunyaimasa manfaat yang sama;
2. Manfaatsecarateknissuatuasetsangatbergantungpadaasetlain(misalnya peralatan kesehatan seperti kamera sinar x dan alat pencetakan film sinar x);
3. Pembelianasetdilakukansecaraberpasangandanhargabelinyamerupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya);
4. Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah, kit IPA).

Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

Penyusutan per periode=Nilai yang dapat disusutkan

Masa manfaat

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

**Tabel 7.15Masa Manfaat Aset Tetap**

| **Kodifikasi** | | | | **Uraian** | **Masa Manfaat (Tahun)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  |  | **ASET TETAP** |  |
| 1 | 3 | 2 |  | **Peralatan dan Mesin** |  |
| 1 | 3 | 2 | 01 | Alat-Alat Besar Darat | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 02 | Alat-Alat Besar Apung | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 03 | Alat-Alat Bantu | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 04 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 05 | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 06 | Alat Angkut Apung Bermotor | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 07 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 08 | Alat Angkut Bermotor Udara | 20 |
| 1 | 3 | 2 | 09 | Alat Bengkel Bermesin | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | Alat Ukur | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | Alat Pengolahan Pertanian | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | Alat Kantor | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | Alat Rumah Tangga | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 16 | Peralatan Komputer | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | Alat Studio | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | Alat Komunikasi | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 20 | Peralatan Pemancar | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 21 | Alat Kedokteran | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 22 | Alat Kesehatan | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 23 | Unit-Unit Laboratorium | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 24 | Alat Peraga/Praktek Sekolah | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 25 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 27 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 28 | Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 29 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 31 | Senjata Api | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 32 | Persenjataan Non Senjata Api | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 33 | Alat Keamanan dan Perlindungan | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 3 |  | **Gedung dan Bangunan** |  |
| 1 | 3 | 3 | 01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 03 | Bangunan Menara | 40 |
| 1 | 3 | 3 | 04 | Bangunan Bersejarah | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 05 | Tugu Peringatan | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 06 | Candi | - |
| 1 | 3 | 3 | 07 | Monumen/Bangunan Bersejarah | - |
| 1 | 3 | 3 | 08 | Tugu Peringatan Lain | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 09 | Tugu Titik Kontrol/Pasti | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 10 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 7 |
| 1 | 3 | 3 | 11 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 |  | **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** |  |
| 1 | 3 | 4 | 01 | Jalan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 02 | Jembatan | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 03 | Bangunan Air Irigasi | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 04 | Bangunan Air Pasang Surut | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 05 | Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 06 | Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 07 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 08 | Bangunan Air Bersih/Baku | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 09 | Bangunan Air Kotor | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 10 | Bangunan Air Laut/Tawar | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 11 | Instalasi Air Minum/Air Bersih | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 12 | Instalasi Air Kotor | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 13 | Instalasi Pengolahan Sampah | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 14 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 15 | Instalasi Pembangkit Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 16 | Instalasi Gardu Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 17 | Instalasi Pertahanan | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 18 | Instalasi Gas | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 19 | Instalasi Pengaman | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 20 | Jaringan Air Minum | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 21 | Jaringan Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 22 | Jaringan Telepon | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 23 | Jaringan Gas | 30 |

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap lainnya berupa hewan/ternak, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

1. **Dana Cadangan**

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalambentuk rekening tersendiri;
4. Sumber dana cadangan; dan
5. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

1. **Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

**Tagihan Jangka Panjang**

1. **Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/pejabat di pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

1. **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus tersebut terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan akan direklasifikasi dan disajikan tersendiri dalam aset lancar sebagai Bagian Lancar Tuntutan Ganti kerugian Daerah.

**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

1. **Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa**

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan sewa.

1. **Kerjasama Pemanfaatan (KSP)**

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama pemanfaatan (KSP).

1. **Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)**

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

1. **Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)**

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

**Aset Tidak Berwujud**

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Definisi aset tak berwujud mensyaratkan bahwa aset tak berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Masa manfaat aset tak berwujud terdiri dari masa manfaat tak terbatas (seperti *goodwill*) dan masa manfaat terbatas. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa.

**Tabel 7.16 Besaran Amortisasi Aset Tak Berwujud**

| **No.** | **Kelompok**  **Aset Tak Berwujud** | **Masa**  **Manfaat** | **Tarif**  **Amortisasi** |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Kelompok 1  (*Software* Komputer) | 4 Tahun | 25 % |
| b. | Kelompok 2  (Lisensi, *Franchise*) | 8 Tahun | 12,50 % |
| c. | Kelompok 3  (Hak Cipta/*Copyright*, Paten dan Hak Lainnya) | 16 Tahun | 6,25 % |
| d. | Kelompok 4  (Hasil Kajian/Pengembangan) | 20 Tahun | 5 % |

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset* – *work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

**Aset Lain-lain**

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses penghapusan atau pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

1. **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

1. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

1. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

1. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

1. **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya dari SP2D atau yang dipersamakan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, Taperum, dan Utang PFK Lainnya.

Utang PFK dicatat di neraca sebesar kewajiban PFK yang telah dipotong oleh BUD tetapi belum disetorkan kepada pihak yang berkepentingan.

Potongan PFK tersebut seharusnya disetorkan kepada pihak lain (Kas Negara c.q.. Ditjen Pajak, PT. Taspen, PT. Asabri, Bapetarum, dan PT. Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipotong/dipungut.

**Utang Bunga**

Utang Bunga merupakan biaya berupa bunga yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada pemegang surat utang yang mencakup antara lain utang bunga kepada pemerintah pusat, utang bunga kepada pemda lainnya, utang bunga kepada BUMN/BUMD, utang bunga kepada Bank/LKBB, utang bunga dalam negeri lainnya, dan utang bunga luar negeri.

Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *Commitment Fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi/jatuh tempo dan belum dibayar oleh pemerintah daerah, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Bagian lancar utang jangka panjang mencakup antara lain utang bank, utang obligasi, utang kepada pemerintah pusat, dan utang kepada pemda lainnya.

Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat dilakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

Termasuk dalam bagian lancar utang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek *(payable on demand)*.

**Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah daerah yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca, seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pendapatan diterima dimuka mencakup antara lain setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan, uang muka lelang penjualan aset daerah, dan pendapatan diterima dimuka lainnya.

**Utang Belanja**

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang/jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Utang belanja diakui pada saat:

1. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
2. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoce* kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah;
3. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang belanja mencakup antara lain utang belanja pegawai, utang belanja barang, utang belanja modal, utang belanja subsidi, utang belanja hibah, dan utang belanja lainnya.

**Utang Jangka Pendek Lainnya**.

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun-akun sebelumnya.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pengakuan sampai dengan tanggal neraca.

Utang jangka pendek lainnya mencakup antara lain utang kelebihan pembayaran PAD, utang kelebihan pembayaran transfer, dan utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang sah.

1. **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggaran.

Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
2. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri, dan Utang Jangka Panjang Lainnya

**Utang Dalam Negeri**

Utang Dalam Negeri mencakup antara lain Utang dari Sektor Perbankan, Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Obligasi, Utang dari Pemerintah Pusat, Utang dari Pemda Lainnya, dan Utang Dalam Negeri Lainnya.

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di kas daerah atau saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

**Utang Luar Negeri**

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, menyatakan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Pasal 7 menyatakan bahwa pinjaman luar negeri dapat digunakan untuk diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah meneruspinjamkan dan/atau menerushibahkan pinjaman luar negeri kepada BUMD.

**Utang Jangka Panjang Lainnya**

Utang Jangka Panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri dan utang luar negeri, misalnya utang kemitraan yang merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Serah kelola (BSK).

Pada kemitraan bentuk BSK, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan pembayaran kepada investor secara sekaligus atau bagi hasil. Utang kemitraan dengan pihak ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan. Utang kemitraan disajikan di neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

1. **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Dalam basis akrual, pemerintah daerah hanya menyajikan satu jenis ekuitas.

Saldo akhir ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo akhir ekuitas berasal dari saldo awal ekuitas ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit LO pada periode bersangkutan dan perubahan lainnya berupa dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/koreksi kesalahan mendasar seperti koreksi nilai persediaan dan selisih revaluasi aset tetap. Pengukuran atas ekuitas tergantung dari pengukuran atas aset dan kewajiban.

1. **Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Mulai Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kota Prabumulih telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut, Pemerintah Kota Prabumulih telah menetapkan Peraturan Walikota Prabumulih No. 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Prabumulih dan Revisinya Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2015 dan Nomor 43 Tahun 2017.

Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan, yaitu Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. **Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode. Agar informasi yang disajikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos laporan keuangan ini akan diawali dengan penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA),Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Sebagai dampak penanganan Covid-19 di Pemerintah Daerah, KSAP menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi dalam kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa atau penambahan pos baru dalam laporan keuangan kecuali tambahan infomasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan, karena pengaruh Pandemi Covid-19 hampir menyebar di seluruh pos laporan keuangan. Untuk itu dampak Pandemi Covid-19 akan dijelaskan pada pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan, yaitu perubahan pos-pos sebagai dampak dari realokasi atau refocusing anggaran, misalnya pendapatan transfer pemerintah pusat, belanja tak terduga, belanja barang, dan belanja modal.

1. **Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

APBD Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang APBD Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang APBD Perubahan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020. Selama tahun 2020 telah terjadi perubahan/pergeseran anggaran pendapatan dan belanja yang harus dilaksanakan namun belum dianggarkan dan dituangkan dalam peraturan kepala daerah, sebagai berikut.

1. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020.
2. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020.
3. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020.
4. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020.
5. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020.
6. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020.
7. Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020.
8. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2020tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah yaitu terdapat reklasifikasi pendapatan Bantuan Keuangan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi Pendapatan Transfer, serta terdapat pengelompokan akun baru yaitu Transfer. Transfer merupakan pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain berupa Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Kemudian belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dikonversi menjadi jenis belanja hibah atau belanja bantuan sosial, baik anggaran maupun realisasinya pada LRA.

1. **Pendapatan LRA**

Penerimaan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.17 Pendapatan Daerah**

| **Pendapatan Daerah** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 101.219.000.000,00 | 85.037.055.386,71 | 84,01 | 100.975.564.957,57 |
| Pendapatan Transfer | 818.829.277.993,00 | 859.882.828.238,68 | 105,01 | 1.092.656.218.392,12 |
| Lain-lain Pendapatan yang Sah | 26.804.800.000,00 | 27.322.490.000,00 | 101,93 | 26.844.297.739,00 |
| **Jumlah** | **946.853.077.993,00** | **972.242.373.625,39** | **102,68** | **1.220.476.081.088,69** |

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 sebesar Rp972.242.373.625,39atau 102,68% dari anggarannya sebesar Rp946.853.077.993,00 mengalami penurunan sebesar Rp248.233.707.463,30dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.220.476.081.088,69yang diuraikan sebagai berikut.

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.18 Pendapatan Asli Daerah**

| **Pendapatan Asli**  **Daerah (PAD)** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi(Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Pajak Daerah | 29.026.000.000,00 | 28.487.061.805,00 | 98,14 | 30.189.400.658,00 |
| Retribusi Daerah | 4.899.000.000,00 | 2.802.140.946,50 | 57,20 | 3.738.661.449,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.000.000.000,00 | 2.073.589.783,33 | 69,12 | 1.759.160.257,30 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 64.294.000.000,00 | 51.674.262.851,88 | 80,16 | 65.288.342.593,27 |
| **Jumlah** | **101.219.000.000,00** | **85.037.055.386,71** | **84,01** | **100.975.564.957,57** |

Realisasi PAD TA 2020 sebesar Rp85.037.055.386,71atau 84,01% dari anggarannya sebesar Rp101.219.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp15.938.509.570,86 dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp100.975.564.957,57.Dalam realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah termasuk realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola langsung oleh RSUD dan penerimaan dana JKN FKTP oleh Puskesmas, tetapi tidak termasuk pengelolaan dana BOS oleh sekolah. Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2020 sebagai berikut.

1. **Pendapatan Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang dipungut dari wajib pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Perda Kota Prabumulih. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh masing-masing OPDpengelola pendapatan. Anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.19 Pendapatan Pajak Daerah**

| **Pendapatan**  **Pajak Daerah** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Pajak Hotel | 400.000.000,00 | 345.107.750,00 | 86,28 | 543.449.851,00 |
| Pajak Restoran | 3.000.000.000,00 | 3.176.978.921,00 | 105,90 | 2.784.752.865,00 |
| Pajak Hiburan | 710.000.000,00 | 322.491.828,00 | 45,42 | 969.889.051,00 |
| Pajak Reklame | 311.000.000,00 | 520.133.983,00 | 167,25 | 651.597.474,00 |
| Pajak Penerangan Jalan | 14.010.000.000,00 | 14.335.869.366,00 | 102,33 | 14.325.134.520,00 |
| Pajak Parkir | 250.000.000,00 | 287.440.000,00 | 114,98 | 273.959.800,00 |
| Pajak Air Bawah Tanah | 15.000.000,00 | 24.153.231,00 | 161,02 | 27.168.376,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 30.000.000,00 | 29.220.000,00 | 97,40 | 33.820.000,00 |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 600.000.000,00 | 1.304.254.373,00 | 217,38 | 1.890.794.621,00 |
| PBB-P2 | 3.700.000.000,00 | 3.081.498.593,00 | 83,28 | 3.362.746.320,00 |
| BPHTB | 6.000.000.000,00 | 5.059.913.760,00 | 84,33 | 5.326.087.780,00 |
| **Jumlah** | **29.026.000.000,00** | **28.487.061.805,00** | **98,14** | **30.189.400.658,00** |

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari sebelas jenis Pendapatan Pajak Daerah, terdapat lima jenis pajak yang tidak mencapai target yang dianggarkan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp28.487.061.805,00 atau 98,14% dari anggarannya sebesar Rp29.026.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.702.338.853,00 dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp30.189.400.658,00sebagai berikut.

1. Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2020 sebesar Rp345.107.750,00 atau 86,28% dari anggarannya sebesar Rp400.000.000,00berasal dari penerimaan pajak Hotel Melati Satu.
2. Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2020 sebesar Rp3.176.978.921,00 atau 105,90% dari anggarannya sebesar Rp3.000.000.000,00.
3. Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2020 sebesar Rp322.491.828,00 atau 45,42% dari anggarannya sebesar Rp710.000.000,00 yang berasal dari penerimaan pajak hiburan bioskop sebesar Rp164.486.365,00;karaoke sebesar Rp30.442.763,00; permainan bilyar sebesar Rp300.000,00dan permainan ketangkasan sebesar Rp127.262.700,00.
4. Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2020 sebesar Rp520.133.983,00 atau 167,25% dari anggarannya sebesar Rp311.000.000,00yang berasal dari penerimaan pajak reklame papan/billboard/videotron sebesar Rp293.197.345,00; reklame kain sebesar Rp50.660.625,00;reklame melekat/stiker sebesar Rp19.735.010,00;reklame berjalan sebesar Rp175.000,00 dan neon box sebesar Rp156.366.003,00.
5. Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2020 sebesar Rp14.335.869.366,00 atau 102,33% dari anggarannya sebesar Rp14.010.000.000,00yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan PLN sebesar Rp14.325.202.766,00 dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN sebesar Rp10.666.600,00.
6. Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2020 sebesar Rp287.440.000,00 atau 114,98% dari anggarannya sebesar Rp250.000.000,00 merupakan Pajak Parkir khusus di Rumah Sakit dan Citimall.
7. Realisasi Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah TA 2020 sebesar Rp24.153.231,00atau 161,02% dari anggarannya sebesar Rp15.000.000,00.
8. Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2020 sebesar Rp29.220.000,00 atau 97,40% dari anggarannya sebesar Rp30.000.000,00.
9. Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2020 sebesar Rp1.304.254.373,00 atau 217,38% dari anggarannya sebesar Rp600.000.000,00yang berasal dari penerimaan pajak berupa pasir sebesar Rp398.037.974,00dan mineral bukan logam lainnya sebesar Rp906.216.399,00.
10. Realisasi Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) TA 2020 sebesar Rp3.081.498.593,00atau 83,28% dari anggarannya sebesar Rp3.700.000.000,00yang berasal dari PBB sektor Perkotaan sebesar Rp3.003.185.189,00 dan PBB sektor Perdesaan sebesar Rp78.313.404,00.

Realisasi penerimaan PBB-P2 TA 2020 sebesar Rp3.081.498.593 berasal dari penerimaan SPPT PBB tahun 2020 sebesar 2.538.507.241,00dan penerimaan piutang PBB tahun sebelumnya sebesar Rp533.702.622,00.Sedangkan penerimaan denda sebesar Rp176.208.576,00 diakui sebagai Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.20 Realisasi Pendapatan PBB-P2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Piutang (Rp)** | **Denda (Rp)** | **Total (Rp)** |
| 1 | s.d. 2002 | 559.374,00 | 184.078,00 | 743.452,00 |
| 2 | 2003 | 517.806,00 | 112.629,00 | 630.435,00 |
| 3 | 2004 | 41.528,00 | 15.007,00 | 56.535,00 |
| 4 | 2005 | 583.940,00 | 125.365,00 | 709.305,00 |
| 5 | 2006 | 145.112,00 | 64.727,00 | 209.839,00 |
| 6 | 2007 | 785.268,00 | 197.917,00 | 983.185,00 |
| 7 | 2008 | 829.452,00 | 219.123,00 | 1.048.575,00 |
| 8 | 2009 | 508.266,00 | 192.472,00 | 700.738,00 |
| 9 | 2010 | 1.819.013,00 | 642.362,00 | 2.461.375,00 |
| 10 | 2011 | 2.400.824,00 | 1.086.066,00 | 3.486.890,00 |
| 11 | 2012 | 4.907.516,00 | 2.154.836,00 | 7.062.352,00 |
| 12 | 2013 | 10.133.704,00 | 4.663.399,00 | 14.797.103,00 |
| 13 | 2014 | 7.161.273,00 | 3.240.033,00 | 10.401.306,00 |
| 14 | 2015 | 21.971.870,00 | 10.349.038,00 | 32.320.908,00 |
| 15 | 2016 | 38.580.138,00 | 18.509.585,00 | 57.089.723,00 |
| 16 | 2017 | 73.295.600,00 | 35.087.384,00 | 108.382.984,00 |
| 17 | 2018 | 95.237.453,00 | 41.852.931,00 | 137.090.384,00 |
| 18 | 2019 | 274.424.485,00 | 43.480.494,00 | 317.904.979,00 |
| 19 | SPPT 2020 | 2.547.595.971,00 | 14.031.130,00 | 2.561.627.101,00 |
|  | **Jumlah** | **3.081.498.593,00** | **176.208.576,00** | **3.257.707.169,00** |

1. RealisasiPendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2020 sebesar Rp5.059.913.760,00 atau 84,33% dari anggarannya sebesar Rp6.000.000.000,00.
2. **Pendapatan Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang dipungut dari wajib retribusi sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Perda Kota Prabumulih. Retribusi daerah terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing OPD terkait sebagai unit pengelola pendapatan. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.21 Pendapatan Retribusi Daerah**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pendapatan Retribusi Daerah** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Jasa Umum | 1.872.000.000,00 | 1.611.203.921,00 | 86,07 | 1.805.135.100,00 |
| Jasa Usaha | 525.000.000,00 | 582.750.000,00 | 111,00 | 274.660.000,00 |
| Perizinan Tertentu | 2.502.000.000,00 | 608.187.025,50 | 24,31 | 1.658.866.349,00 |
| **Jumlah** | **4.899.000.000,00** | **2.802.140.946,50** | **57,20** | **3.738.661.449,00** |

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp2.802.140.946,50atau57,20% dari anggarannya sebesar Rp4.899.000.000,00dan mengalami penurunan sebesar Rp937.285.502,50 dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp3.738.661.449,00sebagai berikut.

1. **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang terkait langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.22 Retribusi Jasa Umum**

| **Retribusi**  **Jasa Umum** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Pelayanan Kesehatan | 200.000.000,00 | 158.456.431,00 | 79,23 | 277.326.180,00 |
| Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 150.000.000,00 | 160.244.000,00 | 106,83 | 156.596.000,00 |
| Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 750.000.000,00 | 552.449.000,00 | 73,66 | 560.684.000,00 |
| Pelayanan Pasar | 190.000.000,00 | 197.165.000,00 | 103,77 | 203.685.000,00 |
| Pengujian Kendaraan Bermotor | 302.000.000,00 | 267.353.400,00 | 88,53 | 285.562.400,00 |
| Alat Penanggulangan Kebakaran | 0,00 | 12.721.090,00 | - | 14.314.020,00 |
| Jasa Pelayanan Laboratorium | 50.000.000,00 | 65.015.000,00 | 130,03 | 60.867.500,00 |
| Pengendalian Menara Telekomunikasi | 230.000.000,00 | 197.800.000,00 | 86,00 | 246.100.000,00 |
| **Jumlah** | **1.872.000.000,00** | **1.611.203.921,00** | **86,07** | **1.805.135.100,00** |

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari delapan jenis Retribusi Jasa Umum, terdapat3 (tiga)jenis retribusi melebihi target yang dianggarkan.

1. **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang terkait dengan pemakaian aset daerah dan/atau penjualan produksi usaha daerah, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.23 Retribusi Jasa Usaha**

| **Retribusi**  **Jasa Usaha** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi(Rp)** |
| Pemakaian Kekayaan Daerah | 500.000.000,00 | 551.900.000,00 | 110,38 | 248.100.000,00 |
| Retribusi Rumah Potong Hewan | 10.000.000,00 | 15.550.000,00 | 155,50 | 16.360.000,00 |
| Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 15.000.000,00 | 15.300.000,00 | 102,00 | 10.200.000,00 |
| **Jumlah** | **525.000.000,00** | **582.750.000,00** | **111,00** | **274.660.000,00** |

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari tiga jenis Retribusi Jasa Usaha, seluruhnya telah melebihi target yang dianggarkan.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2020 sebesar Rp582.750.000,00 atau 111,00% dari anggarannya sebesar Rp525.000.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp308.090.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp274.660.000,00.

1. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan PAD yang terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisator untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.24 Retribusi Perizinan Tertentu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retribusi**  **Perizinan Tertentu** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 2.500.000.000,00 | 605.387.025,50 | 24,22 | 1.654.716.349,00 |
| Izin Trayek | 2.000.000,00 | 2.800.000,00 | 140,00 | 4.150.000,00 |
| **Jumlah** | **2.502.000.000,00** | **608.187.025,50** | **24,31** | **1.658.866.349,00** |

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2020 sebesar Rp608.187.025,50 atau 24,31% dari anggarannya sebesar Rp2.502.000.000,00dan mengalami penurunan sebesar Rp1.050.679.323,50dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.658.866.349,00.

1. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba perusahaan daerah yang merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih.

Anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.25 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bagian Laba**  **Perusahaan Daerah** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Dividen Bank Sumsel Babel | 3.000.000.000,00 | 2.073.589.783,33 | 69,12 | 1.759.160.257,30 |
| **Jumlah** | **3.000.000.000,00** | **2.073.589.783,33** | **69,12** | **1.759.160.257,30** |

Realisasi Bagian Laba Perusahaan Daerah TA 2020 sebesar Rp2.073.589.783,33 atau 69,12% dari anggarannya sebesar Rp3.000.000.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp314.429.526,03 dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.759.160.257,30. Realisasi penerimaan tersebut seluruhnya merupakan penerimaan dividen Tahun Buku 2019 yang baru diterima pada Tahun 2020 setelah Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel Tahun 2019 selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan telah disetujui serta disahkan dalam RUPS Perseroan pada tanggal 9 Maret 2020.

1. **Lain-lain PAD yang Sah**

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Peraturan Daerah. Anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 dan realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.26 Lain-lain PAD yang Sah**

| **Lain-lain PAD Yang Sah** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Penerimaan Jasa Giro | 700.000.000,00 | 965.322.376,00 | 137,90 | 864.294.447,00 |
| Bunga Deposito Bank | 9.000.000.000,00 | 8.162.532.183,30 | 90,69 | 14.469.951.546,62 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 500.000.000,00 | 1.395.648.285,60 | 279,13 | 3.592.148.190,40 |
| Penerimaan BLUD | 46.000.000.000,00 | 32.153.624.450,00 | 69,90 | 40.443.410.027,80 |
| Penerimaan Lain-lain | 2.000.000.000,00 | 2.431.808.227,98 | 121,59 | 616.723.494,45 |
| Dana JKN FKTP | 6.034.000.000,00 | 6.381.618.753,00 | 105,76 | 5.131.672.104,00 |
| Denda PBB P2 | 50.000.000,00 | 176.208.576,00 | 352,42 | 163.142.783,00 |
| Penjualan Hasil Perikanan | 10.000.000,00 | 7.500.000,00 | 75,00 | 7.000.000,00 |
| **Jumlah** | **64.294.000.000,00** | **51.674.262.851,88** | **80,37** | **65.288.342.593,27** |

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 sebesar Rp51.674.262.851,88atau 80,37% dari anggarannya sebesar Rp64.294.000.000,00dan mengalami penurunan sebesar Rp13.614.079.741,39dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp65.288.342.593,27.

1. **Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi, dan Bantuan Keuangan. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 dan realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.27 Pendapatan Transfer**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pendapatan Transfer** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Transfer Pemerintah Pusat -  Dana Perimbangan | 675.718.618.000,00 | 715.482.270.169,00 | 105,88 | 861.847.458.222,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya | 48.548.591.000,00 | 48.548.591.000,00 | 100,00 | 41.591.875.000,00 |
| Transfer Pemerintah Provinsi | 57.567.052.993,00 | 62.789.397.217,68 | 109,07 | 122.374.609.670,12 |
| Bantuan Keuangan | 36.995.016.000,00 | 33.062.569.852,00 | 89,37 | 66.842.275.500,00 |
| **Jumlah** | **818.829.277.993,00** | **859.882.828.238,68** | **105,01** | **1.092.656.218.392,12** |

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 sebesar Rp859.882.828.238,68 atau 105,01% dari anggarannya sebesar Rp818.829.277.993,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp232.773.390.153,44 dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.092.656.218.392,12dengan rincian sebagai berikut.

1. **Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan anggaranTA 2020 sebesar Rp675.718.618.000,00.

Alokasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Kota Prabumulih TA 2020ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019, direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 dan terakhir direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.Revisi alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat merupakan dampak dari realokasi dana APBN untuk penanganan Pandemi Covid-19, sehingga Pemerintah Kota Prabumulih mengalami pemotongan alokasi sebesar Rp104.470.443.000,00.

Anggaran dan realisasi transfer pemerintah pusat – dana perimbangan TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.28 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Transfer**  **Pemerintah Pusat Dana Perimbangan** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Bagi Hasil Pajak | 76.220.812.000,00 | 73.597.425.102,00 | 96,56 | 116.429.339.643,00 |
| Bagi Hasil Bukan Pajak/(SDA) | 78.682.307.000,00 | 123.484.470.497,00 | 156,94 | 191.564.405.242,00 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 401.337.761.000,00 | 399.247.165.000,00 | 99,48 | 440.240.422.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 119.477.738.000,00 | 119.153.209.570,00 | 99,73 | 113.613.291.337,00 |
| **Jumlah** | **675.718.618.000,00** | **715.482.270.169,00** | **105,88** | **861.847.458.222,00** |

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2020 sebesar Rp715.482.270.169,00 atau 105,88% dari anggarannya sebesar Rp675.718.618.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp146.365.188.053,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp861.847.458.222,00dengan rincian sebagai berikut.

1. **Bagi Hasil Pajak**

Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat meliputi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan (PBB-P3), Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dan termasuk PPh Pasal 21, serta Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Anggaran dan realisasi bagi hasil pajak dari pemerintah pusat TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.29 Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| PBB-P3 | 60.662.028.000,00 | 56.532.402.729,00 | 93,19 | 104.803.014.804,00 |
| PPh Orang Pribadi | 15.524.208.000,00 | 17.065.022.373,00 | 109,93 | 11.626.324.839,00 |
| Cukai Hasil Tembakau | 34.576.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **Jumlah** | **76.220.812.000,00** | **73.597.425.102,00** | **96,56** | **116.429.339.643,00** |

Realisasi bagi hasil pajak dari pemerintah pusat TA 2020 sebesar Rp73.597.425.102,00 atau 96,56% dari anggarannya sebesar Rp76.220.812.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp42.831.914.541,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp116.429.339.643,00.

1. **Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) meliputi Bagi Hasil Sumber Daya Hutan, Iuran Tetap (*Land Rent*), Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti), Pungutan Hasil Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi.

Anggaran dan realisasi bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam TA 2020serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel7.30 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

| **Bagi Hasil Bukan Pajak Pemerintah Pusat** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi(Rp)** |
| Bagi Hasil Kehutanan | 827.026.000,00 | 848.556.666,00 | 102,60 | 944.425.500,00 |
| Iuran Tetap  (Land Rent) | 475.591.000,00 | 374.440.700,00 | 78,73 | 49.247.818,00 |
| Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty) | 26.948.826.000,00 | 31.975.991.067,00 | 118,65 | 54.525.898.065,00 |
| Pungutan Hasil Perikanan | 1.418.361.000,00 | 788.276.289,00 | 55,58 | 689.340.471,00 |
| Pertambangan  Minyak Bumi | 12.431.859.000,00 | 11.548.666.400,00 | 92,90 | 27.037.421.916,00 |
| Pertambangan  Gas Bumi | 36.344.230.000,00 | 77.762.624.275,00 | 213,96 | 108.297.551.787,00 |
| Pertambangan  Panas Bumi | 236.414.000,00 | 185.915.100,00 | 78,64 | 20.519.685,00 |
| **Jumlah** | **78.682.307.000,00** | **123.484.470.497,00** | **156,94** | **191.564.405.242,00** |

Realisasi bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam TA 2020 sebesar Rp123.484.470.497,00 atau 156,94% dari anggarannya sebesar Rp78.682.307.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp68.079.934.745,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp191.564.405.242,00.

1. **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat meliputi DAU Formula, DAU Tambahan – Dana Kelurahan dan DAU Tambahan – Gaji PPPK dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.31 Dana Alokasi Umum**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAU** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| DAU Formula | 390.497.165.000,00 | 390.497.165.000,00 | 100,00 | 431.416.897.000,00 |
| DAU Tambahan – Dana Kelurahan | 8.750.000.000,00 | 8.750.000.000,00 | 100,00 | 8.823.525.000,00 |
| DAU Tambahan – Gaji PPPK | 2.090.596.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **401.337.761.000,00** | **399.247.165.000,00** | **99,48** | **440.240.422.000,00** |

Realisasi penerimaan DAU dari Pemerintah Pusat untuk TA 2020 sebesar Rp399.247.165.000,00 atau 99,48% dari anggarannya sebesar Rp401.337.761.000,00dan mengalami penurunan sebesar Rp40.993.257.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp440.240.422.000,00.

1. **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat meliputi DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Non Fisik dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.32 Dana Alokasi Khusus**

| **No.** | **Uraian** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| **1** | **DAK Fisik** | **62.405.786.000,00** | **61.544.653.741,00** | **98,62** | **61.793.538.798,00** |
|  | - DAK Reguler | 55.480.507.000,00 | 54.636.662.197,00 | 98,48 | 59.458.847.568,00 |
|  | - DAK Penugasan | 6.925.279.000,00 | 6.907.991.544,00 | 99,75 | 2.334.691.230,00 |
| **2** | **DAK Non Fisik** | **57.071.952.000,00** | **57.608.555.829,00** | **100,94** | **51.819.752.539,00** |
|  | **Jumlah (1+2)** | **119.477.738.000,00** | **119.153.209.570,00** | **99,73** | **113.613.291.337,00** |

Realisasi penerimaan DAK dari Pemerintah Pusat untuk TA 2020 sebesar Rp119.153.209.570,00 atau 99,73% dari anggarannya sebesar Rp119.477.738.000,00 dan mengalami peningkatansebesar Rp5.539.918.233,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp113.613.291.337,00.

Adapun realisasi penyerapan DAK sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp111.279.791.503,00 atau 93,39% dari dana yang diterima tahun 2020sebesar Rp119.153.209.570,00.Kelebihan penyerapan DAK tahun 2020 berasal dari saldo DAK tahun lalu yang masih tersedia di RKUD.

**Tabel 7.33 Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus**

| **No.** | **Bidang** | **DAK Diterima**  **RKUD (Rp)** | **Penyaluran DAK**  **Melalui SP2D (Rp)** | **Sisa DAK**  **Di RKUD (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DAK Fisik Reguler** |  |  |  |
| 1 | Pendidikan | 19.090.625.790,00 | 19.090.624.890,00 | 900,00 |
| 2 | Kesehatan dan KB | 17.964.508.915,00 | 17.887.739.333,00 | 76.769.582,00 |
| 3 | Jalan (Pendukung Konektivitas) | 13.392.264.500,00 | 13.387.684.000,00 | 4.580.500,00 |
| 4 | Sosial | 98.626.000,00 | 98.626.000,00 | 0,00 |
| 5 | Sanitasi | 2.797.333.992,00 | 2.797.333.992,00 | 0,00 |
| 6 | Perumahan dan Permukiman | 1.293.303.000,00 | 1.290.303.000,00 | 3.000.000,00 |
|  | **Sub Jumlah** | **54.636.662.197,00** | **54.552.311.215,00** | **84.350.982,00** |
|  | **DAK Fisik Penugasan** |  |  |  |
| 7 | Kesehatan dan KB | 1.689.351.944,00 | 1.602.929.419,00 | 86.422.525,00 |
| 8 | Sanitasi | 3.659.626.000,00 | 3.640.274.800,00 | 19.351.200,00 |
| 9 | Kelautan dan Perikanan | 1.069.363.600,00 | 576.707.300,00 | 492.656.300,00 |
| 10 | Lingkungan Hidup | 489.650.000,00 | 489.650.000,00 | 0,00 |
|  | **Sub Jumlah** | **6.907.991.544,00** | **6.309.561.519,00** | **598.430.025,00** |
|  | **Jumlah DAK Fisik** | **61.544.653.741,00** | **60.861.872.734,00** | **682.781.007,00** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Bantuan Operasional PAUD | 1.811.400.000,00 | 1.956.000.000,00 | (144.600.000,00) |
| 2 | Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan | 985.900.000,00 | 985.900.000,00 | 0,00 |
| 3 | Tunjangan Profesi Guru (TPG) | 39.463.264.000,00 | 37.819.724.300,00 | 1.643.539.700,00 |
|  | Sisa dana Tahun Lalu |  |  | 355.917.675,00 |
| 4 | Tambahan Penghasilan Guru (DTP) | 203.000.000,00 | 430.500.000,00 | (227.500.000,00) |
|  | Sisa dana Tahun Lalu |  |  | 208.000.000,00 |
| 5 | BOK dan Bantuan Operasional KB | 9.065.586.737,00 | 7.742.802.332,00 | 1.322.784.405,00 |
|  | Sisa dana Tahun Lalu |  |  | (987.873.740,00) |
| 6 | BOK Tambahan | 4.914.000.000,00 | 305.227.273,00 | 4.608.772.727,00 |
| 7 | Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM | 417.358.000,00 | 410.583.000,00 | 6.775.000,00 |
|  | Sisa dana Tahun Lalu |  |  | 35.792.892,00 |
| 8 | Pelayanan Administrasi Kependudukan | 748.047.092,00 | 767.181.864,00 | (19.134.772,00) |
|  | **Jumlah DAK Non Fisik** | **57.608.555.829,00** | **50.417.918.769,00** | **6.802.473.887,00** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah DAK** | **119.153.209.570,00** | **111.279.791.503,00** | **7.485.254.894,00** |

1. **Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian meliputi Dana Insentif Daerah dan Dana Desa, dengan alokasi untuk Kota Prabumulih TA 2019 sebesar Rp48.548.591.000,00yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

Anggaran dan realisasi transfer pemerintah pusat lainnya TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.:

**Tabel 7.34 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dana Penyesuaian** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Dana Insentif Daerah | 26.680.256.000,00 | 26.680.256.000,00 | 100,00 | 20.377.462.000,00 |
| Dana Desa | 21.868.335.000,00 | 21.868.335.000,00 | 100,00 | 21.214.413.000,00 |
| **Jumlah** | **48.548.591.000,00** | **48.548.591.000,00** | **100,00** | **41.591.875.000,00** |

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk TA 2020 sebesar Rp48.548.591.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.956.716.000,00 dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp41.591.875.000,00 yaitu peningkatan Dana Insentif Daerah sebesar Rp6.302.794.000,00 dan peningkatan Dana Desa sebesar Rp653.922.000,00.

1. **Transfer Pemerintah Provinsi**

Alokasi Transfer Pemerintah Provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 122/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 14 Februari 2020 serta direvisi dengan SK Nomor 730/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Alokasi DBH Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan TA 2020.

Anggaran dan realisasi transfer pemerintah provinsi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.35 Transfer Pemerintah Provinsi**

| **Transfer Pemerintah Provinsi** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 9.256.776.776,00 | 12.982.876.217,00 | 140,25 | 12.013.522.136,00 |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) | 9.428.178.039,00 | 8.686.375.463,00 | 92,13 | 12.426.040.540,00 |
| Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) | 18.881.259.838,00 | 21.313.486.068,68 | 112,88 | 22.479.247.221,00 |
| Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) | 95.827.068,00 | 142.249.715,00 | 148,44 | 137.108.955,00 |
| Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA) | 1.235.294,00 | 1.140.862,00 | 92,36 | 1.544.908,00 |
| Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air  (BBN-KAA) | 370.589,00 | 11.726,00 | 3,16 | 187.243,00 |
| Pajak Rokok | 12.720.977.638,00 | 14.906.575.771,00 | 117,18 | 9.963.120.030,00 |
| DBH Pajak Provinsi  (Piutang DBH Tahun Lalu) | 7.182.427.751,00 | 4.756.681.395,00 | 66,23 | 65.353.838.637,12 |
| **Jumlah** | **57.567.052.993,00** | **62.789.397.217,68** | **109,07** | **122.374.609.670,12** |

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2020 sebesar Rp62.789.397.217,68merupakan penerimaan Piutang DBH Pajak Daerah bulan Desember 2019 sebesar Rp4.756.681.395,00; DBH Pajak Daerah bulan Januari s.d. November 2020 sebesar Rp43.126.140.051,68 serta DBH Pajak Rokok s.d. Triwulan IV(November) 2020 sebesar Rp14.906.575.771,00. Sedangkan atas alokasi DBH Pajak Daerah bulan Desember 2020dan alokasi DBH Pajak Rokok bulan Desember 2020 belum ada penetapan SK Gubernur dan belum diterima pembayarannya.

1. **Bantuan Keuangan**

Alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi terdiri bantuan keuangan bersifat khusus (SK Gubernur No. 396/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan SK Gubernur No. 654/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 13 November 2020), dan bantuan keuangan dalam rangka integrasi BPJS (SK Gubernur No. 214/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 30 Maret 2020).

Anggaran dan realisasi bantuan keuangan dari provinsi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.36 Bantuan Keuangan**

| **Bantuan**  **Keuangan Provinsi** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Bantuan Keuangan Bersifat Khusus | 30.000.000.000,00 | 29.477.560.000,00 | 98,26 | 65.246.859.500,00 |
| Bantuan Dana Kelurahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.000.000,00 |
| Bantuan Integrasi BPJS | 6.995.016.000,00 | 3.585.009.852,00 | 51,25 | 970.416.000,00 |
| **Jumlah** | **36.995.016.000,00** | **33.062.569.852,00** | **89,37** | **66.842.275.500,00** |

Realisasi penerimaan bantuan keuangan bersifat khusus sebesar Rp29.477.560.000,00 terdiri dari 4 kontrak kegiatan dengan realisasi pembayaran SP2D sebesar Rp29.477.560.000,00 sebagai berikut.

**Tabel 7.37 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus**

| **No.** | **Uraian** | **Alokasi**  **(Rp)** | **Realisasi SP2D**  **(Rp)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SK Gubernur No. 396/KPTS/BPKAD/2020** |  |  |  |
| 1 | Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Timur (Jalan Taman Murni, Pakjo, Sukajadi/ Talang Sako, Nigata, Nur Ilahi, dan Kerinci Prabujaya | 11.100.000.000,00 | 10.873.500.000,00 | 97,96 |
| 2 | Jalan Wilayah Kecamatan Rambang Kapak Tengah (Jalan Tanjung Miring-Rambang Senuling) | 9.900.000.000,00 | 9.786.721.000,00 | 98,86 |
|  | **Sub Jumlah** | **21.000.000.000,00** | **20.660.221.000,0** | **98,38** |
|  | **SK Gubernur No. 654/KPTS/BPKAD/2020** |  |  |  |
| 3 | Peningkatan jalan akses menuju jalan Jendral Sudirman (Kecamatan Prabumulih Timur) dan Jalan Pandean | 6.000.000.000,00 | 5.913.144.000,00 | 98,55 |
| 4 | Peningkatan Wilayah Kecamatan Rambang Kapak Tengah (Jalan Rambang Senuling) | 3.000.000.000,00 | 2.904.195.000,00 | 96,81 |
|  | **Sub Jumlah** | **9.000.000.000,00** | **8.817.339.000,00** | **97.97** |
|  | **Jumlah** | **30.000.000.000,00** | **29.477.560.000,00** | **98,26** |

1. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2020 berupa Pendapatan Hibah dari PT Bukit Asam dalam rangka penanganan Covid-19 dan Pendapatan Hibah dari APBN untuk Dana BOS yang langsung diterima dan dikelola oleh sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Prabumulih. Kebijakan pengakuan pendapatan hibah Dana BOS tersebut berdasarkan SE Mendagri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tanggal 28September 2018 dan Permendagri Nomor 24 Tahun 2020,serta dituangkan dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perwako Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana BOS Pemerintah Kota Prabumulih.

**Tabel 7.38 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **Tahun 2019** | | | **Tahun 2018** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Pendapatan Hibah Dana BOS | 26.654.800.000,00 | 27.172.490.000,00 | 100,14 | 26.844.297.739,00 |
| Pendapatan Hibah PT Bukit Asam | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **26.804.800.000,00** | **27.322.490.000,00** | **101,93** | **26.844.297.739,00** |

1. **Belanja**

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.39Belanja Daerah**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Daerah** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Belanja Operasi | 816.732.781.105,00 | 756.561.301.247,00 | 92,63 | 834.627.994.184,44 |
| Belanja Modal | 228.968.408.359,00 | 220.756.462.110,66 | 96,41 | 311.715.302.708,00 |
| Belanja Tak Terduga | 48.063.439.000,00 | 46.713.255.000,00 | 97,19 | 212.037.000,00 |
| **Jumlah** | **1.093.764.628.464,00** | **1.024.031.018.357,66** | **93,62** | **1.146.555.333.892,44** |

Jumlah realisasi Belanja Daerah TA 2020 sebesar Rp1.024.031.018.357,66 atau 93,63% dari anggarannya sebesar Rp Rp1.093.764.628.464,00dan mengalami penurunan sebesar Rp122.502.130.454,78dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.146.555.333.892,44dengan rincian sebagai berikut.

1. **Belanja Operasi**

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, danBelanja Bantuan Sosial, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel7.40 Belanja Operasi**

| **Belanja**  **Operasi** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Belanja Pegawai | 403.554.074.205,00 | 386.054.471.569,0 | 95,66 | 391.334.909.403,00 |
| Belanja Barang | 379.386.171.900,00 | 341.043.554.087,00 | 89,89 | 395.461.753.356,44 |
| Belanja Hibah | 33.591.535.000,00 | 29.298.275.591,00 | 87,22 | 46.692.331.425,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 201.000.000,00 | 165.000.000,00 | 82,09 | 1.139.000.000,00 |
| **Jumlah** | **816.732.781.105,00** | **756.561.301.247,00** | **92,63** | **834.627.994.184,44** |

Realisasi Belanja Operasi TA 2020 sebesar 756.561.301.247,00 atau 92,63% dari anggarannya sebesar Rp816.732.781.105,00dan mengalami penurunan sebesar Rp78.066.692.937,44 dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp834.627.994.184,44dengan rincian sebagai berikut.

1. **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan DPRD, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH dan DPRD, Biaya Pemungutan Pajak Daerah serta uang lembur dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.41 Belanja Pegawai**

| **Belanja Pegawai** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi(Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Gaji & Tunjangan PNS Daerah dan DPRD | 299.673.508.021,00 | 281.904.124.173,00 | 94,07 | 247.450.488.301,00 |
| Tambahan Penghasilan PNS | 99.261.944.684,00 | 100.127.718.312,00 | 100,87 | 139.428.816.574,00 |
| Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH dan DPRD | 3.550.000.000,00 | 3.549.600.000,00 | 99,99 | 3.549.600.000,00 |
| Biaya Pemungutan Pajak | 600.000.000,00 | 48.847.084,00 | 8,14 | 491.691.528,00 |
| Uang Lembur | 468.621.500,00 | 424.182.000,00 | 90,52 | 414.313.000,00 |
| **Jumlah** | **403.554.074.205,00** | **386.054.471.569,00** | **95,66** | **391.334.909.403,00** |

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp386.054.471.569,00 atau 95,66% dari anggarannya sebesar Rp403.554.074.205,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.280.437.834,00 dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp391.334.909.403,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. **Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan DPRD**

Anggaran dan realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS Daerah dan DPRD Kota Prabumulih TA 2020 serta realisasi TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.42 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah**

| **Gaji dan Tunjangan**  **PNS Daerah** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Gaji Pokok/Uang Representasi | 183.962.318.395,00 | 177.133.104.273,00 | 96,29 | 180.811.137.464,00 |
| Tunjangan Keluarga | 18.204.847.998,00 | 17.491.676.331,00 | 96,08 | 17.814.289.889,00 |
| Tunjangan Jabatan \*) | 9.460.403.883,00 | 8.781.236.540,00 | 92,82 | 8.637.792.850,00 |
| Tunjangan Fungsional | 10.414.316.538,00 | 10.337.741.000,00 | 99,26 | 10.572.937.000,00 |
| Tunjangan Fungsional Umum | 2.977.234.661,00 | 2.354.224.000,00 | 79,07 | 2.405.472.580,00 |
| Tunjangan Beras \*) | 11.314.176.325,00 | 9.379.114.200,00 | 82,90 | 9.573.625.903,00 |
| Tunjangan PPh / Khusus | 888.561.975,00 | 722.516.420,00 | 81,31 | 1.127.420.975,00 |
| Pembulatan Gaji | 3.616.703,00 | 2.503.150,00 | 69,21 | 2.656.584,00 |
| Iuran Asuransi Kesehatan | 7.624.218.691,00 | 6.942.061.247,00 | 91,05 | 6.605.379.309,00 |
| Uang Paket \*\*) | 48.132.000,00 | 48.132.000,00 | 100,00 | 48.058.500,00 |
| Tunjangan Panitia Musyawarah \*\*) | 18.818.100,00 | 18.818.100,00 | 100,00 | 18.072.075,00 |
| Tunjangan Komisi \*\*) | 32.337.900,00 | 32.337.900,00 | 100,00 | 29.643.075,00 |
| Tunjangan Panitia Anggaran \*\*) | 21.010.500,00 | 21.010.500,00 | 100,00 | 18.437.475,00 |
| Tunjangan Badan Kehormatan \*\*) | 7.125.300,00 | 7.125.300,00 | 100,00 | 6.531.525,00 |
| Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya | 11.510.100,00 | 11.510.100,00 | 100,00 | 10.550.925,00 |
| Tunjangan Perumahan | 5.466.600.000,00 | 5.071.695.000,00 | 92,78 | 4.961.550.000,00 |
| Uang Jasa Pengabdian | 40.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.660.000,00 |
| Penunjang Operasional Pimpinan DPRD \*\*) | 201.600.000,00 | 201.600.000,00 | 100,00 | 184.800.000,00 |
| Tunjangan Kesehatan DPRD | 42.405.952,00 | 38.406.312,00 | 90,57 | 30.797.172,00 |
| Tunjangan Profesi Gur | 43.241.663.000,00 | 37.819.724.300,00 | 87,46 | 0,00 |
| Tunjangan Profesi Gur | 486.000.000,00 | 428.362.500,00 | 88,14 | 0,00 |
| Tunjangan Transportasi\*\*) | 4.681.500.000,00 | 4.536.225.000,00 | 96,90 | 4.088.175.000,00 |
| Tunjangan Reses\*) | 525.000.000,00 | 525.000.000,00 | 100,00 | 262.500.000,00 |
| **Jumlah** | **299.673.508.021,00** | **281.904.124.173,00** | **94,07** | **247.450.488.301,00** |

\*) PNS Daerah dan DPRD; \*\*) DPRD Kota Prabumulih

1. **Tambahan Penghasilan Pegawai**

Pemerintah Kota Prabumulih membayarkan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.43 Tambahan Penghasilan Pegawai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tambahan Penghasilan Pegawai** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Beban Kerja | 99.600.000,00 | 98.400.000,00 | 98,80 | 59.670.985.375,00 |
| Tempat Bertugas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.785.000,00 |
| Prestasi Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000.000,00 |
| Pertimbangan Objektif Lain | 99.162.344.684,00 | 100.029.318.312,00 | 100,87 | 79.227.046.199,00 |
| **Jumlah** | 99.261.944.684,00 | **100.127.718.312,00** | **100,87** | **139.428.816.574,00** |

1. **Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH dan DPRD**

Pemerintah Kota Prabumulih membayar Belanja Penunjang Operasional kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) danTunjangan Komunikasi Intensif kepada DPRD sesuai ketentuan yang berlaku, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.44 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH dan DPRD**

| **Penunjang Operasional KDH/WKDH dan DPRD** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Komunikasi Intensif Pimpinan Anggota DPRD | 3.150.000.000,00 | 3.150.000.000,00 | 100,00 | 3.150.000.000,00 |
| Operasional KDH/WKDH | 400.000.000,00 | 399.600.000,00 | 99,90 | 399.600.000,00 |
| **Jumlah** | **3.550.000.000,00** | **3.549.600.000,00** | **99,99** | **3.549.600.000,00** |

1. **Biaya Pemungutan Pajak Daerah**

Biaya Pemungutan Pajak Daerah dibayarkan kepada pegawai yang terkait langsung dengan kegiatan Pemungutan Pajak Daerah sesuai ketentuan yang berlaku, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.45 Biaya Pemungutan Pajak Daerah**

| **Biaya Pemungutan Pajak Daerah** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Biaya Pemungutan Pajak Daerah | 600.000.000,00 | 48.847.084,00 | 8,14 | 491.691.528,00 |
| **Jumlah** | **600.000.000,00** | **48.847.084,00** | **8,14** | **491.691.528,00** |

1. **Uang Lembur**

Uang Lembur merupakan uang lembur yang diberikan kepada pegawai PNS, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.46 Uang Lembur**

| **Uang Lembur** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Uang Lembur PNS | 468.621.500,00 | 424.182.000,00 | 90,52 | 414.313.000,00 |
| **Jumlah** | **468.621.500,00** | **424.182.000,00** | **90,52** | **414.313.000,00** |

1. **Belanja Barang**

Belanja Barang meliputi Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Cetak dan Penggandaan, Sewa-Sewa, Makanan dan Minuman, Pakaian Dinas, Perjalanan Dinas, Belanja BLUD, Service, Dekorasi, Belanja Jasa Iklan dan Peliputan.

Pada TA2020, Belanja Barang dianggarkan sebesarRp379.386.171.900,00dan terealisasi sebesar Rp340.882.569.909,00atau 89,85%.. Anggaran dan realisasi belanja tersebut tidak termasuk anggaran belanja barang yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp21.279.049.000,00 dan realisasinya sebesar Rp20.691.797.327,00atau 97,24% yang telah dikonversi menjadi Belanja Hibah. Perlakuan akuntansi tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.Rincian Belanja Barang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 7.47 Belanja Barang**

| **Belanja**  **Barang** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Bahan Pakai Habis | 16.874.054.394,00 | 16.051.296.693,00 | 95,12 | 43.445.634.947,00 |
| Bahan/Material | 7.497.686.232,00 | 6.898.982.096,00 | 92,01 | 5.950.547.209,00 |
| Jasa Kantor | 93.280.039.116,00 | 88.366.132.768,00 | 94,73 | 104.498.094.944,00 |
| Premi Asuransi | 16.888.284.400,00 | 13.377.510.373,00 | 79,21 | 4.937.950.739,00 |
| Perawatan Kendaraan Bermotor | 5.847.005.000,00 | 5.485.470.401,00 | 93,82 | 6.008.960.672,00 |
| Cetak dan Penggandaan | 8.520.869.660,00 | 7.981.441.270,00 | 93,67 | 9.634.659.588,00 |
| Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir | 213.269.350,00 | 144.652.350,00 | 67,83 | 715.759.800,00 |
| Sewa Sarana Mobilitas | 333.815.000,00 | 263.140.000,00 | 78,83 | 650.450.000,00 |
| Sewa Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.118.777.500,00 | 1.837.440.000,00 | 86,72 | 3.615.925.000,00 |
| Makanan dan Minuman | 22.802.878.000,00 | 21.475.653.100,00 | 94,18 | 26.564.795.920,00 |
| Pakaian Dinas dan Atributnya | 528.500.000,00 | 518.925.000,00 | 98,19 | 1.026.935.000,00 |
| Pakaian Kerja | 677.695.000,00 | 612.705.000,00 | 90,41 | 856.330.000,00 |
| Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu | 1.255.477.000,00 | 1.152.583.000,00 | 91,80 | 2.767.131.076,00 |
| Perjalanan Dinas | 95.311.070.456,00 | 90.078.000.295,00 | 94,51 | 103.897.803.746,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 5.121.555.390,00 | 4.742.705.681,00 | 92,60 | 1.981.492.490,00 |
| Jasa Konsultansi | 5.041.687.127,00 | 4.450.779.000,00 | 88,28 | 1.298.126.000,00 |
| Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 610.055.600,00 | 563.733.500,00 | 92,41 | 1.260.330.000,00 |
| Belanja Honorarium Non PNS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Honorarium PNS | 20.564.340.915,00 | 17.733.963.294,00 | 86,24 | 20.598.980.323,00 |
| Belanja dana Bos | 18.469.418.441,00 | 17.180.642.113,00 | 93,02 | 0,00 |
| Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN | 4.633.757.491,00 | 3.873.271.665,00 | 83,59 | 2.977.457.517,44 |
| Honorarium Pengelola Barang Daerah | 696.900.000,00 | 651.200.000,00 | 93,44 | 688.000.000,00 |
| Honorarium Pengelola Keuangan Daerah | 1.560.840.000,00 | 1.479.822.200,00 | 94,81 | 1.478.535.000,00 |
| Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | 46.060.684.828,00 | 32.675.447.688,00 | 70,94 | 43.267.896.583,00 |
| Belanja Servis | 2.215.818.000,00 | 2.100.925.100,00 | 94,81 | 3.831.476.104,00 |
| Belanja Dekorasi | 257.996.000,00 | 136.100.000,00 | 52,75 | 358.191.960,00 |
| Jasa Iklan dan Peliputan | 620.247.000,00 | 558.945.000,00 | 90,12 | 607.595.000,00 |
| Belanja Berobat Gratis | 380.000.000,00 | 127.636.500,00 | 33,59 | 802.443.738,00 |
| Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 1.001.950.000,00 | 522.950.000,00 | 52,19 | 1.730.250.000,00 |
| **Jumlah** | **379.386.171.900,00** | **341.043.554.087,00** | **89,89** | **395.461.753.356,44** |

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 sebesar Rp341.043.554.087,00 belanja barang yang diserahkan ke masyarakat sebesarRp20.691.797.327,00 sebagai berikut.

1. **Bahan Pakai Habis**

Belanja Bahan Pakai Habis meliputi barang-barang yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional kantor. Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2020 sebesar Rp16.051.296.693,00atau 95,12% dari anggarannya sebesar Rp16.874.054.394,00.

1. **Belanja Bahan/Material**

Belanja Bahan/Material meliputi bahan baku bangunan, bibit tanaman, bibit ternak, obat-obatan/pupuk, bahan kimia dan pakan. Realisasi Belanja Bahan dan Material TA 2020 sebesar Rp6.898.982.096,00atau 92,01% dari anggarannya sebesar Rp7.497.686.232,00.

1. **Jasa Kantor**

Belanja Jasa Kantor meliputi belanja pemakaian telepon, listrik, air, surat kabar/majalah, jasa kebersihan dan jasa kantor lainnya. Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2020 sebesar Rp88.366.132.768,00atau 94,73% dari anggarannya sebesar Rp93.280.039.116,00.

1. **Premi Asuransi**

Realisasi Belanja Premi Asuransi TA 2020sebesar Rp13.377.510.373,00atau 79,21% dari anggarannya sebesar Rp16.888.284.400,00meliputi belanja premi asuransi kesehatan dan asuransi barang milik daerah.

1. **Perawatan Kendaraan Bermotor**

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor meliputi belanja jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, pajak kendaraan bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2020 sebesar Rp5.485.470.401,00atau 93,82% dari anggaran sebesar Rp5.847.005.000,00.

1. **Cetak dan Penggandaan**

Belanja Cetak dan Penggandaan meliputi cetak, penggandaan dokumen dan umbul-umbul. Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan TA 2020 sebesar Rp7.981.441.270,00atau 93,67% dari anggaran sebesar Rp8.520.869.660,00.

1. **Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir meliputi sewa rumah/gedung dan ruang rapat/pertemuan yang terealisasi sebesar Rp144.652.350,00atau 67,83% dari anggarannya sebesar Rp213.269.350,00.

1. **Belanja Sewa Sarana Mobilitas**

Belanja Sewa Sarana Mobilitas meliputi sewa sarana mobilitas darat yang terealisasi sebesar Rp263.140.000,00atau 78,83% dari anggarannya sebesar Rp333.815.000,00.

1. **Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor meliputi sewa meja kursi, tenda, pakaian adat tradisional, peralatan elektronik dan tanaman hias yang terealisasi sebesar Rp1.837.440.000,00atau 86,72% dari anggarannya sebesarRp2.118.777.500,00.

1. **Belanja Makanan dan Minuman**

Belanja Makanan dan Minuman meliputi makanan dan minuman harian pegawai, kegiatan rapat, tamu, pelatihan, logistik, pasien di rumah sakit, konsumsi dan kegiatan lainnya yang terealisasi sebesar Rp21.475.653.100,00atau 94,18% dari anggaran sebesar Rp22.802.878.000,00.

1. **Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**

Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya meliputi pakaian dinas KDH dan WKDH, sipil harian, sipil lengkap, dinas harian dan dinas upacara yang terealisasi sebesar Rp518.925.000,00atau 98,19% dari anggarannya sebesar Rp528.500.000,00.

1. **Belanja Pakaian Kerja**

Belanja Pakaian Kerja meliputi pakaian kerja lapangan yang terealisasi sebesar Rp612.705.000,00atau 90,41% dari anggarannya sebesar Rp677.695.000,00.

1. **Belanja Pakaian Khusus dan Hari‑hari Tertentu**

Belanja Pakaian Khusus dan Hari‑hari Tertentu meliputi pakaian adat daerah, batik tradisional, olahraga dan pakaian khusus hari-hari tertentu lainnya yang terealisasi sebesar Rp1.152.583.000,00atau 91,80% dari anggarannya sebesar Rp1.255.477.000,00.

1. **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas meliputi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Daerah dan Luar Negeri. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2020 sebesar Rp90.078.000.295,00atau 94,51% dari anggarannya sebesar Rp95.311.070.456,00.

1. **Belanja Pemeliharaan**

Belanja Pemeliharaan disediakan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya serta jaringan listrik yang terealisasi sebesar Rp4.742.705.681,00atau 92,60% dari anggarannya sebesar Rp5.121.555.390,00.

1. **Belanja Jasa Konsultansi**

Belanja Jasa Konsultansi meliputi jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan yang terealisasi sebesar Rp4.450.779.000,00atau 88,28% dari anggarannya sebesar Rp5.041.687.127,00.

1. **Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS TA 2020terealisasi sebesar Rp563.733.500,00atau 92,41% dari anggarannya sebesar Rp610.055.600,00.

1. **Belanja Honorarium Non PNS**

Belanja Honorarium Non PNS merupakan Belanja Moderator yang terealisasi sebesar Rp1.500.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp1.500.000,00.

1. **Belanja Honorarium PNS**

Belanja Honorarium PNS meliputi honorarium panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang dan jasa, tenaga ahli/instruktur/narasumber dan honorarium PNS lainnya yang terealisasi sebesar Rp17.733.963.294,00atau 86,24% dari anggarannya sebesar Rp20.564.340.915,00.

1. **Belanja Dana Bos**

Realisasi Belanja ini pada TA 2020 sebesar Rp17.180.642.113,00atau 93,02% dari anggarannya sebesar Rp18.469.418.441,00 merupakan belanja pegawai dan belanja barang yang pendanaannya bersumber dari Hibah Dana BOS yang langsung diterima dan dikelola oleh sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Prabumulih.

1. **Belanja yang Bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Realisasi Belanja ini pada TA 2020 sebesar Rp3.873.271.665,00atau 83,59% dari anggarannya sebesar Rp4.633.757.491,00. Belanja ini merupakan belanja barang di 9 Puskesmas yang ada di Kota Prabumulih yang mekanisme dan pendanaannya berasal dari BPJS untuk klaim kapitasi.

1. **Honorarium Pengelola Barang Daerah**

Realisasi Honorarium Pengelola Barang Daerah TA 2020 sebesar Rp651.200.000,00atau 93,44% dari anggarannya sebesarRp696.900.000,00.

1. **Honorarium Pengelola Keuangan Daerah**

Realisasi Honorarium Keuangan Daerah TA 2020 sebesar Rp1.479.822.200,00atau 94,81% dari anggarannya sebesarRp1.560.840.000,00.

1. **Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan biaya operasional di RSUD Kota Prabumulih sebagai BLUD dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp32.675.447.688,00atau 70,94% dari anggarannya sebesar Rp46.060.684.828,00. Belanja ini merupakan Belanja Barang RSUD yang mekanisme dan pendanaannya berasal dari BLUD sendiri.

1. **Belanja Servis**

Belanja Servis meliputi servis alat angkutan/bengkel, perlengkapan dan peralatan kantor, komputer, alat kedokteran, penerangan jalan dan taman, serta gedung kantor. Realisasi Belanja Servis TA 2020 sebesar Rp2.100.925.100,00atau 94,81% dari anggarannya sebesar Rp2.215.818.000,00.

1. **Belanja Dekorasi**

Belanja Dekorasi meliputi belanja pembuatan spanduk, baliho, banner dan pembuatan panggung/properti. Realisasi Belanja Dekorasi TA 2020 sebesar Rp136.100.000,00atau 52,75% dari anggarannya sebesar Rp257.996.000,00.

1. **Belanja Jasa Iklan dan Peliputan**

Belanja Jasa Iklan dan Peliputan meliputi jasa iklan dan peliputan di media cetak dan elektronik. Realisasi Belanja Jasa Iklan dan Peliputan TA 2020 sebesar Rp558.945.000,00atau 90,12% dari anggarannya sebesar Rp620.247.000,00.

1. **Belanja Berobat Gratis**

Merupakan pembayaran klaim berobat gratis kepada RSUD Prabumulih dan 9 Puskesmas di Kota Prabumulih dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp127.636.500,00atau 33,59%dari anggarannya sebesar Rp380.000.000,00.

1. **Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat**

Realisasi uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pada TA 2020 sebesar Rp522.950.000,00atau 52,19% dari anggarannya sebesar Rp1.001.950.000,00 terdapat pada 8 OPD dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel7.48 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat**

| **No.** | **OPD** | **Realisasi**  **(Rp)** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dinas Kesehatan | 11.000.000,00 | * Uang Pembinaan untuk kegiatan Lomba Inspeksi Visual Asam Asetat. * Uang Pembinaan untuk kegiatan posyandu berprestasi. |
| 2 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 37.000.000,00 | Uang pembinaan pemenang Lomba Alat Teknologi Tepat Guna, Lomba 10 Program Pokok PKK, Lomba Kelurahan/Desa tingkat Kota Prabumulih. |
| 3 | Dinas Pengendalian Penduduk , KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 42.000.000,00 | Uang pembinaan pemenang lomba kesatuan gerak PKK KB,lomba PIK-R Tatanan Pendidikan dan lomba Pola Asuh Anak dan Remaja tingkat Kota Prabumulih |
| 4 | Dinas Koperasi UKM | 15.000.000,00 | Uang pembinaan untuk pemenang lomba koperasi terbaik tingkat Kota Prabumulih. |
| 5 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga Pariwisata | 83.450.000,00 | * Uang pembinaan pemenang lomba cerdas cermat tingkat SD,SMP dan SMA Kota Prabumulih. * Uang Pembinaan pemenang turnamen bola volly tingkat SMP kota Prabumulih. * Uang Pembinaan pemenang Lomba Menembak di lapangan Yonzipur 2 SG Kota Prabumulih |
| 6 | Sekretariat Daerah | 334.500.000,00 | * Uang pembinaan untuk masyarakat berprestasi lingkup Kota Prabumulih * Uang Pembinaan untuk pemenang lomba MTQ tinkat Provinsi |
|  | **Jumlah** | **522.950.000,00** |  |

1. **Belanja Hibah**

Realisasi Belanja Hibah TA 2020 sebesar Rp29.298.275.591,00atau 87,22% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp33.591.535.000,00. Belanja hibah tersebut terdiri dari hibah kepada lembaga/organisasi kemasyarakatan, BOP PAUD masyarakat, BOP Pendidikan Kesetaraan,dan beasiswa kepada 49 mahasiswa penerima beasiswa Politeknik Energi Mineral (PEM) Akamigas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 6/KPTS/BKD/2020 tanggal 2 Januari 2020dan perubahannya Nomor289/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 13November 2020, sertakonversi Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.49 Rincian Belanja Hibah**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** |
| 1 | Belanja Hibah ke Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, Beasiswa Mahasiswa PEM Akamigas | 12.312.486.000,00 | 8.606.478.264,00 | 69,90 |
| 2 | Belanja Barang diserahkan ke Masyarakat | 21.279.049.000,00 | 20.691.797.327,00 | 97,24 |
|  | **Jumlah** | **33.591.535.000,00** | **29.298.275.591,00** | **87,22** |

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada lembaga/organisasi kemasyarakatan disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 7.50 Rincian Belanja Hibah kepada Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan**

| **No.** | **Penerima**  **Belanja Hibah** | **Tahun 2020** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** |
| 1 | KONI | 2.143.700.000,00 | 2.134.415.525,00 | 99,57 |
| 2 | KPU | 400.000.000,00 | 399.686.797,00 | 99,92 |
| 3 | PMI | 270.000.000,00 | 267.289.942,00 | 98,99 |
| 4 | Komite Nasional Paralympic | 54.300.000,00 | 54.300.000,00 | 100,00 |
| 5 | Kwarcab Pramuka | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 100,00 |
| 6 | Polres Kota Prabumulih | 1.285.386.000,00 | 1.285.386.000,00 | 100,00 |
| 7 | BOP PAUD | 5.529.200.000,00 | 1.956.000.000,00 | 35,38 |
| 8 | BOP Pendidikan Kesetaraan | 1.021.900.000,00 | 985.900.000,00 | 96,48 |
| 9 | Mahasiswa PEM Akamigas | 1.500.000.000,00 | 1.415.500.000,00 | 94,37 |
|  | **Jumlah** | **12.312.486.000,00** | **8.606.478.264,00** | **69,90** |

Sedangkan rekapitulasi realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat terdapat pada 12OPD tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 7.51 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat**

| **No.** | **OPD** | **Realisasi (Rp)** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dinas Kesehatan | 345.640.000,00 | * Pembelian hadiah kegiatan sirkumsisi pada anak * Pengadaan media isi piringku/tepak untuk anak usia pra sekolah |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7.781.281.423,00 | * Pembayaran utang beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tahun sebelumnya. * Pembangunan lanjutan Kantor Kejari, Pembangunan Lanjutan Kantor PDAM, pembangunan lanjutan Rumah Tahfiz Al-Qur’an dan pembangunan/rehab tempat ibadah permanen. |
| 3 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 9.051.366.000,00 | * Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di 4 kelurahan dan Desa * Bantuan Pembangunan TPS 3R di 6 Kelurahan * Bantuan Pembangunan IPAL komunal, IPAL skala pemukiman dan MCK, pembangunan tangki septik skala komunal. * Bantuan Pembangunan rumah tidak layak huni. * Bantuan Pembangunan sumur BOR di 4 Kelurahan. * Bantuan Instalsasi sambungan listrik rumah tangga. |
| 4 | Dinas Sosial | 24.000.000,00 | Pemberian Bantuan Sembako kepada 4 panti asuhan di wilayah Kota Prabumulih. |
| 5 | Dinas Ketahanan Pangan | 346.154.812,00 | * Pemberian bantuan bibit tanaman sayuran dan TOGA, fisik rumah bibit sederhana dan peralatan media tanam kepada Kelompok Wanita Tani kegiatan (P2KP. * Pemberian bantuan bibit tanaman sayuran dan TOGA, fisik peralatan media tanam dan peralatan pertanian kepada Kepada Kelompok Wanita Tani untuk kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari. * Pemberian hadiah pemenang lomba penilaian halaman asri teratur dan nyaman. * Pemberian bantuan bibit pepaya California dan pupuk organic untuk Kelompok Wanita Tani. * Pemberian hadiah peralatan rumah tangga pemenang lomba UP2K. * Pemberian bantuan aneka bibit tanaman sayuran, tanaman TOGA, peralatan dan media tanam untuk Kelompok Wanita Tani di 6 (enam) kecamatan dalam rangka persiapan lomba pemanfaatan pekarangan. * Pemberian bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan, pupuk organik dan peralatan kemananan pangan untuk Kelompok Wanita Tani dalam rangka pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan terpadu. * Pemberian bantuan bibit TOGA untuk Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Tani untuk pemanfaatan lahan pekarangan. * Pengadaan beras untuk cadangan pangan Kota Prabumulih * Pengadaan sembako untuk keluarga rentan pangan Kota Prabumulih |
| 6 | Dinas Pengendalian Penduduk , KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 201.120.000,00 | * Pembelian hadiah pemenang lomba Keluarga harmonis, PLKB IMP dan KB lestari. * Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor unit PPPA Polres Prabumulih |
| 7 | Dinas Koperasi UKM | 23.000.000,00 | * Pembelian Plastik Kemasan dan Label/Merk untuk Pelaku UMKM di Kota Prabumulih. * Pembelian Trophy untuk pemenang lomba koperasi terbaik tingkat Kota Prabumulih. |
| 8 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata | 141.780.000,00 | * Pembelian perlengkapan peserta kegiatan penyuluhan bahaya narkoba. * Pembelian perlengkapan peserta Jambore Pemuda * Pembelian medali/piagam untuk kegiatan Lomba Menembak di lapangan Yonzipur 2 SG Kota Prabumulih * Pembelian peralatan olahraga dan kaos tim untuk cabang olahraga bola volly dan sepakbola |
| 9 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1.650.000,00 | Pembelian hadiah (tropi) pemenang lomba bercerita dan lomba perpustakaan. |
| 10 | Dinas Pertanian | 1.017.394.692,00 | Pemberian bantuan 110 unit rak vertikultur untuk 12 Kelompok Wanita Tani  Pemberian bantuan 18.200 paket bibit sayuran untuk 19 Kelompok Wanita Tani  Pemberian bantuan ayam, kandang ayam dan pakan ayam untuk Kelompok Wanita Tani Swadaya Kel. Gunung Ibul Barat kec. Prabumulih Timur.  Pemberian bantuan bibit karet polybag dan biji karet untuk Kelompok Tani Gelam Indah Desa Karang Bindu  Pemberian bantuan bibit ikan nila, pakan benih, pakan lanjutan untuk 3 Desa di Kec. RKT.  Pemberian bantuan bibit ikan lele, pakan benih, pakan lanjutan untuk Kel. Gunung Kemala dan Kel Tanjung Raman.  Pemberian bantuan bibit ikan gurame, pakan benih, pakan lanjutan untuk Desa Karya Mulia dan Desa Karang Bindu Kec. RKT  Pemberian bantuan bibit ikan patin, pakan benih, pakan lanjutan untuk Desa Rambang Senuling dan Desa Karang Bindu Kec. RKT.  Pemberian bantuan peralatan olahan hasil perikanan untuk 7 kelurahan dan desa.  Pemberian bantuan bahan dan pertalatan bioflok, benih ikan, pakan ikan pertumbuhan/pakan *starter* dan probiotik untuk KWT Yellow Cosmos Kel. Mangga Besar |
| 11 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 445.317.000,00 | Pengadaan gerobak dan etalase untuk pedagang keliling dan kuliner. |
| 12 | Sekretariat Daerah | 1.313.093.400,00 | * Pembelian mesin genset untuk rumah ibadah. * Pengadaan hewan qurban. * Pengadaan trophy dan souvenir pemenang lomba MTQ tingkat provinsi. * Pengadaan laptop, mobil Patwal Polres Prabumulih. |
|  | **Jumlah** | **20.691.797.327,00** |  |

1. **Belanja Bantuan Sosial**

Anggaran Belanja Bantuan Sosial meliputi pemberian bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu asal Kota Prabumulih sebesar Rp201.000.000,00 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor289/KPTS/BPKAD/I/2020 tanggal 13 November 2020.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 sebesar Rp165.000.000,00 atau82,09% dari anggarannya sebesar Rp201.000.000,00mengalami penurunan sebesar Rp974.000.000,00dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.139.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan bantuan beasiswa kepada 55 siswa SMA/SMK/MAN yang kurang mampu masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 sesuai Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 285/KPTS/DISDIKBUD/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

1. **Belanja Modal**

Rekening ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan Aset Tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kota Prabumulih meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya.

Pada TA 2020 anggaran Belanja Modal mengalami penurunan yang cukup signifikan yang direalokasi ke Belanja Tak Terduga untuk penanganan Pandemi Covid-19 berupa belanja bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp219.977.220.956,66atau 96,07% dari anggarannya sebesar Rp228.968.408.359,00dan mengalami penurunan sebesar Rp91.738.081.751,34 dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp311.715.302.708,00dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.52 Belanja Modal**

| **Belanja**  **Modal** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Tanah | 1.143.000.000,00 | 922.500.000,00 | 80,71 | 12.298.968.500,00 |
| Peralatan dan Mesin | 32.120.260.320,00 | 29.748.022.380,00 | 92,61 | 42.997.941.318,00 |
| Gedung dan Bangunan | 33.508.224.320,00 | 32.883.633.009,00 | 98,14 | 52.419.507.854,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 158.835.832.899,00 | 153.927.062.066,66 | 96,91 | 201.516.008.439,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 3.361.090.820,00 | 3.275.244.655,00 | 97,45 | 2.482.876.597,00 |
| **Jumlah** | **228.968.408.359,00** | **220.756.462.110,66** | **96,41** | **311.715.302.708,00** |

Selanjutnya atas anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2020 dan realisasi TA 2019 dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1. **Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 sebesar Rp922.500.000,00 atau 80,71% dari anggarannya sebesar Rp1.143.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp11.376.468.500,00 dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah TA 2019 sebesar Rp12.298.968.500,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 sebesar Rp922.500.000,000 terdiri dari belanja modal pengadaan tanah untuk pembangunan *fly over* di Kelurahan Patih Galung Rp152.000.000,00; untuk pembangunan gedung sekolah di Kelurahan Anak Petai Rp254.500.000,00;untuk pembangunan gedung sekolah di Kelurahan Sungai Medang Rp80.000.000,00; untuk pembangunan gedung sekolah di Kelurahan Sungai Medang Rp420.000.000,00 dan pembersihan lahan/*land clearing* Rp16.000.000,00.

1. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dimaksudkan untuk mengadakan peralatan dan perlengkapan kantor,peralatan dan perlengkapan kerja/bengkel, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

| **Belanja Modal**  **Peralatan dan Mesin** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Alat-alat Besar Darat | 0,00 | 0,00 | - | 417.500.000,00 |
| Alat Bantu/Bengkel | 339.220.400,00 | 316.379.250,00 | 93,27 | 340.400.000,00 |
| Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 3.341.817.060,00 | 3.150.109.000,00 | 94,26 | 10.662.171.999,00 |
| Alat-alat Ukur | 209.764.875,00 | 207.831.875,00 | 99,08 | 149.434.635,00 |
| Alat Pengolahan | 0,00 | 0,00 | - | 21.650.000,00 |
| Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan | 147.050.000,00 | 144.790.400,00 | 98,46 | 1.045.744.473,00 |
| Peralatan Kantor | 7.589.356.148,00 | 7.941.079.965,00 | 104,63 | 1.012.606.219,00 |
| Peralatan Rumah Tangga | 2.705.850.214,00 | 2.351.736.602,00 | 89,91 | 5.532.737.494,00 |
| Pengadaan Komputer | 6.597.587.136,00 | 6.492.361.573,00 | 98,41 | 4.656.250.235,00 |
| Pengadaan Meja dan Kursi | 242.900.000,00 | 235.968.000,00 | 97,15 | 444.443.636,00 |
| Alat-alat Studio | 176.119.243,00 | 166.713.500,00 | 94,66 | 169.561.400,00 |
| Alat-alat Komunikasi | 129.850.000,00 | 114.650.000,00 | 88,29 | 203.045.000,00 |
| Peralatan pemancar | 0,00 | 0,00 | - | 2.400.000,00 |
| Alat-alat Kedokteran | 4.416.862.280,00 | 4.039.863.495,00 | 91,46 | 14.451.312.925,00 |
| Alat-alat Kesehatan | 277.816.706,00 | 190.885.040,00 | 68,71 | 138.805.000,00 |
| Unit-unit Laboratorium | 958.158.978,00 | 791.982.080,00 | 82,66 | 974.283.000,00 |
| Alat Peraga/Praktek Sekolah | 1.503.000.000,00 | 1.472.110.000,00 | 97,94 | 811.009.200,00 |
| Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 1.354.907.280,00 | 1.209.074.800,00 | 89,24 | 322.208.900,00 |
| Alat Bantu Keamanan/ Persenjataan | 130.000.000,00 | 129.800.000,00 | 99,85 | 268.100.000,00 |
| Biaya Investasi BLUD | 2.000.000.000,00 | 792.686.800,00 | 39,63 | 1.374.277.202,00 |
| **Jumlah** | **32.120.260.320,00** | **29.748.022.380,00** | **92,61** | **42.997.941.318,00** |

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 seluruhnya sebesar Rp29.748.022.380,00atau92,61% dari anggaran sebesar Rp32.120.260.320,00danmengalami penurunan sebesar Rp13.249.918.938,00dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp42.997.941.318,00. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 adalah sebagai berikut.

1. **Pengadaan Alat-Alat Bantu/Bengkel**

Belanja Modal Alat Bantu berupa pengadaan pompa, unit pemeliharaan lapangan dan alat bengkel tak bermesin, denganrealisasi pada TA 2020 sebesar Rp316.379.250,00atau 93,27% dari anggarannya sebesar Rp339.220.400,00.

1. **Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**

Belanja Modal Alat Angkutan Darat berupa kendaraan dinas bermotor perorangan, penumpang, angkutan barang, dan sepeda motor, dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp3.150.109.000,00atau 94,26% dari anggarannya sebesar Rp3.341.817.060,00.

1. **Pengadaan Alat-alat Ukur**

Belanja Modal Alat Ukur berupa pengadaan alat ukur universal dan timbangan, dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp207.831.875,00atau 99,08% dari anggarannya sebesar Rp209.764.875,00.

1. **Pengadaan Alat-alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan**

Belanja Modal Alat-alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan berupa pengadaan alat penyimpanan dan alat laboratoriumdengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp144.790.400,00atau 98,46% dari anggaran sebesar Rp147.050.000,00.

1. **Pengadaan Peralatan Kantor**

Belanja Modal Peralatan Kantor meliputi belanja mesin tik, alat penggandaan, alat penyimpanan perlengkapan kantor dan alat kantor lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas kantor, dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp7.941.079.965,00atau 104,63% dari anggaran sebesar Rp7.589.356.148,00.

1. **Pengadaan Peralatan Rumah Tangga**

Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga meliputi pengadaan mebelair, alat pengukur waktu, alat pembersih, alat pendingin, alat dapur, alat pemadam kebakaran, dan alat rumah tangga lainnya, dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp2.351.736.602,00 atau 89,91 % dari anggarannya sebesar Rp2.705.850.214,00.

1. **Pengadaan Komputer**

Belanja Modal Pengadaan Komputer meliputi pengadaan komputer unit jaringan, PC, peralatan komputer mainframe,peralatan mini komputer dan peralatan jaringan, dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp6.492.361.573,00atau 98,41 dari anggarannya sebesar Rp6.597.587.136,00.

1. **Pengadaan Meja dan Kursi**

Belanja Modal pengadaan meja dan kursi meliputi pengadaan meja dan kursi pejabat/rapat, sofa, dan lemari arsip dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp235.968.000,00atau 97,15% dari anggarannya sebesar Rp242.900.000,00.

1. **Pengadaan Alat Studio**

Belanja Modal Alat-alat Studio meliputi pengadaan peralatan studio visual, studio video/film dan peralatan computing, dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp166.713.500,00atau 94,66% dari anggarannya sebesar Rp176.119.243,00.

1. **Pengadaan Alat Komunikasi**

Belanja Modal Alat-alat Komunikasi berupa pengadaan telephonedengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp114.650.000,00atau 88,29% dari anggarannya sebesar Rp129.850.000,00.

1. **Pengadaan Alat-alat Kedokteran**

Belanja Modal Alat-alat Kedokteran meliputi pengadaan peralatan kedokteran umum, KB, mata, bedah, penyakit dalam dan jantung yang kesemuanya untuk kepentingan RSUD, Puskesmas dan Program Keluarga Berencana. Realisasi Belanja Modal Alat-alat Kedokteran TA 2020 sebesar Rp4.039.863.495,00atau 91,46% dari anggarannya sebesar Rp4.416.862.280,00.

1. **Pengadaan Alat Kesehatan**

Belanja Modal Alat Kesehatan meliputi pengadaan peralatan alat kesehatan perawatan pada Dinas Kesehatan, dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp190.885.040,00atau 68,71% dari anggarannya sebesar Rp277.816.706,00.

1. **Pengadaan Unit-unit Laboratorium**

Belanja Modal Unit-unit Laboratorium meliputi pengadaan peralatan laboratorium standarisasi, kalibrasi dan instrumentasi dengan realisasi pada TA 2020 sebesarRp791.982.080,00atau 82,66% dari anggarannya sebesar Rp958.158.978,00.

1. **Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah**

Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah meliputi alat peraga/praktik sekolah bidang studi IPS, kesenian, olahraga dan pendidikan keterampilan untuk kepentingan SD/SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Realisasi Belanja Modal Alat Peraga/Praktek TA 2020 sebesar Rp1.472.110.000,00atau 97,94% dari anggarannya sebesar Rp1.503.000.000,00.

1. **Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup**

Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup meliputi pengadaan peralatan laboratorium kualitas air/tanah, alat kesehatan kerja dan penunjang, dengan realisasi pada TA 2020 sebesarRp1.209.074.800,00 atau 89,24% dari anggarannya sebesar Rp1.354.907.280,00.

1. **Alat Bantu Keamanan/Persenjataan**

Belanja Modal Alat Keamanan dan Persenjataan Non Senjata Api dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp129.800.000,00atau 99,85% dari anggarannya sebesar Rp130.000.000,00.

1. **Biaya Investasi BLUD**

Realisasi Belanja Investasi pada RSUD selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) TA 2020 sebesar Rp792.686.800,00atau 39,63% dari anggarannya sebesar Rp2.000.000.000,00. Belanja ini merupakan Belanja Modal RSUD yang berasal dari mekanisme dan pendanaan BLUD sendiri.

1. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk Pengadaan Konstruksi/Rehab Bangunan, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.54 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

| **Belanja Modal**  **Gedung Bangunan** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 29.173.646.320,00 | 28.564.655.600,00 | 97,91 | 50.540.442.854,00 |
| Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 4.090.000.000,00 | 4.069.078.000,00 | 99,49 | 1.084.691.000,00 |
| Pengadaan Bangunan Bersejarah | 180.000.000,00 | 179.653.000,00 | 99,81 | 762.234.000,00 |
| Pengadaan Tugu Peringatan | 43.428.000,00 | 49.096.409,00 | 113,05 | 3.000.000,00 |
| Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu | 21.150.000,00 | 21.150.000,00 | 100,00 | 29.140.000,00 |
| **Jumlah** | **33.508.224.320,00** | **32.883.633.009,00** | **98,14** | **52.419.507.854,00** |

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020meliputi pengadaan/rehab bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan bersejarah, tugu peringatan dan rambu-rambu seluruhnya sebesar Rp32.883.633.009,00atau 98,14% dari anggarannya sebesar Rp33.508.224.320,00dan mengalami penurunan sebesar Rp19.535.874.845,00dibandingkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 sebesar Rp52.419.507.854,00.

1. **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana jalan, irigasi, jaringan air minum, dan jaringan listrik dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.55 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

| **Belanja Modal**  **Jalan, Irigasi dan Jaringan** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Pengadaan Jalan | 149.120.660.025,00 | 145.087.954.124,66 | 97,30 | 169.457.627.521,00 |
| Pengadaan Jembatan | 1.170.000.000,00 | 1.170.000.000,00 | 100,00 | 6.196.545.000,00 |
| Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA | 3.041.211.642,00 | 2.235.813.442,00 | 73,52 | 19.293.694.718,00 |
| Pengadaan Bangunan Air Kotor | 0,00 | 0,00 | - | 122.520.000,00 |
| Pengadaan Bangunan Air tawar/baku | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 100,00 | 149.025.000,00 |
| Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah | 213.068.232,00 | 211.854.000,00 | 99,43 | 0,00 |
| Pengadaan Jaringan Air Minum | 369.750.000,00 | 369.234.000,00 | 99,86 | 2.325.357.000,00 |
| Pengadaan Jaringan Listrik | 4.907.143.000,00 | 4.838.206.500,00 | 98,60 | 3.971.239.200,00 |
| **Jumlah** | **158.835.832.899,00** | **153.927.062.066,66** | **96,91** | **201.516.008.439,00** |

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 seluruhnya sebesar Rp153.927.062.066,66atau 96,91% dari anggarannya sebesar Rp158.835.832.899,00dan mengalami penurunan sebesar Rp47.588.946.372,34 dibandingkan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 sebesar Rp201.516.008.439,00.

1. **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah belanja yang menimbulkan aset tetap selain yang telah diklasifikasi pada bagian sebelumnya, terdiri dari belanja modal pengadaan buku/kepustakaan, pengadaan alat olah raga, dan pengadaan tanaman hias untuk pohon pelindung dan taman kota.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.56 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja Modal**  **Aset Tetap Lainnya** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Buku/Kepustakaan | 3.361.090.820,00 | 3.275.244.655,00 | 97,45 | 2.218.907.324,00 |
| Tanaman | 0,00 | 0,00 | - | 18.777.273,00 |
| Alat Olah Raga | 0,00 | 0,00 | - | 245.192.000,00 |
| **Jumlah** | **3.361.090.820,00** | 3.275.244.655,00 | **97,45** | **2.482.876.597,00** |

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 seluruhnya merupakan pengadaan Buku/Kepustakaan sebesar Rp3.275.244.655,00 atau 97,45% dari anggarannya sebesar Rp3.361.090.820,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp792.368.058,00dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp2.482.876.597,00.

1. **Belanja Tak Terduga**

Alokasi Belanja Tak Terduga pada TA 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang berasal dari realokasi anggaran kegiatan lain, dan digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19 berupa belanja bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi, sedangkan penanganan Non Covid-19 digunakan untuk penanggulangan akibat dari bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan angin puting beliung termasuk bantuan perbaikan infrastruktur masyarakat yang rusak akibat bencana di Wilayah Kota Prabumulih.

Pengguna Anggaran Belanja Tak Terduga adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih, yang pelaksanaan teknisnya untuk penanganan Pandemi Covid-19 diserahkan kepada OPD terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Perindustrian Perdagangan.

Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2020 serta realisasi TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.57 Belanja Tak Terduga**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja**  **Tak Terduga** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| BTT Penanganan  Covid-19 |  |  |  |  |
| Bidang Kesehatan | 13.011.591.535,00 | 11.940.510.500,00 | 91,77 | - |
| Jaring Pengaman Sosial | 33.067.330.400,00 | 33.032.719.500,00 | 99,90 | - |
| Penanganan Dampak Ekonomi | 910.675.000,00 | 685.675.000,00 | 75,29 | - |
| **Sub Jumlah** | **46.989.596.935,00** | **45.658.905.000,00** | **97,17** | **0,00** |
| BTT Non Covid-19 | 1.073.842.065,00 | 1.054.350.000,00 | 98,18 | 212.037.000,00 |
| **Jumlah** | **48.063.439.000,00** | **46.713.255.000,00** | **97,19** | **212.037.000,00** |

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2020sebesar Rp46.713.255.000,00 atau 97,19% dari anggarannya sebesar Rp48.063.439.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp46.501.218.000,00 dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp212.037.000,00. Realisasi Belanja Tak Terduga untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp45.658.905.000,00 terdiri dari belanja bidang kesehatan sebesar Rp11.940.510.500,00; penyediaan jaring pengaman sosial sebesar Rp33.032.719.500,00 dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp685.675.000,00.

1. **Transfer**

Transfer merupakan pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain. Pada pemerintah daerah, transfer dapat diklasifikasikan menjadi transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.

Pada TA 2020, pengeluaran transfer di Kota Prabumulih hanya berupa transfer bantuan keuangan yaitu transfer bantuan keuangan ke Desa dan Partai Politik, dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut.

**Tabel 7.58 Transfer Bantuan Keuangan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Transfer**  **Bantuan Keuangan** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Transfer Bantuan KeuanganKe Desa |  |  |  |  |
| * + - * Alokasi Dana Desa (ADD) | 7.513.880.000,00 | 7.513.880.000,00 | 100,00 | 7.513.880.000,00 |
| * + - * Dana Desa | 16.502.688.000,00 | 21.868.335.000,00 | 132,51 | 21.214.413.000,00 |
| **Sub Jumlah** | **24.016.568.000,00** | **29.382.215.000,00** | **122,34** | **28.728.293.000,00** |
| Transfer Bantuan Keuangan Ke Partai Politik | 938.701.918,00 | 938.701.918,00 | 100,00 | 858.408.909,00 |
| **Jumlah** | **24.955.269.918,00** | **30.320.916.918,00** | **121,50** | **29.586.701.909,00** |

Realisasi Transfer TA 2020 sebesar Rp30.320.916.918,00 atau 121,50% dari anggarannya sebesar Rp24.955.269.918,00 dan meningkat sebesar Rp734.215.009,00 dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp29.586.701.909,00.

1. **Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**

Realisasi transfer bantuan keuangan ke Desa TA 2020 sebesar Rp29.382.215.000,00 atau 122,34% dari anggarannya sebesar Rp24.016.568.000,00 dan meningkat sebesar Rp653.922.000,00 dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp28.728.293.000,00.

Transfer bantuan keuangan ke Desa terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kota Prabumulih (SK Walikota Nomor 51/KPTS/DPMD/2020 tanggal 8 Januari 2020) dan Dana Desa yang bersumber dari APBN (Peraturan Walikota Nomor33 Tahun 2020 dan Revisinya Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2020), dengan realisasi tiap desa pada TA 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.59 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**

| **No.** | **Nama Desa** | **ADD**  **(Rp)** | **Dana Desa**  **(Rp)** | **Jumlah**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karang Bindu | 601.574.000,00 | 1.425.464.000,00 | 2.027.038.000,00 |
| 2 | Talang Batu | 598.523.000,00 | 1.846.788.000,00 | 2.445.311.000,00 |
| 3 | Rambang Senuling | 566.719.000,00 | 1.379.619.000,00 | 1.946.338.000,00 |
| 4 | Jungai | 565.128.000,00 | 1.903.796.000,00 | 2.468.924.000,00 |
| 5 | Sinar Rambang | 568.011.000,00 | 1.402.001.000,00 | 1.970.012.000,00 |
| 6 | Karangan | 594.290.000,00 | 2.026.904.000,00 | 2.621.194.000,00 |
| 7 | Karya Mulya | 681.419.000,00 | 1.706.462.000,00 | 2.387.881.000,00 |
| 8 | Kemang Tanduk | 625.621.000,00 | 1.799.387.000,00 | 2.425.008.000,00 |
| 9 | Tanjung Menang | 661.009.000,00 | 1.660.201.000,00 | 2.321.210.000,00 |
| 10 | Tanjung Telang | 630.241.000,00 | 2.047.694.000,00 | 2.677.935.000,00 |
| 11 | Muara Sungai | 679.833.000,00 | 2.239.138.000,00 | 2.918.971.000,00 |
| 12 | Pangkul | 741.512.000,00 | 2.430.881.000,00 | 3.172.393.000,00 |
|  | **Jumlah** | **7.513.880.000,00** | **21.868.335.000,00** | **29.382.215.000,00** |

Rincian penggunaan Dana Desa dan SiLPA tiap desa dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Sampai dengan 31 Desember 2020,dari realisasi penerimaan Dana Desa (APBN) TA 2020 sebesar Rp21.868.335.000,00 telah disalurkan seluruhnya oleh KPPN Kota Palembang langsung kepada 12 desa yang ada di Kota Prabumulih.

OPD pengelola transfer bantuan keuangan ke desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

1. **Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik**

Realisasi transfer bantuan keuangan ke Partai Politik TA 2020 sebesar Rp938.701.918,00atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp938.701.918,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp80.293.009,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp858.408.909,00.

Penetapan bantuan keuangan ke Partai Politik TA 2020 adalah berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih No. 71 Tahun 2019 yaitu untuk anggota dewan hasil Pemilu Legislatif tahun 2019 dan dilantik pada tanggal 27 September 2019.

OPD pengelola transfer bantuan keuangan ke partai politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dengan rincian partai politik penerima bantuan keuangan TA 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.60 Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik**

| **No.** | **Partai Politik** | **Jumlah**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Partai Demokrat | 69.725.964,00 |
| 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 123.496.912,00 |
| 3 | Partai Bulan Bintang | 78.939.168,00 |
| 4 | Partai Amanat Nasional | 76.031.648,00 |
| 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 90.469.302,00 |
| 6 | Partai Nasional Demokrasi | 58.495.668,00 |
| 7 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 98.764.820,00 |
| 8 | Partai Golongan Karya | 155.724.954,00 |
| 9 | Partai Keadilan Sejahtera | 92.640.856,00 |
| 10 | Partai Gerindra | 94.412.626,00 |
|  | **Jumlah** | **938.701.918,00** |

1. **Surplus/(Defisit)**

Dari realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp972.242.373.625,39 Belanja Daerah sebesar Rp1.024.031.018.357,66 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp30.320.916.918,00 maka dihasilkan Defisit untuk TA 2020 sebesar Rp82.109.561.650,27. Sedangkan pada TA 2019 dihasilkan Surplus sebesar Rp44.348.366.891,89.

1. **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.

Anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.61 Pembiayaan Daerah**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pembiayaan**  **Daerah** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Penerimaan  Pembiayaan Daerah | 171.866.820.389,00 | 171.866.820.389,63 | 100,00 | 132.239.775.102,38 |
| Pengeluaran  Pembiayaan Daerah | 0,00 | 0,00 | - | 4.707.000.000,00 |
| **Pembiayaan Netto** | **171.866.820.389,00** | **171.866.820.389,63** | **100,00** | **127.532.775.102,38** |

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2020 sebesar Rp171.866.820.389,63 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp171.866.820.389,00 meningkat sebesar Rp44.334.045.287,25 dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp127.532.775.102,38. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1. **Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan Daerah hanya berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.62 Penerimaan Pembiayaan**

| **Penerimaan**  **Pembiayaan** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Penggunaan SILPA  Tahun Lalu | 171.866.820.389,00 | 171.866.820.389,63 | 100,00 | 132.239.775.102,38 |
| **Jumlah** | **171.866.820.389,00** | **171.866.820.389,63** | **100,00** | **132.239.775.102,38** |

Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2020sebesar Rp171.866.820.389,63atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp171.866.820.389,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp39.627.045.287,25dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp132.239.775.102,38.

1. **Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.63 Pengeluaran Pembiayaan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pengeluaran Pembiayaan** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemda |  |  |  |  |
| - PDAM Tirta Prabujaya | 0,00 | 0,00 | - | 1.707.000.000,00 |
| - PT. Bank Sumsel Babel | 0,00 | 0,00 | - | 3.000.000.000,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | **0,00** | **-** | **4.707.000.000,00** |

Pada TA 2020 tidak terdapat anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan disebabkan terjadinya realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 yang semula pada APBD Induk TA 2020 telah dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan untuktambahan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp3.000.000.000,00.

1. **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan Pendapatan dan Penerimaan dibanding Belanja dan Pengeluaran Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 7.64 Perhitungan SiLPA (SiKPA)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Perhitungan APBD** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Realisasi (Rp)** |
| Pendapatan Daerah | 946.853.077.993,00 | 972.242.373.625,39 | 102,68 | 1.220.476.081.088,69 |
| Belanja Daerah | 1.093.764.628.464,00 | 1.024.031.018.357,66 | 93,62 | 1.146.555.333.892,44 |
| Transfer | 24.955.269.918,00 | 30.320.916.918,00 | 121,50 | 29.586.701.909,00 |
| **Surplus (Defisit)** | **(171.866.820.389,00)** | **(**82.109.561.650,27**)** | **47,78** | **44.334.045.287,25** |
| Penerimaan Pembiayaan | 171.866.820.389,00 | 171.866.820.389,63 | 100,00 | 132.239.775.102,38 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | - | 4.707.000.000,00 |
| **Pembiayaan Netto** | **171.866.820.389,00** | **171.866.820.389,63** | **100,00** | 127.532.775.102,38 |
| **SiLPA (SiKPA)** | **0,00** | **89.757.258.739,36** |  | **171.866.820.389,63** |

SiLPA merupakan hak Pemerintah Kota Prabumulih, sebagai penambah Ekuitas, yang ditunjukkan oleh adanya sisa Kas dan Setara Kas di Kas Daerah.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, SiLPA TA 2020 sebesar Rp89.757.258.739,36 mengalami penurunan sebesar Rp82.109.561.650,27 dibandingkan SiLPA TA 2019 sebesar Rp171.866.820.389,63.

Sedangkan sia Kas dan Setara Kas di Kas Daerah adalah sebesar Rp87.757.216.580,36.

**Tabel 7.65 SiLPA TA 2020 dan 2019**

|  | **Uraian** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **SiLPA Pemkot Prabumulih** | |  |  |
|  | Kas di Kas Daerah (BUD) | 87.507.331.198,97 | 168.816.826.752,24 |
|  | Kas di Bendahara Penerimaan | 10.053.730,00 | 0,00 |
|  | Kas di Bendahara Pengeluaran | 40.313,00 | 1.342.500,00 |
|  | Deposito | 0,00 | 0,00 |
|  | Kas di Bendahara Puskesmas  (Dana Kapitasi JKN BPJS) | 368.261.727,56 | 367.842.136,56 |
|  | Kas di BLUD (RSUD) | 746.174.790,83 | 2.060.684.828,83 |
|  | Kas Lainnya – Dana BOS di Sekolah | 1.125.354.820,00 | 620,124,172.00 |
|  | **Jumlah SiLPA** | **89.757.216.580,36** | **171.866.820.389,63** |

Terdapat selisih kurang di rekening Kas Daerah (BUD) sebesar Rp42.159,00 antara SiLPA TA 2020 sebesar Rp89.757.258.739,36 dengan saldo akhir Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp89.757.216.580,36 yang merupakan Piutang PFK pegawai atas kekurangan potongan iuran IWP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bagian Oktober TA 2020.

1. **Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi peningkatan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada LP-SAL berasal dari Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah/dikurangi SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran periode bersangkutan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, sebagai berikut.

1. **Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal**

merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SAL Awal Tahun 2020 sebesar Rp171.866.820.389,63 atau meningkat 29,45% yaitu sebesar Rp39.097.622.525,25 dari SAL Awal Tahun 2019 sebesar Rp132.769.197.864,38.

1. **Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

merupakan SALyang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.

Tahun 2020 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesarRp171.866.820.389,63 atau meningkat 29,97% yaitu sebesar Rp39.627.045.287,25 dari Penggunaan SAL Tahun 2019 sebesar Rp132.239.775.102,38.

1. **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA, Belanja, dan Transfer serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA Tahun 2020 sebesar RpRp89.757.258.739,36 atau menurun47,78% yaitu sebesar Rp82.109.561.650,27dari SiLPA Tahun 2019 sebesar Rp171.866.820.389,63.

Surplus/Defisit LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan LRA denganBelanja dan Transfer selama satu periode pelaporan. Defisit LRA Tahun 2020 sebesar Rp82.131.746.730,27, sedangkandi tahun 2019 dihasilkan Surplus sebesar Rp44.334.045.287,25.

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Pembiayaan Netto tahun 2020 sebesar Rp171.866.820.389,63 meningkatsebesar Rp44.334.045.287,25 dari Pembiayaan Netto tahun 2019 sebesarRp127.532.775.102,38.

1. **Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya.

1. **SAL Akhir**

SAL Akhir tahun 2020 sebesar Rp89.757.258.739,36 atau mengalami penurunan 47,78% yaitu sebesar Rp82.109.561.650,27dari SAL Akhir Tahun 2019 sebesarRp171.866.820.389,63.

1. **Penjelasan Pos-Pos Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban.

Untuk Posisi Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2020 secara umum, sebagai berikut.

* + - * Jumlah **Aset** sebesar Rp2.352.800.542.609,31terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp155.366.720.937,54; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp67.487.436.703,25; Aset Tetap sebesar Rp2.117.239.792.206,67 serta Aset Lainnya sebesar Rp12.706.592.761,85
      * Jumlah **Kewajiban** sebesar Rp24.505.424.468,50merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka sebesarRp183.061.374,50; Utang Beban sebesar Rp19.668.149.204,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4.654.213.890,00.
      * Jumlah **Ekuitas** sebesar Rp2.328.295.118.140,81.

1. **Aset**

Pemerintah Kota Prabumulih memiliki aset tahun 2020 dan 2019masing-masing sebesar Rp2.352.800.542.609,31dan Rp2.501.589.009.873,62 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.66 Aset**

| **Aset** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- |
| Aset Lancar | 161.148.017.787,33 | 248.011.299.598,10 |
| Investasi Jangka Panjang | 67.487.436.703,25 | 72.123.157.559,01 |
| Aset Tetap | 2.117.239.792.206,67 | 2.167.470.052.882,46 |
| Aset Lainnya | 12.706.592.761,85 | 13.984.499.834,05 |
| **Jumlah** | **2.352.800.542.609,31** | **2.501.589.009.873,62** |

1. **Aset Lancar**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Belanja Dibayar Dimuka, dan Persediaan. Nilai Aset Lancar Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 161.148.017.787,33 dan Rp248.011.299.598,10dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.67 Aset Lancar**

| **Aset** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- |
| Kas dan Setara Kas | 89.757.216.580,36 | 171.881.141.994,27 |
| Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Pendapatan | 80.736.270.324,48 | 57.024.850.868,58 |
| Piutang Lainnya | 342.855.479,00 | 378.313.320,00 |
| Penyisihan Piutang | (25.362.971.642,79) | (22.839.028.328,12) |
| Belanja Dibayar Dimuka | 40.450.011,00 | 436.504.769,57 |
| Persediaan | 15.634.197.035,18 | 42.657.563.636,48 |
| **Jumlah** | **161.148.017.787,33** | **249.539.346.260,78** |

* + - * 1. **Kas dan Setara Kas**

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas pada Pemerintah Kota Prabumulih mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD, yaitu Bendahara Pengeluaran OPD, Bendahara Penerimaan OPD, Bendahara Puskesmas (Dana Kapitasi JKN BPJS), Bendahara BLUD (RSUD), dan sisa kas dana BOS.

Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp89.757.216.580,36dan Rp171.866.820.389,63 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.68 Kas dan Setara Kas**

|  | **Kas dan Setara Kas** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Kas di Bendahara Umum Daerah | | 87.507.331.198,97 | 168.816.826.752,24 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | | 10.094.043,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | 0,00 | 1.342.500,00 |
| Kas di Bendahara Umum BLUD (RSUD) | | 746.174.790,83 | 2.060.684.828,83 |
| Kas di Bendahara Puskesmas  (Dana Kapitasi JKN BPJS) | | 368.261.727,56 | 367.842.136,56 |
| Kas Lainnya - Dana BOS | | 1.125.354.820,00 | 620.124.172,00 |
| Deposito | | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | | **89.757.216.580,36** | **171.866.820.389,63** |

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp89.757.216.580,36mengalamipenurunan sebesar Rp82.109.603.809,27dibandingkan saldo Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp171.866.820.389,63.

1. **Kas di Kas Daerah**

Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di BUD selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro dan rekening kas yang dipersamakan dengan Kas Daerah. Saldo Kas di Kasda per31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp87.507.331.198,97 dan Rp168.816.826.752,24 yang disimpan dalam rekening giro bank adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.69 Kas di BUD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kas di BUD** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| Rek. No. 151.3000.001 (Rek. Non Gaji-Bank Sumsel Babel Cab. Prabumulih) | 87.507.331.198,97 | 168.816.826.752,24 |
| **Jumlah** | **87.507.331.198,97** | **168.816.826.752,24** |

1. **Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo kas di bendahara penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020dan 2019 masing-masing sebesar Rp10.094.043,00 dan Rp0,00.

1. **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung sisa kas belanja yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya pajak yang dipungut olehBendahara Pengeluaran. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00dan Rp1.342.500.

**Tabel 7.70 Kas di Bendahara Pengeluaran**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kas di Bendahara Pengeluaran** | **31 Desember 2020**  **Rp** | **31 Desember 2019**  **Rp** |
| Rek. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | 0,00 | 1.342.500,00 |
| Rek. Sekretariat Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Rek. Badan Pendapatan Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Rek. Kelurahan Sukajadi | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **0,00** | 1.342.500,00 |

Selama TA 2020 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran RSUD per 31 Desember 2019 tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah oleh bendahara pengeluaran RSUD sebagai penyetoran kembali sisa UP tahun sebelumnya dan langsung di realisasikan sebagai belanja honoraraium pegawai tanpa melalui mekanisme pertanggungjawaban ganti uang persediaan (GU)atau Tambah Uang Persediaan (TU) nihil. Terhadap pengeluaran kas di bendahara pengeluaran tersebut telah diakui sebagai belanja honorarium PNS di LRA dan Beban honorarium PNS di LO serta pengurang hutang beban pegawai di Neraca.

Rincian sisa kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

1. **Kas di BLUD (RSUD)**

Kas di BLUD (RSUD)menampung saldo kas RSUD Kota Prabumulih dalam pelaksanaan Pola Keuangan BLUD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD per31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp746.174.790,83dan Rp2.060.684.828,03, yang disimpan dalam rekening giro bank sebagai berikut.

**Tabel 7.71 Kas di BLUD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kas di BLUD (RSUD)** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| Rek. No. 151.30.20044 (Rek BLUD-Bank Sumsel Babel Cab. Prabumulih) dan Rek. No. 151.30.10207 (Rek Jamsoskes BLUD-Bank Sumsel Babel Cab. Prabumulih) | 746.174.790,83 | 2.060.684.828,83 |
| **Jumlah** | **746.174.790,83** | **2.060.684.828,83** |

1. **Kas di Bendahara Kapitasi JKN**

Kas di Bendahara Kapitasi JKN merupakan saldo pengelolaan dana kapitasi per 31 Desember 2020 pada 9 rekening FKTP/Puskesmasdi Kota Prabumulih. Saldo Kas di Bendahara Kapitasi JKN per31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp368.261.727,56dan Rp367.842.136,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.72 Rekening Dana Kapitasi JKN BPJS**

| **No.** | **Puskesmas** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Puskesmas Prabumulih Barat  Rek BSB No. 151.302.0510 | 27.607.845,00 | 27.607.845,00 |
| 2. | Puskesmas Tanjung Raman  Rek BSB No. 151.302.0449 | 79.651.453,00 | 79.651.453,00 |
| 3. | Puskesmas Pasar Prabumulih  Rek BSB No. 151.302.0483 | 52.687.710,00 | 52.677.710,00 |
| 4. | Puskesmas Tanjung Rambang  Rek BSB No. 151.302.0416 | 9.636.740,00 | 9.636.740,00 |
| 5. | Puskesmas Prabumulih Timur  Rek BSB No. 151.302.0484 | 18.223.103,00 | 18.223.103,00 |
| 6. | Puskesmas Gunung Kemala  Rek BSB No. 151.302.0415 | 19.293.785,00 | 19.293.785,00 |
| 7. | Puskesmas Sukajadi  Rek BSB No. 151.302.0438 | 15.485.837,00 | 15.485.837,00 |
| 8. | Puskesmas Cambai  Rek BSB No. 151.302.0436 | 138.106.997,56 | 137.697.540,00 |
| 9. | Puskesmas Karang Raja Delinom  Rek BSB No. 151.302.0413 | 7.568.257,00 | 7.568.123,00 |
|  | **Jumlah** | **368.261.727,56** | **367.842.136,00** |

1. **Kas Lainnya – Dana BOS**

Kas di Bendahara Bos merupakan akun yang digunakan untuk menampung sisa saldo kas pada sekolah negeri yaitu 84 SDN dan 12 SMPN yang merupakan unit kerja pada Dinas Pendidikan Nasional. Sisa dana BOS dimaksud berasal dari penerimaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Rp1.125.354.820,00dan Rp620.124.172,00. Terdapat kekurangan saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp Rp22.185.080,00 dan atas kekurangan tersebut telah disetorkan kembali ke Kas Dana Bos.

1. **Deposito**

Setara Kas - Deposito merupakan akun yang digunakan untuk menampung investasi yang segera dapat diubah menjadi tunai kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Deposito meliputi uang kas daerah pada BUD yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka waktu satu bulan di Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih, Bank Mandiri Cabang Prabumulih, dan Bank BRI Cabang Prabumulih.

Saldo deposito per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00. Per 31 Desember 2020, seluruh deposito dicairkan dan disetorkan ke rekening kas umum daerah. Hal tersebut mengacu pada Pasal 131 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerimaan bunga deposito ini diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Daerah pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

* + - * 1. **Piutang Pendapatan**

Rekening ini menggambarkan jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah atas penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima kasnya maupun tagihan lain sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019sebagai berikut.

**Tabel 7.73 Piutang Pendapatan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Piutang Pendapatan** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| Piutang Pajak Daerah | | 32.534.516.063,95 | 29.016.776.218,95 |
| Piutang Retribusi | | 2.484.955.000,00 | 2.440.020.000,00 |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | | 13.765.066.264,40 | 14.750.773.428,40 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | | 22.494.357.396,00 | 6.603.341.363,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Provinsi | | 4.543.538.914,00 | 4.756.681.395,00 |
| Piutang Transfer Lainnya | | 4.913.836.686,23 | 4.214.193.186,23 |
| **Jumlah** | | **80.736.270.324,58** | **61.781.785.591,58** |

Rincian saldo Piutang Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. **Piutang Pajak Daerah**

Piutang Pajak Daerah terjadi karena adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui OPD pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.74 Piutang Pajak Daerah**

|  | **Piutang Pajak Daerah** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Piutang Pajak Restoran | | 7.800.000,00 | 8.701.000,00 |
| Piutang Pajak Hotel | | 63.880.137,00 | 00,00 |
| Piutang Pajak Hiburan | | 0,00 | 300.000,00 |
| Piutang PPJ Non PLN (Genset) | | 305.969.844,95 | 305.969.844,95 |
| Piutang PBB-P2 | | 32.156.866.082,00 | 28.701.752.874,00 |
| Piutang Pajak Parkir | | 0,00 | 52.500,00 |
| **Jumlah** | | **32.534.516.063,95** | **29.016.776.218,95** |

1. Piutang Pajak Restoran merupakan Piutang Pajak bagian bulan April s.d Desember TA 2016 sebesar Rp7.800.000,00 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya atas 2 wajib Pajak, sebagai berikut.

**Tabel 7.75 Piutang Pajak Restoran**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama WP** | **Bulan Terhutang** | **Nilai Piutang**  **(Rp)** |
| RM Yogyakarta | Oktober – Desember 2016 | 1.500.000,00 |
| Sederhana Nurhayati | April – Desember 2016 | 6.300.000,00 |
| **Jumlah** | | **7.800.000,00** |

1. Piutang Pajak Hotel merupakan tunggakan pendapatan Pajak Hotel pada Fave Hotel Prabumulih bagian bulan November dan Desember yang sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp63.880.137,00. Atas piutang tersebut telah diterima pembayarannya pada tanggal 24 Februari 2021. Atas tunggakan pendapatan Pajak Hotel pada Fave Hotel Prabumulih bagian bulan Februari sampai dengan Oktober 2020 yang belum diterima pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp149.657.458,00 tidak dicatat sebagai piutang pendapatan tahun berjalan.
2. Piutang Pajak PPJ Non PLN (genset) merupakan Piutang Pajak PPJ Non PLN (genset) bagian bulan Januari s.d November 2015 dan April s.d. Desember 2016 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.76 Piutang PPJ Non PLN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama WP** | **Bulan Terhutang** | **Nilai Piutang**  **(Rp)** |
| PT Pertamina EP Asset 2 Prabumulih (Industri) | Januari - Juni 2015 | 130.788.293,00 |
| PT Pertamina EP Asset 2 Prabumulih (Industri) | Juli - September 2015 | 65.910.318,00 |
| PT Pertamina EP Asset 2 Prabumulih (Industri) | Oktober - November 2015 | 93.962.334,30 |
| PT Pertamina EP Asset 2 Prabumulih (RT) | Oktober - November 2015 | 14.499.799,65 |
| Bank Danamon | April - Desember 2016 | 809.100,00 |
| **Jumlah** |  | **305.969.844,95** |

Tagihan pendapatan PPJ Non PLN untuk bulan Januari s.d. September 2015 telah ditagihkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) senilai Rp393.397.215,00 melalui surat Walikota Nomor 973/076/DPPKAD/2016 tanggal 21 Februari 2016. Berdasarkan jawaban dari DJA melalui surat Nomor S-2564/AG/2016 tanggal 10 Oktober 2016, nilai pendapatan PPJ Non PLN hanya sebesar Rp196.698.603,00 dari nilai yang ditagihkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp393.397.215,00. DJA beranggapan bahwa Pertamina Kota Prabumulih menghasilkan sendiri tenaga listriknya dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 55 ayat (3) untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen), sehingga tagihan PPJ Non PLN yang diproses oleh DJA hanya sebesar Rp196.698.603,00. Terhadap kondisi tersebut Pemerintah KotaPrabumulih belum melakukan klarifikasi kembali kepada DJA atas sisa tagihan PPJ Non PLN yaitu sebesarRp196.698.611,00 yang masih dianggap piutang oleh Pemerintah Kota Prabumulih, namun telah dianggap selesai oleh DJA.

1. Piutang PBB P2 merupakan piutang TA 2020 dan tahun-tahun sebelumnya yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya. Mulai TA 2014 Pemerintah Kota Prabumulih telah mengelola sendiri PBB Sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dan telah menerima *database* piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun 2013 dari KPP Pratama Prabumulih sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-021/WPJ.03/KP.11/2014 tanggal 23 Januari 2014antara Kepala KPP Pratama Prabumulih dengan Walikota Prabumulih. Rincian Mutasi Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.77 Mutasi Piutang PBB–P2**

| **No.** | **Tahun** | **Saldo Per**  **31 Desember 2019**  **(Rp)** | **Penambahan Piutang**  **(Rp)** | **Pengurangan Piutang**  **(Rp)** | **Saldo Per**  **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | - | 6.527.523.071,00 | 2.538.507.241,00 | 3.989.015.830,00 |
| 2 | 2019 | 3.630.193.569,00 | - | 274.424.485,00 | 3.355.769.084,00 |
| 3 | 2017 | 3.073.980.183,00 | - | 95.237.453,00 | 2.978.742.730,00 |
| 4 | 2018 | 2.860.033.673,00 |  | 73.295.600,00 | 2.786.738.073,00 |
| 5 | 2016 | 2.550.580.492,00 | - | 38.580.138,00 | 2.512.000.354,00 |
| 6 | 2015 | 2.168.050.321,00 | - | 21.971.870,00 | 2.146.078.451,00 |
| 7 | 2014 | 2.410.353.126,00 | - | 7.161.273,00 | 2.403.191.853,00 |
| 8 | 2013 | 2.566.809.334,00 | - | 10.133.704,0 | 2.556.675.630,00 |
| 9 | 2012 | 1.837.160.733,00 | - | 4.907.516,00 | 1.832.253.217,00 |
| 10 | 2011 | 1.590.266.239,00 | - | 2.400.824,00 | 1.587.865.415,00 |
| 11 | 2010 | 1.629.217.743,00 | - | 1.819.013,00 | 1.627.398.730,00 |
| 12 | 2009 | 1.251.901.726,00 | - | 508.266,00 | 1.251.393.460,00 |
| 13 | 2008 | 799.307.772,00 | - | 829.452,00 | 798.478.320,00 |
| 14 | 2007 | 550.963.788,00 | - | 785.268,00 | 550.178.520,00 |
| 15 | 2006 | 371.119.608,00 | - | 145.112,00 | 370.974.496,00 |
| 16 | 2005 | 243.930.665,00 | - | 583.940,00 | 243.346.725,00 |
| 17 | 2004 | 88.573.042,00 | - | 41.528,00 | 88.531.514,00 |
| 18 | 2003 | 176.043.385,00 | - | 517.806,00 | 175.525.579,00 |
| 19 | s.d. 2002 | 903.267.475,00 | - | 559.374,00 | 902.708.101,00 |
| **Jumlah** | | **28.701.752.874,00** | **6.527.523.071,00** | **3.072.409.863,00** | **32.156.866.082,00** |

Untuk proses penghapusan atas Piutang Pajak PBB P2 yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sedang dalam proses pengajuan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

1. **Piutang Retribusi**

Piutang Retribusi terjadi karena adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui OPD pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.78Piutang Retribusi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Piutang Retribusi** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| Retribusi Pelayanan Pasar | | 160.330.000,00 | 218.895.000,00 |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | | 1.869.625.000,00 | 1.766.125.000,00 |
| Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum | | 440.000.000,00 | 440.000.000,00 |
| Retribusi Tempat Khusus Parkir | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| **Jumlah** | | **2.484.955.000,00** | **2.440.020.000,00** |

1. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar merupakan piutang retribusi kios/los Pasar Inpres I yang sampai dengan 31 Desember 2020belum diterima pembayarannya sebesar Rp160.330.000,00terdiri dari tunggakan tahun 2016 sebesar Rp31.205.000,00; tahun 2017 sebesar Rp51.730.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp77.395.000,00.
2. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan piutang retribusi sewa ruko milik Pemerintah Kota Prabumulih yang berlokasi di eks terminal Kota Prabumulih yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya sebesar Rp1.869.625.000,00 terdiri dari tunggakan tahun 2013 sebesar Rp156.125.000,00; tahun 2015 sebesar Rp256.500.000,00; tahun 2016 sebesar Rp187.500.000,00; tahun 2017 sebesar Rp477.250.000,00; tahun 2018 sebesar Rp284.250.000,00; tahun 2019 sebesar Rp46.000.000,00 dan tahun 2020 sebesar Rp462.000.000,00.
3. Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp440.000.000,00 merupakan piutang tahun 2015 berdasarkan SPK Nomor 027/416/SPK/Dishubkominfo/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 dengan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera senilai Rp660.000.000,00 dan baru diterima pembayarannya di tahun 2015 sebesar Rp220.000.000,00.
4. Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp15.000.000,00 merupakan piutang tahun 2015 berdasarkan SPK Nomor 027/035/SPK/Dishubkominfo/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 dengan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera senilai Rp20.000.000,00 dan baru diterima pembayarannya di tahun 2015 sebesar Rp5.000.000,00.
5. **Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 7.79Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

|  | **Piutang Lain-lain PAD Yang Sah** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Piutang BLUD (RSUD) | | 10.118.076.885,84 | 11.103.530.721,84 |
| Piutang Jasa Giro | | 0,00 | 253.328,00 |
| Piutang Bunga Deposito | | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | | 3.646.989.378,56 | 3.646.989.378,56 |
| **Jumlah** | | **13.765.066.264,40** | **14.750.773.428,40** |

1. Piutang BLUDper 31 Desember 2020 sebesar Rp10.118.076.885,84dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.80Piutang BLUD**

|  | **Piutang Lain-lain PAD Yang Sah** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Piutang BLUD (RSUD)** | |  |  |
| - Piutang Pelayanan Umum | | 119.468.893,00 | 314.633.810,00 |
| - Piutang Taspen | | 2.018.641,00 | 2.018.641,00 |
| - Piutang Inhealth | | 0,00 | 1.701.468,00 |
| - Piutang Jamsoskes | | 347.778.020,84 | 353.934.920,84 |
| - Piutang Jampersal | | 11.185.000,00 | 0,00 |
| - Piutang BPJS Kesehatan | | 2.973.365.597,00 | 10.393.612.100,00 |
| - Piutang BPJS Ketenagakerjaan | | 0,00 | 629.782,00 |
| Piutang Klaim Pelayanan Pasien Covid-19 | | 6.586.760.800,00 | 0,00 |
| Piutang Sewa Area Bisnis RSUD | | 77.499.934,00 | 37.000.000,00 |
| **Jumlah** | | **10.118.076.885,84** | **11.103.530.721,84** |

1. Piutang Pelayanan Umum sebesar Rp119.468.893,00 terdiri dari piutang PT Jasa Raharja tahun 2020 sebesar Rp2.633.893,00; Piutang Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD-RS) Tahun 2020 sebesar Rp111.960.000,00 danPiutang PT WASKITA tahun 2020 sebesar Rp4.875.000,00 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya.
2. Piutang Taspen sebesar Rp2.018.641,00 merupakan Piutang PT Taspen bagian bulan Maret Tahun 2016 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya.
3. Piutang Jamsoskes sebesar Rp347.778.020,84merupakan Piutang Jamsoskes tahun 2009 s.d 2019 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya.
4. Piutang Jampersal tahun 2020 sebesar Rp11.185.000,00
5. Piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp2.973.365.597,00terdiri dari Piutang Klaim BPJS bagian bulan November s.ddesember tahun 2020 sebesar Rp2.923.378.400,00 dan Piutang Klaim Ambulance dan Farmasi tahun 2020 sebesar Rp49.987.197,00 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya.
6. Piutang Klaim Pelayanan Pasien Covid-19 sebesar Rp6.586.760.800,00
7. Piutang Sewa Area Bisnis sebesar Rp77.499.934,00merupakan piutang Sewa Kantin RSUD tahun 2013 sebesar Rp6.000.000,00; tahun 2017 sebesar Rp8.500.000,00; tahun 2019 sebesar Rp10.500.000,00 dan tahun 2020 sebesar Rp12.000.000,00 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya.
8. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.646.989.378,56dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.81Piutang TGR**

|  | **Piutang TGR** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Pekerjaan di Dinas PUPR Tahun 2015 (CV.AS) | | 117.314.271,10 | 117.314.271,10 |
| Pekerjaan di Dinas PUPR Tahun 2015 (PT. TCM) | | 82.276.774,39 | 82.276.774,39 |
| Pekerjaan di Dinas Pendidikan  Tahun 2010 (CV PK) | | 328.062,47 | 328.062,47 |
| Pekerjaan di Dinas Pendidikan  Tahun 2010 (CV PKM) | | 62.817.615,29 | 62.817.615,29 |
| Pekerjaan di Dinas PU Bidang Cipta Karya Tahun 2010 | | 131.475.392,16 | 131.475.392,16 |
| Pekerjaan di Dinas PU Bidang Bina Marga Tahun 2010 | | 48.919.376,46 | 48.919.376,46 |
| Pekerjaan di Dinas PU Tahun 2012 | | 1.268.673.136,69 | 1.268.673.136,69 |
| Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Prabumulih | | 1.921.588.000,00 | 1.921.588.000,00 |
| M.Sk Um, SE,Msi | | 13.596.750,00 | 13.596.750,00 |
| **Jumlah** | | **3.646.989.378,56** | **3.646.989.378,56** |

1. Temuan audit belanja BPK Perwakilan Sumsel TA 2015 berdasarkan LHP No. 87/LHP/XVIII.PLG/12/2015 tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp8.776.318.605,69. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp4.000.000,00 pada tahun 2015, Rp6.615.967.330,57 pada tahun 2016, dan Rp2.087.008.580,48 pada tahun 2018 sehingga per 31 Desember 2020 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp199.591.045,49 dengan rincian CV PK sebesar Rp117.314.271,10 dan PT. TCM sebesar Rp82.276.774,39
2. Kekurangan volume pada paket-paket pekerjaan di tahun 2010 berdasarkan LHP BPK Perwakilan Sumsel Nomor 409/S/XVIII.PLG/12/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan telah ada surat pernyataan kesanggupan membayar dari rekanan tersebut dengan rincian sebagai berikut.
3. Kekurangan volume atas pelaksanaan dua paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan yang mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai kontrak:

CV PK sebesar Rp12.328.062,47. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp5.000.000,00 pada tahun 2010, sebesar Rp2.000.000,00 pada tahun 2011, dan sebesar Rp5.000.000,00 pada tahun 2014, sehingga per 31 Desember 2019 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp328.062,47.

CV PKM sebesar Rp68.817.615,29. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp5.000.000,00 pada tahun 2010 dan sebesar Rp1.000.000,00 pada tahun 2014, sehingga per 31 Desember 2020 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp62.817.615,29.

1. Kekurangan volume atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya yang mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp131.475.392,16. Sampai dengan 31 Desember 2020belum pernah dilakukan pembayaran atas piutang tersebut oleh rekanan.
2. Kekurangan volume atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga yang mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp58.919.376,46. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp10.000.000,00 pada tahun 2011 sehingga per 31 Desember 2020 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp48.919.376,46.
3. Kekurangan volume dan kelebihan perhitungan pekerjaan jasa konsultansi yang telah didukung dengan Surat Pernyataan Kesediaan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dan kelebihan perhitungan berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4.C/LHP/XVIII.PLG/05/2013 tanggal 13 Mei 2013. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp319.270.849,81 pada tahun 2013, Rp444.260.083,54 pada tahun 2015 dan Rp3.000.000,00 pada tahun 2016 sehingga per 31 Desember 2020 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp1.268.673.136,69.
4. Piutang pimpinan dan anggota DPRD Kota Prabumulih sebesarRp1.921.588.000,00 terdiri dari piutang atas kelebihan pembayaran TKI tahun 2006 sebesar Rp1.606.500.000,00 kelebihan pembayaran TKI tahun 2007 sebesar Rp49.480.000,00 dan kelebihan pembayaran BPOP tahun 2006 sebesar Rp265.608.000,00 berdasarkan LHP BPK Perwakilan Sumsel Nomor136.i.1/S/XVIII.PLG/05/2009 tanggal 21 Mei 2009.
5. Pada tahun 2008 terdapat piutang lainnya a.n. M.Sk Um, SE,MS.i (Mantan Sekretaris Dewan Kota Prabumulih) berupa kekurangan kas (kas tekor) pada Sekretariat DPRD Kota Prabumulih sebesar Rp23.946.750,00 berdasarkan LHP BPK Perwakilan Sumsel Nomor 136.i.2/S/XVIII.PLG/05/2009 tanggal 21 Mei 2009. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp5.250.000,00 pada tahun 2011, Rp600.000,00 pada tahun 2013, Rp1.000.000,00 pada tahun 2014, Rp1.100.000,00 pada tahun 2015,Rp1.800.000,00 pada tahun 2016, dan Rp600.000,00pada tahun 2018 sehingga per 31 Desember 2020 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp13.596.750,00.
6. **Piutang Transfer Pemerintah Pusat**

Merupakan saldo Piutang per 31 Desember 2020 dan 2019 atas alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.82Piutang Transfer Pemerintah Pusat**

| **Piutang Transfer**  **Pemerintah Pusat** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- |
| **DBH Pajak** |  |  |
| - PBB P3  - PPh Orang Pribadi  - Cukai Hasil Tembakau | 21.643.535.834,00  0,00  0,00 | 5.981.908.162,00  262.769.946,00  0,00 |
| Sub Jumlah | **21.643.535.834,00** | **6.244.678.108,00** |
| **DBH Sumber Daya Alam** |  |  |
| - Provisi Sumber Daya Hutan  - Perikanan  - Pertambangan Umum  - Pertambangan Minyak Bumi  - Pertambangan Gas Bumi  - Pertambangan Panas Bumi | 613.863.478,00  229.300.150,00  0,00  0,00  0,00  7.657.934,00 | 354.985.966,00  3.677.289,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| Sub Jumlah | **850.821.562,00** | **358.663.255,00** |
| **Jumlah** | **22.494.357.396,00** | **6.603.341.363,00** |

1. **Piutang Transfer Pemerintah Provinsi**

Merupakan saldo Piutang per 31 Desember 2020 dan 2019 atas alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.83Piutang Transfer Pemerintah Provinsi**

| **Piutang Transfer**  **Pemerintah Provinsi** | | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kurang Salur DBH Pajak Daerah Bulan Desember 2020 dan 2019** | |  |  | SK Gub No. 62/KPTS/BPKAD/2021  Tgl.26 Januari 2021 |
| - | Pajak Kendaraan Bermotor | 1.424.226.895,00 | 1.065.667.279,00 |  |
| - | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 1.202.720.643,00 | 1.349.514.482,00 |  |
| - | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) | 1.903.128.317,00 | 2.320.101.340,00 |  |
| - | Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan | 13.425.585,00 | 14.338.931,00 |  |
| - | Pajak Kendaraan di Atas Air | 37.474,00 | 174.738,00 |  |
| - | Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air | 0,00 | 20.788,00 |  |
| - | Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat | 0,00 | 4.182.465,00 |  |
|  | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat | 0,00 | 2.681.372,00 |  |
| **Jumlah** | | **4.543.538.914,00,00** | **4.756.681.395,00** |  |

1. **Piutang Transfer Lainnya**

Piutang Transfer Lainnya sebesar Rp4.913.836.686,23 merupakan kurang bayar dana sharing bantuan keuangan berobat gratis Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil Berita Acara Rekonsiliasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp4.214.193.186,23 dan PiutangPremi Jamkesda PBI APBD Prov. Sumsel di Kota Prabumulih Rp699.643.500,00

* + - * 1. **Piutang Lainnya**

Rekening ini menggambarkan jumlah piutang lainnya yang dimiliki pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

**Tabel 7.84Piutang Lainnya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Piutang Lainnya** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| Piutang Pegawai | | 338.865.604,00 | 374.323.445,00 |
| Piutang Lain-lainnya | | 3.989.875,00 | 3.989.875,00 |
| **Jumlah** | | **342.855.479,00** | **378.313.320,00** |

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. **Piutang Pegawai**

Piutang Pegawai sebesar Rp338.823.445,00merupakan hasil verifikasi Inspektorat Kota Prabumulih, kelebihan pembayaran gaji pensiunan PNS Kota Prabumulihdan Kurang Setor Iuran IWP Pegawai Dinas PUPRsebagai berikut.

**Tabel 7.85Piutang Pegawai**

|  | **Piutang Pegawai** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Pensiunan PNS Dinas Pendidikan 2018 | | 97.750.000,00 | 112.750.000,00 |
| Pensiunan PNS Dinas Pendidikan 2014 | | 94.073.445,00 | 113.573.445,00 |
| Pensiunan PNS RSUD 2019 | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Dr. H. A. I pada RSUD (BLUD) | | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 |
| Pensiunan PNS pada Kec. Prabumulih Timur | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| Piutang Iuran IWP Dinas PUPR | | 42.159,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | | **338.865.604,00** | **374.323.445,00** |

1. Piutang pensiunan PNS pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2020sebesar Rp97.750.000,00dan Rp94.073.445,00 merupakan piutang tahun 2017 dan 2014atas kelebihan pembayaran gaji semasa aktif menjadi PNS dan atas piutang tersebut akan dilakukan pemotongan atas hak pensiunnya setiap bulan oleh PT Taspen.
2. Piutang pegawai RSUD (BLUD) a.n. Dr. H. A. I. sebesar Rp265.000.000,00 merupakan piutang untuk keperluan penyelesaian kasus/pengaduan pada RSUD berdasarkan laporan hasil verifikasi Inspektorat Kota Prabumulih Nomor 700/338/Inspektorat/2011 tanggal 9 September 2011. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp125.000.000,00 pada tahun 2013, sehingga per 31 Desember 2020 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp140.000.000,00.
3. Piutang pensiunan 1 orang PNS pada Kecamatan Prabumulih Timur per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.000.000,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji PNS yang meninggal dunia dan atas piutang tersebutdalam proses pengajuan tuntutan ganti kerugian uang daerah.
4. Piutang Iuran IWP sebesar Rp42.159,00 merupakan kekurangan potongan IWP atas SPM Gaji dan Tunjangan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang bagian Bulan Oktober 2020.
5. **Piutang Lain-Lainnya**

Piutang Lain-Lainnya sebesar Rp3.989.875,00 merupakan sisa hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan atas LKPD Pemerintah Kota Prabumulih TA 2017 yang belum ditindaklanjuti berupa kelebihan pembayaran TPP pada Dinas PUPR.

* + - * 1. **Penyisihan Piutang**

Nilai Penyisihan Piutang Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp25.362.971.642,77 dan Rp22.839.028.328,12merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya, tidak termasuk Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi sebagai berikut.

**Tabel 7.86Penyisihan Piutang Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Piutang** | **Piutang Bruto (Rp)** | **Penyisihan (Rp)** | **Piutang Netto (Rp)** |
| **Piutang Pendapatan** |  |  |  |
| - Piutang Pajak Daerah | 32.470.635.926,95 | 18.921.211.182,03 | 13.549.424.744,93 |
| - Piutang Retribusi | 2.484.955.000,00 | 2.253.955.000,00 | 231.000.000,00 |
| - Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 13.765.066.264,40 | 4.037.851.406,02 | 9.727.214.858,38 |
| - Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 22.494.357.396,00 | 0,00 | 22.494.357.396,00 |
| - Piutang Transfer Pemerintah Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Piutang Transfer Lainnya | 4.913.836.686,23 | 0,00 | 4.913.836.686,23 |
| Sub Jumlah | **76.128.851.273,58** | **25.213.017.588,04** | **50.915.833.685,54** |
| **Piutang Lainnya** |  |  |  |
| - Piutang Pegawai | 338.823.445,00 | 147.959.117,23 | 190.864.327,78 |
| - Piutang Lain-lainnya | 3.989.875,00 | 1.994.937,50 | 1.994.937,50 |
| Sub Jumlah | **342.813.320,00** | **149.954.054,73** | **192.859.265,28** |
| **Jumlah** | **76.471.664.593,58** | **25.362.971.642,77** | **51.108.692.950,81** |

* + - * 1. **Beban Dibayar di**

Rincian klasifikasi Penyisihan Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran4, 5, 6, dan 7.**

1. **Beban Dibayar di Muka**

Beban Dibayar di Muka merupakan pengeluaran biaya yang telah dibayarkan pada tahun berjalan atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada tahun berjalan dan masih memiliki manfaat bagi pemerintah daerah.

Saldo Beban Dibayar di Muka Tahun 2020 dan 2019 merupakan pembebanan lebih dulu biaya premi asuransi kendaraan bermotordan asuransi kebakaran pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagai berikut.

**Tabel 7.87 Beban Dibayar Dimuka**

|  | **Belanja Dibayar Dimuka** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Premi Asuransi Kendaraan Bermotor | | 19.914.466,67 | 262.313.897,50 |
| Premi Asuransi Kebakaran | | 20.535.544,33 | 174.190.872,07 |
| **Jumlah** | | **40.450.011,00** | **436.504.769,57** |

Rincian perhitungan saldo Beban Dibayar di Muka dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

1. **Persediaan**

Persediaan menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan/atau pihak ketiga. Saldo persediaan per31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.88Persediaan**

| **Persediaan** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- |
| Alat Tulis Kantor | 512.782.932,00 | 106.108.439,00 |
| Alat Listrik dan Elektronika | 8.342.750,00 | 3.741.450,00 |
| Prangko, Materai dan Benda Pos | 5.070.000,00 | 3.729.000,00 |
| Peralatan Kebersihan | 47.425.202,00 | 20.527.850,00 |
| Bibit Ternak | 81.406.340,00 | 104.076.154,00 |
| Bahan Bangunan | 15.321.500,00 | 4.693.950,00 |
| Obat-Obatan | 11.179.920.998,63 | 7.386.323.228,89 |
| Bahan Kimia | 280.085.93  8,00 | 503.748.913,00 |
| Suku Cadang Sarana Mobilitas Darat | 510.000,00 | 82.325.000,00 |
| Bahan Cetakan | 290.105.412,00 | 608.877.491,00 |
| Makanan dan Minuman | 374.459.413,00 | 382.658.736,00 |
| Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | 2.838.766.549,55 | 27.180.093.643,55 |
| **Jumlah** | **15.634.197.035,18** | **36.386.903.855,44** |

Penyajian nilai saldo Persediaan akhir tahun di dalam Neraca berdasarkan atas Laporan Persediaan per 31 Desember tahun berkenaan dari setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.634.197.035,18 mengalami penurunan sebesar Rp20.752.706.820,26atau 57,03% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp36.386.903.855,44.

Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.634.197.035,18 per jenis barang sebagai berikut.

1. **Alat Tulis Kantor**

Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) per 31 Desember 2020 senilai Rp. 512.782.932,00merupakan persediaan Alat Tulis Kantor pada 37 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

1. **Alat Listrik dan Elektronika**

Persediaan Alat Listrik dan Elektronika per 31 Desember 2020 senilai Rp8.342.750,00merupakan persediaan Alat Listrik pada 9 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

1. **Prangko, Materai dan Benda Pos**

Persediaan Prangko, Materai dan Benda Pos per 31 Desember 2020 senilai Rp5.070.000,00merupakan persediaan Prangko, Materai dan Benda Pos pada 9 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

1. **Peralatan Kebersihan**

Persediaan Peralatan Kebersihan per 31 Desember 2020 senilai Rp47.425.202,00merupakan persediaan Peralatan Kebersihan pada 17 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

1. **Bibit Ternak**

Persediaan Bibit dan Pakan Ternak per 31 Desember 2020 senilai Rp81.406.340,00seluruhnya merupakan persediaan Bibit Ternak di Dinas Pertanian Kota Prabumulih.

1. **Bahan Bangunan**

Persediaan Bahan Bangunan per 31 Desember 2020 senilai Rp15.321.500,00seluruhnya merupakan persediaan Bahan Bangunan di RSUD Kota Prabumulih.

1. **Obat-obatan**

Persediaan Obat-obatan per 31 Desember 2020 senilai Rp11.179.920.998,63merupakan persediaan Obat-obatan di Dinas Kesehatan senilai Rp6.242.339.497,84; RSUD senilai Rp3.574.726.037,79;Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp45.839.972,00 Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp1.151.299.503,00dan Dinas Pertanian senilai Rp165.715.988,00.

1. **Bahan Kimia**

Persediaan Bahan Kimia per 31 Desember 2020 senilai Rp280.085.938,00merupakan persediaan Bahan Kimia di Dinas Kesehatan senilai Rp243.409.472,00; dan Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp36.676.466,00.

1. **Suku Cadang Sarana Mobilitas Darat**

Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas Darat per 31 Desember 2020 senilai Rp510.000,00seluruhnya merupakan persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas Darat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1. **Bahan Cetakan**

Persediaan Bahan Cetakan per 31 Desember 2020 senilai Rp290.105.412,00merupakan persediaan bahan cetakan pada 26 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

1. **Makanan dan Minuman**

Persediaan Makanan dan Minuman per 31 Desember 2020 senilai Rp374.459.413,00merupakan persediaan makanan dan minuman pasiendi RSUD senilai Rp345.091.488,00 dan Dinas Kesehatan senilai Rp29.367.925,00.

1. **Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat**

Persediaan Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 senilai Rp. 2.838.766.549,55 merupakan persediaan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp. 1.935.000.000,00;Dinas Sosial senilai Rp582.061.557,00 dan Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp321.704.992,55.

Persediaan Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp. 1.935.000.000,00merupakan Pekerjaan pembangunan fisik pada Tahun 2019 sebanyak 1 kegiatan dan belum dilakukan serah terima kepada masyarakat serta belum didukung dengan NPHD dan BAST.

Daftar persediaan per 31 Desember 2020 per jenis persediaan per OPD tersaji pada **Lampiran 9**.

1. **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksudmendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih pada BUMD dan investasi permanen lainnya. Pemerintah Kota Prabumulih memiliki Investasi Jangka Panjang yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp67.487.436.703,25 dan Rp72.123.157.559,01 dan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.89Investasi Jangka Panjang Permanen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Penyertaan Modal pada BUMD** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| 1 | PT Bank Sumsel Babel | 19.000.000.000,00 | 19.000.000.000,00 |
| 2 | PDAM Tirta Prabujaya | 43.771.322.180,75 | 49.502.703.270,01 |
| 3 | PD Petro Prabu | 4.716.114.522,50 | 3.620.454.289,00 |
|  | **Jumlah** | **67.487.436.703,25** | **72.123.157.559,01** |

Rincian nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kota Prabumulih sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran10**.

1. **Penyertaan Modal pada PT Bank Sumsel Babel**

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih pada PT Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2020 dan 2019masing-masing sebesar Rp19.000.000.000,00.

Pada TA 2020 tidak ada penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih di PT Bank Sumsel Babel, sehingga per 31 Desember 2020dan 2019 total penyertaan saham pada PT Bank Sumsel Babel adalah sebesar Rp19.000.000.000,00 yang terdiri dari modal disetor sebesar Rp13.379.000.000,00 nilai agio saham sebesar Rp5.620.066.000,00 dan sisa setoran sebagai titipan Penyertaan Modal saham sebesar Rp934.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.90 Penyertaan Saham Pemkot Prabumulih pada Bank Sumsel Babel**

|  |  |  | **Dicatat Sebagai** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Setoran** | **Lembar** | **Modal Disetor** | **Agio Saham** | **Sisa Setoran** |
|  | **(Rp)** | **Saham** | **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| 2003 | 1.000.000.000,00 | 1.000 | 1.000.000.000,00 | - | - |
| 2005 | 1.000.000.000,00 | 687 | 687.000.000,00 | 311.898.000,00 | 1.102.000,00 |
| 2007 | 2.000.000.000,00 | 1.376 | 1.376.000.000,00 | 624.704.000,00 | (704.000,00) |
| 2012 | 2.000.000.000,00 | 1.375 | 1.375.000.000,00 | 624.250.000,00 | 750.000,00 |
| 2013 | 2.000.000.000,00 | 1.376 | 1.376.000.000,00 | 624.704.000,00 | (704.000,00) |
| 2014 | 3.000.000.000,00 | 2.063 | 2.063.000.000,00 | 936.602.000,00 | 398.000,00 |
| 2015 | 2.000.000.000,00 | 1.376 | 1.376.000.000,00 | 624.704.000,00 | (704.000,00) |
| 2018 | 3.000.000.000,00 | 2.063 | 2.063.000.000,00 | 936.602.000,00 | 398.000,00 |
| 2019 | 3.000.000.000,00 | 2.063 | 2.063.000.000,00 | 936.602.000,00 | 398.000,00 |
| **Jumlah** | **19.000.000.000,00** | **13.379** | **13.379.000.000,00** | **5.620.066.000,00** | **934.000,00** |

1. **Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Prabujaya**

Pengakuan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih pada PDAM Tirta Prabujaya menggunakan metode ekuitas. Dengan persentase kepemilikan tahun 2020 dan 2019masing-masing sebesar 75,44%, saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih dipengaruhi oleh laba/(rugi) PDAM Tirta Prabujaya.

Pada TA 2020 tidak ada penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih di PDAM Tirta Prabujaya, sehingga per 31 Desember 2020dan 2019 nilai Penyertaan Modal Disetor Pemerintah Kota Prabumulih pada PDAM Tirta Prabujaya masing-masing sebesar Rp83.057.470.305,00.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Prabujaya Tahun 2020, nilai penyertaan modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota Prabumulih yang Belum Ditetapkan Statusnya masing-masing sebesar Rp38.146.976.275,00; Rp1.049.306.500,00 dan Rp37.353.642.613,00.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp37.353.642.613,00 merupakan aset hasil pengadaan TA 2002 s.d. 2012 yang digunakan untuk operasional PDAM Tirta Prabujaya. Atas aset tersebut, sudah disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pemerintah Kota Prabumulih kepada PDAM Tirta Prabujaya, namun belum diusulkan untuk dibuatkan Peraturan Daerah yang menetapkan statusnya sebagai penyertaan modal pada PDAM Tirta Prabujaya. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2019 hanya mengatur tentang penyertaan modal dalam bentuk uang, sedangkan penyertaan modal yang berbentuk aset belum diatur.

Selain itu, terdapat aset yang masih tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun telah dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Prabujaya sejak selesainya pekerjaan pengadaan. Sampai saat ini belum dibuatkan Berita Acara Serah Terima atas asset tersebut, yaitu instalasi perpipaan distribusi di Kelurahan Sukarajo hasil pengadaan belanja modal TA 2008 sebesar Rp1.619.482.000,00 dan instalasi PDAM di Gunung Ibul hasil pengadaan belanja modal TA 2016 sebesar Rp1.564.207.000,00. Atas aset tersebut belum diakui dan disajikan dalam Laporan keuangan PDAM.

Perhitungan komposisi modal PDAM Tirta Prabujaya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.91Komposisi Modal PDAM Tirta Prabujaya**

**Per 31 Desember 2020 dan 2019**

| **No.** | **Komposisi Modal** | **31 Desember 2020** | | **31 Desember 2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rp** | **%** | **Rp** | **%** |
| 1 | Pemerintah Kota Prabumulih |  |  |  |  |
|  | Pelimpahan Kab Muara Enim |  |  |  |  |
|  | Tahun 1996 | 4.769.256.042,00 |  | 4.769.256.042,00 |  |
|  | Tahun 2001 | 1.368.771.439,00 |  | 1.368.771.439,00 |  |
|  | **Jumlah (a)** | **6.138.027.481,00** |  | **6.138.027.481,00** |  |
|  | Penyertaan modal tahun 2003 | 993.461.000,00 |  | 993.461.000,00 |  |
|  | Penyertaan modal tahun 2004 | 1.046.136.500,00 |  | 1.046.136.500,00 |  |
|  | Penyertaan modal tahun 2005 | 413.957.324,00 |  | 413.957.324,00 |  |
|  | Penyertaan modal tahun 2012 | 200.000.000,00 |  | 200.000.000,00 |  |
|  | Penyertaan modal tahun 2013 | 19.750.000.000,00 |  | 19.750.000.000,00 |  |
|  | Penyertaan modal tahun 2014 | 5.000.000.000,00 |  | 5.000.000.000,00 |  |
|  | Penyertaan modal tahun 2015 | 32.811.888.000,00 |  | 32.811.888.000,00 |  |
|  | Penyertaan modal tahun 2016 | 8.997.000.000,00 |  | 8.997.000.000,00 |  |
|  | Penyertaan modal tahun 2018 | 6.000.000.000,00 |  | 6.000.000.000,00 |  |
|  | Penyertaan modal tahun 2019 | 1.707.000.000,00 |  | 1.707.000.000,00 |  |
|  | **Jumlah (b)** | **76.919.442.824,00** |  | **76.919.442.824,00** |  |
|  | **Jumlah (a) + (b)** | **83.057.470.305,00** | **52,04** | **83.057.470.305,00** | **52,04** |
| 2 | Pemerintah Kota Prabumulih  yang belum ditetapkan statusnya | **37.353.642.613,00** | **23,40** | **37.353.642.613,00** | **23,40** |
| 3 | Pemerintah Provinsi Sumsel  yang belum ditetapkan statusnya | **1.049.306.500,00** | **0,66** | **1.049.306.500,00** | **0,66** |
| 4 | Pemerintah Pusat  yang belum ditetapkan statusnya | **38.146.976.275,00** | **23,90** | **38.146.976.275,00** | **23,90** |
|  | **Jumlah Penyertaan (1+2+3+4)** | **159.607.395.693,00** | **100,00** | **159.607.395.693,00** | **100,00** |

Berdasarkan Laporan Keuangan (*audited*) tahun 2019 terdapat koreksi kekurangan nilai kerugian PDAM Tirta Prabujaya tahun 2019 sebesar Rp780.658.409,00 sehingga terdapat koreksi kekurangan perhitungan proporsi rugi tahun 2019 yang harus diakui Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp588.928.703,75.

Pada tahun 2020, PDAM Tirta Prabujaya mengalami kerugian sebesarRp6.816.612.388,00 dan proporsi rugi yang mengurangi nilai investasi pemda sebesar Rp5.142.452.385,51sehingga saldo Penyertaan Modal (*netto*) Pemerintah Kota Prabumulih pada PDAM Tirta Prabujaya per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp43.771.322.180,75dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 7.92Nilai Penyertaan Modal Pemkot Prabumulih**

**pada PDAM Tirta Prabujaya per 31 Desember 2020 dan 2019**

| **No.** | **Perhitungan Penyertaan**  **Pemkot Prabumulih** | **31 Desember 2020**  **Rp** | **31 Desember 2019**  **Rp** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Saldo Awal Penyertaan (Netto)** | **49.502.703.270,01** | **51.523.547.792,60** |
|  | Ditambah/dikurangi: |  |  |
| 1. | Tambahan penyertaan modal :  Tahun 2020 dan 2019 | 0,00 | 1.707.000.000,00 |
| 2. | Pengurangan penyertaan akibat Proporsi Rugi :  Tahun 2019 (Unaudited)  75,44% x Rp5.016.372.746,00  Tahun 2020 (Unaudited)  75,44% x Rp6.816.612.388,00 | (5.142.452.385,51) | (3.784.351.599,58) |
| 3. | Koreksi kelebihan (2018) dan kekurangan (2019) perhitungan Proporsi Rugi :  Tahun 2018 (Audited)  75,18% x (Rp5.426.822.337,00 – Rp5.351.659.957,00)  Tahun 2019 (Audited)  75,44% x (Rp5.797.031.155,00 – Rp5.016.372.746,00) | (588.928.703,75) | 56.507.077,00 |
|  | **Nilai Penyertaan (Netto)** | **43.771.322.180,75** | **49.502.703.270,01** |

1. **Penyertaan Modal pada PD Petro Prabu**

Perusahaan Daerah Petro Prabu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 dan baru dimulai tahapan pendiriannya pada Tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012, bergerak dalam bidang usaha penyaluran gas alam dari PT Pertagas Niaga ke rumah tangga di Kota Prabumulih.

Nilai Penyertaan Modal awal Pemerintah Kota Prabumulih pada PD Petro Prabu di Tahun 2012 adalah sebesar Rp500.000.000,00 dan tidak terdapat penambahan Penyertaan Modal sampai dengan 31 Desember 2019.

Berdasarkan Laporan Reviu oleh Perwakilan BPKP Sumsel (Laporan No. LR-498/PW07/4/2018 tanggal 24 Oktober 2018) atas Laporan Keuangan PD Petro Prabu Tahun 2016, nilai Ekuitas PD Petro Prabu per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp136.105.552,00 sehingga terdapat koreksi kekurangan perhitungan kerugian yang harus diakui Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp339.847.561,00.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan 2019, PD Petro Prabu meraih laba masing-masing sebesar Rp744.960.233,50 dan Rp1.220.480.026,00 (setelah koreksi) sehingga nilai Penyertaan Modal (*netto*) Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2020 dan 2019 menjadi sebesar Rp4.716.114.522,50 dan Rp3.620.454.289,00.

**Tabel 7.93Nilai Penyertaan Modal Pemkot Prabumulih**

**pada PD Petro Prabu per 31 Desember 2020 dan 2019**

| **No.** | **Komposisi Modal** | **31 Desember 2020** | **31 Desember 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Pemerintah Kota Prabumulih |  |  |
|  | Penyertaan modal tahun 2012 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| 2. | Ditambah/(Dikurangi): |  |  |
|  | - Kerugian s.d. tahun 2016 | (24.046.887,00) | (24.046.887,00) |
|  | - Koreksi kekurangan perhitungan kerugian s.d. tahun 2016 (Laporan Reviu BPKP) | (339.847.561,00) | (339.847.561,00) |
|  | - Laba tahun 2017 | 1.294.891.068,00 | 1.294.891.068,00 |
|  | - Laba tahun 2018 | 1.319.677.643,00 | 1.319.677.643,00 |
|  | - Laba tahun 2019 | 869.780.026,00 | 869.780.026,00 |
|  | - Koreksi Laba tahun 2019 | 350.700.000,00 | - |
|  | - Laba tahun 2020 | 744.960.233,50 | - |
|  | **Jumlah Penyertaan** | **4.716.114.522,50** | **3.620.454.289,00** |

1. **Aset Tetap**

Aset Tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Prabumulihper 31 Desember 2020 dan 2019 dicatat berdasarkan nilai perolehan. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau Belanja Lainnya yang di dalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.94Aset Tetap**

| **Aset Tetap** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- |
| Tanah | 623.415.161.111,00 | 622.211.199.111,00 |
| Peralatan dan Mesin | 355.786.501.877,09 | 334.945.530.630,12 |
| Gedung dan Bangunan | 891.057.142.065,09 | 860.849.264.231,05 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 2.115.553.122.651,33 | 1.988.057.457.398,34 |
| Aset Tetap Lainnya | 30.994.280.421,61 | 29.831.118.274,11 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 47.201.469.715,59 | 46.411.292.715,59 |
| Akumulasi Penyusutan | (1.695.113.783.028,00) | (1.714.835.809.477,75) |
| Jumlah | **2.368.893.894.813,71** | **2.167.470.052.882,46** |

Mutasi aset tetap Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

Nilai Aset Tetap setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020adalah sebesar Rp**2.368.893.894.813,71**dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.167.470.052.882,46mengalami peningkatan sebesar Rp201.423.841.931,25

Penambahan nilai Aset Tetap Tahun 2020 sebesar Rp243.786.939.724,40 sebagai berikut.

1. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp219.977.220.956,66;
2. Administrasi proyek dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan Aset Tetap sebesar Rp14.506.993.782,74;
3. Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi batasan kapitalisasi sebesar Rp957.390.000,00;
4. Aset Tetap yang bersumber dari Belanja BOS sebesar Rp1.590.516.193,00
5. Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6.754.818.792,00;

Pengurangan nilai Aset Tetap tahun 2020 sebesar Rp60.781.757.871,11sebagai berikut.

1. Belanja Modal yang nilainya dibawah ketentuan batasan kapitalisasi dan dicatat ekstrakomptabel sebesar Rp2.688.578.707,00;
2. Koreksi Kurang mapping kodefikasi aset sebesar Rp6.254.903.501,03
3. Reklasifikasi ke Aset Lain-Lainsebesar Rp49.049.444.540,54;
4. Hibah Aset Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jala, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.626.846.005,00;
5. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp647.322.142,54;
6. Pengurangan Utang Pengadaan Aset Tetap sebesar Rp514.662.975,00
7. Temuan Audit kurang volume TA 2020 sebesar Rp1.303.366.371,79
8. **Tanah**

Aset Tetap tanah per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp622.211.199.111,00.

Selama tahun anggaran berjalan terjadi mutasi penambahan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.203.962.000,00 sebagai berikut.

1. Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp922.500.000,00 sebagai berikut.

**Tabel 7.95 Penambahan Tanah**

| **No.** | **Luas**  **M2** | **Uraian** | **Nilai**  **Rp** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | Pengadaan Tanah untuk *Fly Over* diKel. Patih Galung | 152.000.000,00 |
| 2 | 10.181,75 | Pengadaan Tanah untuk Bangunan Sekolahdi Kel. Anak Petai | 254.500.000,00 |
| 3 | 2.055 | Pengadaan Tanah untuk Bangunan Sekolah di Kel. Sungai Medang | 80.000.000,00 |
| 4 | 18.321 | Pengadaan Tanah untuk Bangunan Sekolah di Kel. Sungai Medang | 420.000.000,00 |
| 5 |  | Pembersihan lahan/*Land Clearing* Tanah | 16.000.000,00 |
|  |  | **Jumlah** | **922.500.000,00** |

1. Administrasi proyek dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan Aset Tetap Tanah sebesar Rp281.462.000,00.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp623.415.161.111,00 (Rp622.211.199.111,00+ Rp1.203.962.000,00).

Atas saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 terdapat satu bidang Tanah yang sedang dalam sengketa di pengadilan yaitu Tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman – Kelurahan Muara Dua, seluas 2.700 m2 senilai Rp1.001.000.000,00 yang digunakan untuk bangunan SDN 6 dan SDN 24 Kota Prabumulih. Tanah Tersebut diperoleh pada tahun 2004 dan tercatat di KIB A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat ini, tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama pemkot Prabumulih.

1. **Peralatan dan Mesin**

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp334.945.530.630,12. Selama tahun anggaran berjalan terjadi mutasi berupa penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp33.943.006.759,00 sebagai berikut.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.994.461.126,00 dan administrasi proyek sebesar Rp1.011.756.440,00.
2. Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi batasan kapitalisasi sebesar Rp195.930.000,00.
3. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari belanjaDana BOS Rp1.564.836.293,00
4. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah Kementerian Perhubungan Rp1.077.150.000,00
5. Mutasi masuk antar KIB sebesar Rp1.098.872.900,00.

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin adalah sebesar Rp13.102.035.512,03 sebagai berikut.

1. Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang nilainya di bawah ketentuan batasan kapitalisasi dan dicatat secara ekstrakomptabel sebesar Rp2.437.173.131,00;
2. Mutasi Keluar antar KIBsebesar Rp182.240.000,00;
3. Reklasifikasi ke Aset Lain-Lainsebesar Rp4.927.737.253,31;
4. Penghapusan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp647.322.142,54.
5. Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp500.907.182,00.
6. Koreksi Aset Ektrakompatabel yang dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp4.406.655.803,18.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp355.786.501.877,09(334.945.530.630,12+Rp33.943.006.759,00–13.102.035.512,03).

Atas saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Masih terdapat Aset Tetap yang diperoleh dari pengadaan melalui Belanja Modal pada beberapa tahun dibawah tahun 2016 yang dipergunakan dan dikuasai oleh beberapa sekolah swasta sebesar Rp3.964.879.804,27;
2. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Prabumulih telah menyerahkan pengelolaan dan Aset Tetap pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai realisasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa manajemen atau pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah provinsi.

Atas hal ini Pemerintah Kota Prabumulih telah melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Berita Acara Rekonsiliasi Sarana dan Prasarana Pengalihan Aset P3D Kota Prabumulih tanggal 11 Oktober 2017 yang didalamnya telah termasuk Aset Tetap yang dulu tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp49.874.964.952,94 berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan.

Namun masih terdapat aset tetap SMA, SMK serta SLB yang masih tercatat pada KIB B Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.213.230.632,61.

1. **Gedung dan Bangunan**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp860.849.264.231,05. Selama tahun anggaran berjalan terjadi mutasi berupa penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp40.128.654.877,40sebagai berikut.

1. Belanja modal gedung dan bangunan Rp32.876.933.009,00 dan administrasi proyek sebesar Rp1.796.588.076,40.
2. Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi batasan kapitalisasi sebesar Rp59.460.000,00.
3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari belanja Dana BOS Rp6.700.000,00.
4. Mutasi masuk antar KIB sebesar Rp182.240.000,00.
5. Aset Tetap gedung dan bangunan yang berasal dari Hibah Kementerian PUPR sebesar Rp5.206.733.792,00.

Sedangkan pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp9.920.777.043,36 sebagai berikut.

1. Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang nilainya dibawah ketentuan batasan kapitalisasi dan dicatat pada ekstrakomptabel sebesar Rp172.922.829,00.
2. Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp930.000.000,00
3. Pengurangan Utang Pengadaan Aset Tetap sebesar Rp22.567.248,00
4. Koreksi Aset Ektrakompatabel yang dicatat sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.420.195.955,68.
5. Reklasifikasi Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sebesar Rp420.898.400,00
6. Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sekolah Swasta yang masih tercatat di Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.670.600.726,41
7. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas Aset Tetap SMA, SMK dan SLB yang belum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.200.135.763,32.
8. Koreksi atas temuan pemeriksaan kurang volume TA 2020 sebesar Rp83.456.120,95

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp891.057.142.065,09(Rp860.849.264.231,05+ Rp40.128.654.877,40- Rp9.920.777.043,36).

Atas saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Masih terdapat Aset Tetap yang diperoleh dari pengadaan melalui belanja modal pada beberapa tahun dibawah tahun 2016 yang dipergunakan dan dikuasai oleh beberapa sekolah swasta sebesar Rp5.260.104.926,41;
2. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Prabumulih telah menyerahkan pengelolaan dan aset tetap pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai realisasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa manajemen atau pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah provinsi.

Atas hal ini Pemerintah Kota Prabumulih telah melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Berita Acara Rekonsiliasi Sarana dan Prasarana Pengalihan Aset P3D Kota Prabumulih tanggal 11 Oktober 2019 yang didalamnya telah termasuk aset tetap yang dulu tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp49.874.964.952,94 berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan.

Namun masih terdapat Aset Tetap SMA, SMK serta SLB yang masih tercatat pada KIB B Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp900.624.764,00.

1. **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp1.988.057.457.398,34. Selama tahun anggaran berjalan terjadi mutasi berupa penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp165.676.876.319,00 sebagai berikut.

1. Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp153.925.356.066,66 dan administrasi proyek sebesar Rp11.278.879.252,34.
2. Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang bersumber dari belanja Dana BOS Rp1.706.000,00.
3. Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Hibah Kementerian ESDM sebesar Rp470.935.000,00.

Sedangkan pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebesar Rp38.181.211.066,01sebagai berikut.

1. Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang nilainya dibawah ketentuan batasan kapitalisasi dan dicatat ekstrakomptabel sebesar Rp78.482.747,00.
2. Koreksi Aset Ektrakompatabel yang dicatat sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp428.051.742,17
3. Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp35.888.420.600,00
4. Hibah Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp74.249.999,00
5. Pengurangan Utang Pengadaan Aset Tetap sebesar Rp492.095.727,00
6. Koreksi atas temuan pemeriksaan kurang volume TA 2020 sebesar Rp1.219.910.250,84

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.115.553.122.651,33 (Rp1.988.057.457.398,34 +Rp165.672.333.819,00 –Rp38.181.211.066,01)

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Prabumulih telah menyerahkan pengelolaan dan aset tetap pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai realisasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa manajemen atau pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah provinsi.

Atas hal ini Pemerintah Kota Prabumulih telah melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Berita Acara Rekonsiliasi Sarana dan Prasarana Pengalihan Aset P3D Kota Prabumulih tanggal 11 Oktober 2019 yang didalamnya telah termasuk Aset Tetap yang dulu tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp49.874.964.952,94 berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan.

Namun masih terdapat Aset Tetap SMA, SMK serta SLB yang masih tercatat pada KIB D Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp898.020.000,00.

1. **Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp29.831.118.274,11. Selama tahun anggaran berjalan terjadi mutasi berupa penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya.

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp3.325.375.669,00 sebagai berikut.

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.257.970.755,00 dan administrasi proyek sebesar Rp50.131.014,00.
2. Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari belanja Dana BOS Rp17.273.900,00

Sedangkan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp2.162.213.521,50sebagai berikut.

1. Hibah aset tetap lainnya ke Sekolah Swasta di Prabumulihsebesar Rp121.688.824,00.
2. Reklasifikasi Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sebesar Rp677.974.500,00
3. Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp1.362.550.197,50

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp33.994.280.421,61 (Rp29.831.118.274,11+ Rp3.325.375.669,00 - Rp2.162.213.521,50).

Atas saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Masih terdapat Aset Tetap yang diperoleh dari pengadaan melalui belanja modal pada beberapa tahun dibawah tahun 2016 yang dipergunakan dan dikuasai oleh beberapa sekolah swasta sebesar Rp867.421.767,74;
2. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Prabumulih telah menyerahkan pengelolaan dan aset tetap pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai realisasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa manajemen atau pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah provinsi.

Atas hal ini Pemerintah Kota Prabumulih telah melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Berita Acara Rekonsiliasi Sarana dan Prasarana Pengalihan Aset P3D Kota Prabumulih tanggal 11 Oktober 2019 yang didalamnya telah termasuk Aset Tetap yang dulu tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp49.874.964.952,94 berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan.

Namun masih terdapat Aset Tetap SMA, SMK serta SLB yang masih tercatat pada KIB E Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp495.128.429,76.

1. **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp46.411.292.715,59. Selama tahun anggaran berjalan terjadi mutasi masuk antar KIB dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp702.000.000,00 dan Administrasi Proyek Sebesar Rp88.177.000,00.

Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp47.201.469.715,59 (Rp46.411.292.715,59 + Rp702.000.000,00 + Rp88.177.000,00).

1. **Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan Aset Tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tersebut diperoleh. Akumulasi Penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.

Perhitungan Akumulasi Penyusutan dan nilai buku aset tetap per31 Desember 2020 pada tabel berikut.

**Tabel 7.96 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

| **Aset Tetap** | **Nilai**  **Aset Tetap** | **Akumulasi Penyusutan**  **Per 31 Des 2020** | **Nilai Buku**  **Per 31 Des 2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanah | 623.415.161.111,00 | 0,00 | 623.415.161.111,00 |
| Peralatan dan Mesin | 355.786.501.877,09 | (260.739.909.461,38) | 95.046.592.415,71 |
| Gedung dan Bangunan | 891.057.142.065,09 | (156.417.812.746,00) | 734.639.329.319,09 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 2.115.553.122.651,33 | (1.277.956.060.820,62) | 837.597.061.830,71 |
| Aset Tetap Lainnya | 30.994.280.421,61 | 0,00 | 30.994.280.421,61 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 47.201.469.715,59 | 0,00 | 47.201.469.715,59 |
| **Jumlah** | **4.119.084.057.101,07** | **(1.695.113.783.028,00)** | **2.368.893.894.813,71** |

1. **Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah kelompok aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap maupun investasi jangka panjang. Rincian saldo aset lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 pada tabel berikut.

**Tabel 7.97 Aset Lainnya**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aset Lainnya** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| Aset Tak Berwujud | 9.081.006.201,70 | 9.022.506.201,70 |
| Akumulasi Amortisasi | (6.606.681.139,56) | (6.073.341.290,00) |
| Aset Lain-lain | 61.774.288.826,29 | 12.208.333.080,35 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain | (28.004.013.782,00) | (1.172.998.158,00) |
| **Jumlah** | **36.244.600.106,43** | **13.984.499.834,05** |

1. **Aset Tak Berwujud**

Aset Tak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kota Prabumulih adalah berupa *software* dan hasil kajian pada 8(delapan) OPD.*Software* yang diakui sebagai aset tidak berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

**Tabel 7.98 Aset Tak Berwujud**

| **No.** | **OPD / Aset Tak Berwujud** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Bappeda** |  |  |
|  | * Rencana Detail Tata Ruang Kec. Prabumulih Utara | 385.880.000,00 | 385.880.000,00 |
|  | * Rencana Detail Tata Ruang Kec. Prabumulih Barat | 385.880.000,00 | 385.880.000,00 |
|  | * Survei dan Pemetaan | 388.450.000,00 | 388.450.000,00 |
|  | * Rencana Detail Tata Ruang Kec. Cambai dan Prabumulih Selatan | 808.280.000,00 | 808.280.000,00 |
|  | * Perencanaan Anak Sungai | 404.140.000,00 | 404.140.000,00 |
|  | * Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RDTR | 174.790.000,00 | 174.790.000,00 |
|  | * Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan | 119.680.000,00 | 119.680.000,00 |
|  | * Kajian Potensi Unggulan Daerah Kota Prabumulih | 145.520.000,00 | 145.520.000,00 |
|  | * Rencana Detail Tata Ruang Kawasan | 364.100.000,00 | 364.100.000,00 |
|  | * Aplikasi *software e-monev* | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 |
|  | **Sub Jumlah** | **3.284.720.000,00** | **3.284.720.000,00** |
| 2 | **Dinas Kesehatan** |  |  |
|  | * Aplikasi *software*SIMPEG | **65.766.666,60** | **65.766.666,60** |
| 3 | **Sekretariat Daerah** |  |  |
|  | * Sistem Keuangan Daerah | 1.093.900.000,00 | 1.093.900.000,00 |
|  | * Aplikasi *software* SIMPP | 194.600.000,00 | 194.600.000,00 |
|  | **Sub Jumlah** | **1.288.500.000,00** | **1.288.500.000,00** |
| 4 | **BKPSDM** |  |  |
|  | * Aplikasi *software* absensi | 75.900.000,00 | 75.900.000,00 |
|  | * Aplikasi *software* absensi | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 |
|  | **Sub Jumlah** | **174.900.000,00** | **174.900.000,00** |
| 5 | **Dinas Perhubungan** |  |  |
|  | * E-Government | 2.650.100.000,00 | 2.650.100.000,00 |
|  | * Pengembangan Website Kota Prabumulih | 373.615.000,00 | 373.615.000,00 |
|  | * Pengembangan Website SKPD | 90.255.000,00 | 90.255.000,00 |
|  | * Aplikasi Software | 42.539.595,80 | 42.539.595,80 |
|  | * Aplikasi SIM PKB | 42.000.000,00 | 0,00 |
|  | **Sub Jumlah** | **3.198.509.595,80** | **3.156.509.595,80** |
| **6** | **DPMPTSP** |  |  |
|  | * Software Komputer ( Windows Vista ) | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** |
| **7** | **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** |  |  |
|  | * Software Komputer | 571.058.815,00 | 571.058.815,00 |
|  | * Aplikasi SIM PBB P2 | 117.547.110,00 | 117.547.110,00 |
|  | * Software Aplikasi Pelayanan | 16.500.000,00 | 0,00 |
|  | **Sub Jumlah** | **705.105.925,00** | **688.605.925,00** |
| **8** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |  |  |
|  | -Software Komputer ( Windows Profesional | **361.004.014,30** | **361.004.014,30** |
|  | **Jumlah** | **9.081.006.201,70** | **9.022.506.201,70** |

1. **Akumulasi Amortisasi**

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo akumulasi amortisasi dan nilai buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.99 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud**

| **No.** | **Aset Tak Berwujud**  **Software** | **Nilai Perolehan**  **s.d. 31 Des 2020**  **(Rp)** | **Akumulasi Amortisasi**  **s.d. 31 Des 2020(Rp)** | **Nilai Buku**  **Per 31 Des 2020 (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Bappeda** |  |  |  |
|  | * Rencana Detail Tata Ruang Kec. Prabumulih Utara | 385.880.000,00 | 135.058.000,00 | 250.822.000,00 |
|  | * Rencana Detail Tata Ruang Kec. Prabumulih Barat | 385.880.000,00 | 135.058.000,00 | 250.822.000,00 |
|  | * Survei dan Pemetaan | 388.450.000,00 | 135.957.500,00 | 252.492.500,00 |
|  | * Rencana Detail Tata Ruang Kec. Cambai dan Prabumulih Selatan | 808.280.000,00 | 242.484.000,00 | 565.796.000,00 |
|  | * Perencanaan Anak Sungai | 404.140.000,00 | 121.242.000,00 | 282.898.000,00 |
|  | * Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RDTR | 174.790.000,00 | 52.437.000,00 | 122.353.000,00 |
|  | * Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan | 119.680.000,00 | 35.904.000,00 | 83.776.000,00 |
|  | * Kajian Potensi Unggulan Daerah Kota Prabumulih | 145.520.000,00 | 36.380.000,00 | 109.140.000,00 |
|  | * Rencana Detail Tata Ruang Kawasan | 364.100.000,00 | 91.025.000,00 | 273.075.000,00 |
|  | * Aplikasi *software e-monev* | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 0,00 |
|  | **Sub Jumlah** | **3.284.720.000,00** | **1.093.545.500,00** | **2.191.174.500,00** |
| 2 | **Dinas Kesehatan** |  |  |  |
|  | * Aplikasi *software*SIMPEG | **65.766.666,60** | **65.766.666,60** | **0,00** |
| 3 | **Sekretariat Daerah** |  |  |  |
|  | * Sistem Keuangan Daerah | 1.093.900.000,00 | 1.093.900.000,00 | 0,00 |
|  | * Aplikasi *software* SIMPP | 194.600.000,00 | 194.600.000,00 | 0,00 |
|  | **Sub Jumlah** | **1.288.500.000,00** | **1.288.500.000,00** | **0,00** |
| 4 | **BKPSDM** |  |  |  |
|  | * Aplikasi *software* absensi | 75.900.000,00 | 75.900.000,00 | 0,00 |
|  | * Aplikasi *software* absensi | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 0,00 |
|  | **Sub Jumlah** | **174.900.000,00** | **174.900.000,00** | **0,00** |
| 5 | **Dinas Perhubungan** |  |  |  |
|  | * E-Government | 2.650.100.000,00 | 2.650.100.000,00 | 0,00 |
|  | * Pengembangan Website Kota Prabumulih | 373.615.000,00 | 373.615.000,00 | 0,00 |
|  | * Pengembangan Website SKPD | 90.255.000,00 | 90.255.000,00 | 0,00 |
|  | * Aplikasi Software | 42.539.595,80 | 42.539.595,80 | 0,00 |
|  | * Aplikasi SIM PKB | 42.000.000,00 | 10.500.000,00 | 31.500.000,00 |
|  | **Sub Jumlah** | **3.198.509.595,80** | **3.167.009.595,80** | **31.500.000,00** |
| **6** | **DPMPTSP** |  |  |  |
|  | * Software Komputer ( Windows Vista ) | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | 0,00 |
| **7** | **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** |  |  |  |
|  | * Software Komputer | 571.058.815,00 | 571.058.815,00 | 0,00 |
|  | * Aplikasi SIM PBB P2 | 117.547.110,00 | 58.773.555,00 | 58.773.555,00 |
|  | * Software Aplikasi Pelayanan | 16.500.000,00 | 4.125.000,00 | 12.375.000,00 |
|  | **Sub Jumlah** | **705.105.925,00** | **633.957.370,00** | **71.148.555,00** |
| **8** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |  |  |  |
|  | -Software Komputer ( Windows Profesional | **361.004.014,30** | **180.502.007,15** | **180.502.007,15** |
|  | **Jumlah** | **9.081.006.201,70** | **6.606.681.139,56** | **2.474.325.062,15** |

Rincian perhitungan akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran12**.

1. **Aset Lain-lain**

Rincian saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 dan 2019pada tabel berikut.

**Tabel 7.100 Aset Lain-Lain**

| **No.** | **Aset Lain-lain** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aset Rusak Berat (Hilang) | 144.014.880,00 | 157.144.880,00 |
| 2 | Aset Untuk Penyertaan Modal | 8.984.364.000,00 | 8.984.364.000,00 |
| 3 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | (1.159.868.158,00) | (1.172.998.158,00) |
| 4 | Piutang Tidak Tertagih | 4.969.925,00 | 4.969.925,00 |
| 5 | Kelebihan Pembayaran Hasil Audit BPK RI | 49.002.562,50 | 49.002.562,50 |
| 6 | Kurang Volume Pekerjaan Hasil Audit BPK RI | 3.513.150.862,00 | 3.012.851.712,85 |
| 7 | Reklasifikasi dari Aset Tetap | 49.078.786.596,79 | 0,00 |
| 8 | Akumulasi Aset Lain - Lain | (26.844.145.624,00) | (0,00) |
|  | **Jumlah** | **33.770.275.044,29** | **11.035.334.922,35** |

Rincian perhitungan mutasi Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Atas Saldo Aset Lain-Lainper 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Aset Rusak Berat (Hilang) sebesar Rp144.014.880,00merupakan Brangkas dan Kursi Putar yang hilang pada Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp10.900.000,00 dan Aset Rusak Berat Pada 5 OPD sebesar Rp133.114.880,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp134.419.880,00.
2. Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp4.969.925,00 merupakan Piutang Reklame Tidak Tertagih sebesar Rp2.535.925,00 dan Piutang Retribusi Tidak Tertagih sebesar Rp2.434.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
3. Kelebihan Pembayaran sebesar Rp49.002.562,50 merupakan temuan kelebihan pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2019 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp46.762.500,00 dan temuan kelebihan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.240.062,50.Atas temuan tersebut belum didukung dengan SKTJM sehingga di klasifikasikan sebagai aset lain-lain.
4. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sedang dalam persiapan untuk diserahkan kepada PDAM sebagai Penyertaan Modal Rp8.984.364.000,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.038.578.278,00.
5. Kurang Volume Pekerjaan Hasil Pemeriksaan BPK RIsebesar Rp2.209.784.490,21 merupakan Temuan kekurangan volume hasil pekerjaan pada Dinas PerhubunganTahun2016 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2015 s.d 2019. Atas temuan tersebut belum didukung dengan SKTJM sehingga di klasifikasikan sebagai aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.101Aset Lain-Lain – Kurang Volume Pekerjaan**

| **No.** | **Aset Lain-lain** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp67.876.328,31 (Pemeriksaan LKPD TA 2015) | 67.876.328,31 | 67.876.328,31 |
| 2 | Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp32.598.610,77  (Pemeriksaan LKPD TA 2015) | 398.610,77 | 398.610,77 |
| 3 | Koreksi atas temuan kurang volume beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp10.869.050,29  (Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2016) | 10.869.050,29 | 10.869.050,29 |
| 4 | Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.183.292.419,96 (Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2016) | 668.705.030,18 | 668.705.030,18 |
| 5 | Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap KDP pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp39.647.489,76  (Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2016) | 20.932.847,63 | 20.932.847,63 |
| 6 | Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp93.949.115,00  (Pemeriksaan LKPD TA 2016) | 66.718.425,00 | 66.718.425,00 |
| 7 | Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Jalan dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp105.233.795,00 (Pemeriksaan LKPD TA 2016) | 51.883.636,00 | 51.883.636,00 |
| 8 | Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap KDP pada Dinas Perhubungan Kominfo sebesar Rp113.004.315,87  (Pemeriksaan LKPD TA 2016) | 113.004.315,87 | 113.004.315,87 |
| 9 | Koreksi atas temuan kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas Pertanian | 69.520.633,24 | 69.520.633,24 |
| 10 | Koreksi atas temuan kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat berupa Pembangunan Kantor Kejari pada Dinas PUPR | 118.520.576,96 | 118.520.576,96 |
| 11 | Koreksi atas temuan kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Koreksi atas temuan kekurangan volume pekerjaan pada Dinas PUPR | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Koreksi atas temuan kekurangan volume pekerjaan pada Dinas PUPR | 727.768.555,08 | 727.768.555,08 |
| 14 | Koreksi atas temuan kurang volume Aset Jalan dan Jaringan pada Dinas PUPR (TA.2020) | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Koreksi atas temuan kurang volume Aset Jalan dan Jaringan (DAK) pada Dinas PUPR (TA.2019) | 293.586.480,88 | 733.632.738,52 |
| 16 | Koreksi atas temuan kurang volume Aset Jalan dan Jaringan pada Dinas PUPR (TA.2019) yang tidak bisa dilakukan proses pengurangan Belanja dikarenakan belum ada Arus Kas Masuk kembali ke Kas di Kas Daerah | 0,00 | 363.020.965,00 |
|  | **Jumlah** | **2.209.784.490,21** | **3.012.851.712,85** |

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar sebesar Rp49.078.786.596,79 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp26.844.145.624,00 merupakan reklasifikasi atas Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria untuk di catat sebagai Aset Tetap tapi masih tercantum di Neraca Per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.

| **No.** | **Aset Lain-lain** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rekalisifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di Dinas PUPR dari kegiatan normalisasi sungai yang diindikasikan tidak menghasilkan Aset Tetap Tahun 2020 | 34.990.400.600,00 | 0,00 |
| 2 | Rekalsifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; dan Jalan Irigasi dan Jaringan sekolah swasta yang masih tersaji sebagai Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2020 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 10.100.559.665,42 | 0,00 |
| 3 | Reklasifikasi Aset Tetap SMA, SMK, dan SLB yang belum diserahkan ke Pemerintah Prov Sumatera Selatan dan masih tercatat di Neraca per 31 Desember 2020 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3.806.514.826,37 | 0,00 |
| 4 | Reklasifikasi Aset Tetap yang telah dimanfaatkan/dihibahkan dan dikuasai oleh pihak lain yang masih tercatat di Neraca per 31 Desember 2020 ke Aset Lain-lain di RSUD dan Sekretariat Daerah | 181.311.505,00 | 0,00 |
| 5 | eklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas koreksi/Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 | (26.844.145.624,00) | 0,00 |
|  | **Jumlah** | **22.234.640.927,79** | **0,00** |

Rincian perhitungan mutasi Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2020dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

1. **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat penggunaan sumber pembiayaan daripihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban dikelompokkan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp24.505.424.468,50 dan Rp21.345.069.361,01 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.102Kewajiban**

| **Kewajiban** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- |
| **Kewajiban Jangka Pendek** |  |  |
| * Utang PFK | 0,00 | 0,00 |
| * Pendapatan Diterima Dimuka | 183.061.374,50 | 221.423.254,01 |
| * Utang Beban | 19.668.149.204,00 | 20.016.502.087,00 |
| * Utang Jangka Pendek Lainnya | 4.654.213.890,00 | 1.107.144.020,00 |
| **Sub Jumlah** | **24.505.424.468,50** | **21.345.069.361,01** |
| **Kewajiban Jangka Panjang** | **0,00** | **0,00** |
| **Jumlah** | **24.505.424.468,50** | **21.345.069.361,01** |

1. **Kewajiban Jangka Pendek**

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun anggaran sejak tanggal31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut.

1. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK merupakan utang yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya.

Tidak terdapat saldo Utang PFK per 31 Desember 2020 dan 2019.

1. **Pendapatan Diterima di Muka**

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang telah diterima lebih dahulu pada tahun berjalan atau sebelumnya yang belum menjadi pendapatan pemerintah daerah pada tahun berjalan.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp183.061.374,50 dan Rp221.423.254,01sebagai berikut.

**Tabel 7.103Pendapatan Diterima di Muka**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pendapatan**  **Diterima Dimuka** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| 1 | Pendapatan Sewa Area Bisnis RSUD (BLUD) | 0,00 | 14.896.844,82 |
| 3 | Pajak Reklame | 183.061.374,50 | 206.526.409,19 |
|  | **Jumlah** | **183.061.374,50** | **221.423.254,01** |

Rincian perhitungan Pendapatan Diterima di Muka dari pendapatan sewa area bisnis RSUD dan Pajak Reklame per 31 Desember 2020dapat dilihat pada **Lampiran14**.

1. **Utang Beban**

Utang Beban merupakan utang karena belum dibayarkannya suatu belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diakui sebagai beban pada Laporan Operasional di tahun berjalan.

Nilai Utang Beban per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesarRp19.668.149.204,00 dan Rp20.016.502.087,00sebagai berikut.

**Tabel 7.104Utang Beban**

| **No.** | **Utang Beban** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utang BLUD (RSUD) | 11.591.379.705,00 | 18.720.933.405,00 |
| 2 | Utang Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNSD Tahun 2020 | 2.358.061.304,00 | 0,00 |
| 3 | Utang Beban Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 3.297.723.800,00 | 0,00 |
| 4 | Utang Beban Honorarium PNS | 0,00 | 1.342.500,00 |
| 5 | Utang Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PEM AKAMIGAS | 712.500.000,00 | 0,00 |
| 6 | Utang Beban Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 0,00 | 61.426.000,00 |
| 7 | Utang Listrik, Air dan Telepon | 47.893.738,00 | 1.067.697.025,00 |
| 8 | Utang Jasa Media Informasi | 242.000.000,00 | 141.500.000,00 |
| 9 | Utang Premi Jamkesda | 1.394.987.500,00 | 0,00 |
| 10 | Utang Bantuan Keuangan Parpol | 23.603.157,00 | 23.603.157,00 |
|  | **Jumlah** | **19.668.149.204,00** | **20.016.502.087,00** |

Rincian perhitungan Utang Beban tiap OPD per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran15**.

1. Utang BLUD (RSUD) sebesar Rp11.591.379.705,00 terdiri dari utang obat/BPH/alkes/regensia sebesar Rp8.836.150.355,00; utang barang/jasa kepada pihak ketiga sebesar Rp1.201.317.950,00 dan utang jasa pelayanan BLUD sebesar Rp1.553.911.400,00.
2. Utang beban Iuran Jaminan Kesehatan PNSD Kota Prabumulih Tahun 2020 sebesar Rp2.358.061.304,00 merupakan kekurangan pembayaran Iuran Tahun 2020 berdasarkan hasil Rekonsiliasi antara KPPN Palembang, BPKAD Kota Prabumulih dan BPJS Kesehatan KC Prabumulih
3. Utang Beban Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebsesar Rp3.297.723.800,00 merupakan kekurangan pembayaran tunjangan sertifikasi tahun 2020
4. Utang Beasiswa Pendidikan Politekni Energy dan Mineral (PEM) AKAMIGAS merupakan Biaya Pendidikan Semester 3 tahun ajaran 2020/2021 yang akan dibayarkan pada tahun 2021 sebesar Rp712.500.000,00.
5. Utang beban listrik, air, internet, dan telepon merupakan beban bulan November dan Desember 2020 pada 10 OPD sebesar Rp47.893.738,00.
6. Utang Jasa Media Informasi sebesar Rp242.000.000,00 merupakan Utang Jasa Media Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.
7. Utang Premi Jamkesda sebesar Rp1.394.987.500,00 merupakan kekurangan pembayaran iuran bagi peserta PBI APBD Kota Prabumulih sebesar Rp 695.344.000,00 dan APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp699.643.000,00
8. Utang transfer bantuan keuangan Parpol bulan Oktober s.d. Desember 2020 untuk Partai Gerindra sebesar Rp23.603.157,00.
9. **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban jangka pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi utang di atas.

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp4.654.213.890,00dan Rp1.107.144.020,00 sebagai berikut.

**Tabel 7.105Utang Jangka Pendek Lainnya**

| **No.** | **Utang Beban** | **31 Desember2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lebih Bayar Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan | 4.210.715.140,00 | 133.526.943,00 |
| 2 | Sisa Dana BOS TA 2011 | 443.498.750,00 | 443.498.750,00 |
| 3 | Utang Pengadaan Aset Tetap | 0,,00 | 530.118.327,00 |
|  | **Jumlah** | **4.654.213.890,00** | **1.107.144.020,00** |

1. Saldo Lebih Bayar Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbanganper 31 Desember 2020atas alokasi lebih bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.106Lebih Bayar Transfer Pemerintah Pusat**

| **Lebih Bayar Transfer**  **Pemerintah Pusat** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- |
| **DBH Pajak** |  |  |
| - PBB P3  - PPh Orang Pribadi  - Cukai Hasil Tembakau | 0,00  0,00  0,00 | 6.344.250,00  0,00  0,00 |
| Sub Jumlah | **0,00** | **6.344.250,00** |
| **DBH Sumber Daya Alam** |  |  |
| - Provisi Sumber Daya Hutan  - Perikanan  - Pertambangan Umum  - Pertambangan Minyak Bumi  - Pertambangan Gas Bumi  - Pertambangan Panas Bumi | 0,00  0,00  0,00  4.210.715.140,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  127.182.693,00  0,00  0,00 |
| Sub Jumlah | **4.210.715.140,00** | **127.182.693,00** |
| **Jumlah** | **4.210.715.140,00** | **133.526.943,00** |

1. Sisa Dana BOS sebesar Rp443.498.750,00 adalah sisa dana bos tahun 2011 yang harus dikembalikan ke kas negara berdasarkan berita acara hasil evaluasi Perwakilan BPKP Sumsel tanggal 22 September 2014. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa disebutkan bahwa apabila sampai dengan bulan Desember 2016 masih terdapat Sisa Dana BOS TA 2011di Daerah, maka penyelesaian pengembalian Sisa Dana BOS TA 2011 tersebut dilakukan dengan pemotongan DAU dan/atau DBH Tahun Anggaran 2018. Namun sampai dengan TA 2020 belum dilakukan pemotongan DAU dan/atau DBH oleh Kementerian Keuangan, sehingga atas Sisa Dana BOS TA 2011 tersebut masih diakui sebagai utang oleh Pemerintah KotaPrabumulih.
2. Utang Pengadaan Aset Tetap adalah sisa kontrak belanja modal kepada rekanan yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2020. Tidak terdapat Utang Pengadaan Aset Tetap untuk Tahun 2020.
3. **Kewajiban Jangka Panjang**

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran terhitung sejak tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan. Pada TA 2020 dan 2019, Pemerintah Kota Prabumulih tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

1. **Ekuitas**

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kota Prabumulih, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (*claim*) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, meliputi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Nilai Ekuitas Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.609.268.524.942,22 mengalami peningkatan sebesar Rp129.024.584.429,61atau 5,20 % dibandingkan nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.480.243.940.512,61.

Peningkatan Ekuitas Tahun 2020 tersebut disebabkan defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp19.912.758.830,38 lebih kecil dari dampak kumulatif karena perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan sebesar minus Rp148.937.343.259,99.Penjelasan secara rinci tentang kenaikan nilai ekuitas dijelaskan pada CaLK tentang Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1. **Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun pertama kali mulai tahun 2015 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penjelasan Laporan Operasional ini akan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah yaitu belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dikonversi menjadi jenis beban hibah atau beban bantuan sosial pada Laporan Operasional.

1. **Pendapatan LO**

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diklasifikasikan berdasarkan asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi pendapatan TA 2020 dan 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.107 Pendapatan LO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pendapatan LO** | **Realisasi 2020**  **(Rp)** | **Realisasi 2019**  **(Rp)** |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 88.032.563.044,90 | 106.015.965.580,20 |
| Pendapatan Transfer | 850.314.822.093,68 | 955.155.083.000,00 |
| Lain-lain Pendapatan yang Sah | 35.133.933.883,00 | 50.805.880.685,00 |
| **Jumlah** | **973.481.319.021,58** | **1.111.976.929.265,20** |

1. **Pendapatan Asli Daerah**

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.108Pendapatan Asli Daerah-LO**

| **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** | **Realisasi 2020**  **(Rp)** | **Realisasi 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- |
| Pajak Daerah | 32.028.266.684,69 | 32.102.382.409,81 |
| Retribusi Daerah | 2.874.575.946,50 | 3.748.946.449,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.073.589.783,33 | 1.759.160.257,30 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 51.056.130.630,38 | 68.405.476.464,09 |
| **Jumlah** | **88.032.563.044,90** | **106.015.965.580,20** |

Dalam realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah termasuk realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola langsung oleh RSUD Prabumulih dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP oleh Puskesmas.

1. **Pendapatan Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh masing-masing OPD terkait sebagai unit penghasil.

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2020, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesarketetapan yang diterima pada tahun 2020 danbukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2020.

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp31.955.097.817,69 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel7.109 Pendapatan Pajak Daerah-LO**

| **Pendapatan Pajak Daerah** | **LO (Rp)** | **LRA (Rp)** | **Selisih**  **LO – LRA (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Pajak Hotel | 408.987.887,00 | 345.107.750,00 | 63.880.137,00 |
| Pajak Restoran | 3.176.077.921,00 | 3.176.978.921,00 | (901.000,00) |
| Pajak Hiburan | 322.191.828,00 | 322.491.828,00 | (300.00,00) |
| Pajak Reklame | 543.599.017,69 | 520.133.983,00 | 24.456.034,69 |
| Pajak Penerangan Jalan | 14.335.869.366,00 | 14.335.869.366,00 | 0,00 |
| Pajak Parkir | 287.387.500,00 | 287.440.000,00 | (52.500,00) |
| Pajak Air Bawah Tanah | 24.153.231,00 | 24.153.231,00 | 0,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 29.220.000,00 | 29.220.000,00 | 0,00 |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.304.254.373,00 | 1.304.254.373,00 | 0,00 |
| PBB-P2 | 6.536.611.801,00 | 3.081.498.593,00 | 3.445.824.478,00 |
| BPHTB | 5.059.913.760,00 | 5.059.913.760,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **32.028.266.684,69** | **28.487.061.805,00** | **3.469.327.012,69** |

Selisih antara pendapatan pajak daerah yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp3.477.324.742.69 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih lebih antara penerimaan Pajak Hotel yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp63.880.137,00merupakan merupakan piutang pajak Hoteldi Tahun 2020.
2. Selisih kurang antara penerimaan Pajak Restoran yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp901.000,00 merupakan merupakan penurunan piutang pajak Restoran di Tahun 2020.
3. Selisih kurang antara penerimaan Pajak Hiburan yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp300.000,00 merupakan merupakan penurunan piutang pajak Hiburan di Tahun 2020.
4. Selisih lebih antara penerimaan Pajak Reklame yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp23.465.034,69 merupakan selisih antara pendapatan diterima dimuka pajak reklame di Tahun 2020 dan pendapatan diterima dimuka pajak reklame di Tahun 2019.
5. Selisih kurang antara penerimaan Pajak Parkir yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp52.500,00 merupakan penurunan piutang pajak Parkirdi Tahun 2020.
6. Selisih lebih antara penerimaan PBB-P2 yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp3.455.113.208,00 merupakan kenaikan piutang PBB-P2 di Tahun 2020.
7. **Pendapatan Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing OPD terkait sebagai unit penghasil.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp2.873.810.946,50dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.110 Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

| **Pendapatan Retribusi Daerah** | **LO (Rp)** | **LRA (Rp)** | **Selisih**  **LO – LRA (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Jasa Umum | 1.552.638.921,00 | 1.611.203.921,00 | (58.565.000,00) |
| Jasa Usaha | 713.750.000,00 | 582.750.000,00 | 131.000.000,00 |
| Perizinan Tertentu | 608.187.025,50 | 608.187.025,50 | 0,00 |
| **Jumlah** | **2.874.575.946,50** | **2.802.140.946,50** | **72.435.000,00** |

1. **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang terkait langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.111 Retribusi Jasa Umum-LO**

| **Retribusi Jasa Umum** | **LO (Rp)** | **LRA (Rp)** | **Selisih**  **LO – LRA (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Pelayanan Kesehatan | 158.456.431,00 | 158.456.431,00 | 0,00 |
| Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 160.244.000,00 | 160.244.000,00 | 0,00 |
| Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 552.449.000,00 | 552.449.000,00 | 0,00 |
| Pelayanan Pasar | 138.600.000,00 | 197.165.000,00 | (58.565.000,00) |
| Pengujian Kendaraan Bermotor | 267.353.400,00 | 267.353.400,00 | 0,00 |
| Alat Penanggulangan Kebakaran | 12.721.090,00 | 12.721.090,00 | 0,00 |
| Jasa Pelayanan Laboratorium | 65.015.000,00 | 65.015.000,00 | 0,00 |
| Pengendalian Menara Telekomunikasi | 197.800.000,00 | 197.800.000,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **1.552.638.921,00** | **1.611.203.921,00** | **(58.565.000,00)** |

Selisih Kurang antara Pendapatan Retribusi Jasa Umum yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp58.565.000,00merupakan pengurangan Piutang Retribusi Kios/Los Pasar Inpres di Tahun 2020.

1. **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang terkait dengan pemakaian aset daerah dan/atau penjualan produksi usaha daerah, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.112Retribusi Jasa Usaha-LO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Retribusi Jasa Usaha** | **LO (Rp)** | **LRA (Rp)** | **Selisih**  **LO – LRA (Rp)** |
| Pemakaian Kekayaan Daerah | 682.900.000,00 | 551.900.000,00 | 131.000.000,00 |
| Retribusi Rumah Potong Hewan | 15.550.000,00 | 15.550.000,00 | 0,00 |
| Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **713.750.000,00** | **582.750.000,00** | **131.000.000,00** |

Perbedaanantara Pendapatan Retribusi Jasa Usaha yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp131.000.000,00 merupakan mutasi kenaikan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah di tahun 2020.

1. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan PAD yang terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisator untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.113Retribusi Perizinan Tertentu-LO**

| **Retribusi Perizinan Tertentu** | **LO (Rp)** | **LRA (Rp)** | **Selisih**  **LO – LRA (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Izin Mendirikan Bangunan(IMB) | 605.387.025,50 | 605.387.025,50 | 0,00 |
| Izin Trayek | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **608.187.025,50** | **608.187.025,50** | **0,00** |

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada Laporan Operasional disajikan sebesar pendapatan retribusi yang telah diterima pada tahun 2020 sebesar Rp608.187.025,50 dan tidak terdapat piutang per 31 Desember 2020 atas retribusi tersebut.

1. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba perusahaan daerah yang merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih.

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2020sebesar Rp2.073.589.783,33merupakan penerimaan dividen dari bagian laba Bank Sumsel Babel untuk Pemerintah Kota Prabumulih.

1. **Lain-lain PAD yang Sah**

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Peraturan Daerah.

Lain-lain PAD yang Sah-LO pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp50.920.326.689,38 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.114Lain-lain PAD yang Sah-LO**

| **Lain-lain PAD**  **yang Sah** | **LO (Rp)** | **LRA (Rp)** | **Selisih**  **LO – LRA (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Penerimaan Jasa Giro | 965.069.048,00 | 965.322.376,00 | (253.328,00) |
| Bunga Deposito Bank | 8.162.532.183,30 | 8.162.532.183,30 | 0,00 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 1.032.627.320,60 | 1.395.648.285,60 | (363.020.965,00) |
| Penerimaan BLUD | 31.785.096.891,50 | 31.786.024.021,50 | (367.600.428,50) |
| Penerimaan Lain-lain | 2.544.550.727,98 | 2.431.808.227,98 | 112.742.500,00 |
| Dana JKN FKTP | 6.381.618.753,00 | 6.381.618.753,00 | 0,00 |
| Denda PBB P2 | 176.208.576,00 | 176.208.576,00 | 0,00 |
| Penjualan Hasil Perikanan | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **51.056.130.630,38** | **51.674.262.851,88** | **(618.132.221,50)** |

Selisih antara Lain-lain PAD yang Sah yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar minus Rp618.132.221,50 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih atas Penerimaan Jasa Giro sebesar minus Rp253.328,00 merupakan mutasi kurang piutang jasa giro selama periode Tahun 2020.
2. Selisih penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Daerah sebesar minus Rp363.020.965,00merupakan pengurangan piutang yang dicatat sebagai Aset Lain-Lain selama periode Tahun 2020.
3. Mapping nilai penerimaan BLUD LO dapat dijelaskan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penerimaan BLUD LRA | : | Rp 32.152.697.320,00 |
| *Dikurangi* Pelunasan piutang BLUD di TA 2020 | : | (Rp10.122.480.882,00) |
| Pendapatan BLUD murni di TA 2020 | : | Rp 22.030.216.438,00 |
| *Ditambah* Penambahan piutang di TA 2020 | : | Rp 9.733.280.224,00 |
| *Ditambah* Pendapatan diterima dimuka TA 2019 | : | Rp14.896.844,82 |
| *Ditambah* Penyisihan Piutang yang telah diterima pelunasanya | : | Rp 6.703.384,68 |
| Penerimaan BLUD LO | : | Rp 31.785.096.891,50 |

1. Mapping nilai penerimaan Lain-Lain LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penerimaan Lain-Lain LRA | : | Rp 2.431.808.227,98 |
| *Dikurangi* pelunasan piutang pegawai di TA 2020 | : | (Rp 42.300.200,00) |
| *Ditambah* penambahan piutang di TA 2020. |  | Rp 6.800.200,00 |
| *Ditambah* Penyisihan Piutang yang telah diterima pelunasannya |  | Rp 148.242.500,00 |
| Penerimaan Lain-Lain LO | : | Rp2.544.550.727,98 |

1. **Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer-LO terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi, dan Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.115Pendapatan Transfer-LO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pendapatan LO** | **Realisasi 2020**  **(Rp)** | **Realisasi 2019**  **(Rp)** |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 727.296.098.005,00 | 806.883.407.068,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya | 26.680.256.000,0 | 20.377.462.000,00 |
| Transfer Pemerintah Provinsi | 62.576.254.736,68 | 61.051.938.432,00 |
| Bantuan Keuangan | 33.762.213.352,00 | 66.842.275.500,00 |
| **Jumlah** | **850.314.822.093,68** | **955.155.083.000,00** |

1. **Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp727.296.098.005dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.116Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO**

| **Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan** | **LO (Rp)** | **LRA (Rp)** | **Selisih**  **LO – LRA (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Bagi Hasil Pajak | 89.002.627.078,00 | 73.597.425.102,00 | 15.405.201.976,00 |
| Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) | 119.893.096.357,00 | 123.484.470.497,00 | (3.591.374.140,00) |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 399.247.165.000,00 | 399.247.165.000,00 | 0,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 119.153.209.570,00 | 119.153.209.570,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **727.296.098.005,00** | **715.482.270.169,00** | **11.813.827.836,00** |

1. Bagi Hasil Pajak meliputi Bagi Hasil PBB-P3, PPh Orang Pribadi, dan Cukai Hasil Tembakau (CHT) disajikan sebesar transfer yang telah diterima pada tahun 2020 sebesar Rp73.597.425.102,00 ditambah dengan mutasi lebih bayar dan kurang bayar selama tahun 2020 sebesar Rp15.405.201.976,00.

Mapping nilai DBH Pajak LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penerimaan DBH Pajak LRA | : | Rp73.597.425.102,00 |
| *Ditambah pengurangan* lebih bayar transfer DBH Pajak di TA 2020 (Rp0,00 - Rp6.344.250,00) | : | Rp6.344.250,00 |
| DBH Pajak LRA murni atas TA 2020 | : | Rp 73.603.769.352,00 |
| *Ditambah penambahan* piutang DBH Pajak di TA 2020 (Rp21.643.535.834,00-Rp6.244.678.108,00) | : | Rp15.398.857.726,00 |
| Penerimaan DBH Pajak LO | : | Rp89.002.627.078,00 |

1. Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) meliputi Bagi Hasil Sumber Daya Hutan, Iuran Tetap (*Land Rent*), Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti), Pungutan Hasil Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi disajikan sebesar transfer yang telah diterima pada tahun 2020 sebesar Rp123.484.470.497,00 dikurangi dengan mutasi lebih bayar dan kurang bayar selama tahun 2020 sebesar Rp3.591.374.140,00.

Mapping nilai DBH SDA LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penerimaan DBH SDA LRA | : | Rp 123.484.470.497,00 |
| *Dikurangi penambahan* lebih bayar transfer DBH SDA di TA 2020 (Rp4.210.715.140,00 - Rp127.182.693,00) | : | Rp 4.083.532.447,00 |
| DBH SDA LRA murni atas TA 2019 | : | Rp 119.400.938.050,00 |
| *Ditambah penambahan* piutang DBH SDA di TA 2020 (Rp850.821.562,00 - Rp358.663.255,00) | : | Rp 492.158.307,00 |
| Penerimaan DBH SDA LO | : | Rp 119.893.096.357,00 |

1. Pendapatan DAU dan DAK pada Laporan Operasional disajikan sebesar pendapatan yang telah diterima pada tahun 2020 masing-masing sebesar Rp399.247.165.000,00 dan Rp119.153.209.570,00serta tidak terdapat piutang per 31 Desember 2020 atas pendapatan tersebut.
2. **Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD) disajikan sebesar pendapatan yang telah diterima dan tidak terdapat piutang per 31 Desember 2020 atas pendapatan tersebut.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO pada Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp26.680.256.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.117 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LO**

| **Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya** | **LO (Rp)** | **LRA (Rp)** | **Selisih**  **LO – LRA (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dana Insentif Daerah | 26.680.256.000,00 | 26.680.256.000,00 | 0,00 |
| Dana Desa | 0,00 | 21.868.335.000,00 | (21.868.335.000,00) |
| **Jumlah** | **26.680.256.000,00** | **48.548.591.000,00** | **(21.868.335.000,00)** |

Atas Penerimaan Dana Desa dari APBN Tahun 2020 sebesar Rp21.868.335.000,00, Pemerintah Kota Prabumulih tidak mencatat sebagai Pendapatan-LO karena kinerjapemanfaatan Dana Desa ada di desa, bukan pada Pemerintah Kota.

Berdasarkan Buletin Teknis SAPNomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual, penerimaan Dana Desa dari APBN tidak dicatat sebagai pendapatan LO melainkan dicatat sebagai utang dan selanjutnya pada saat realisasi pencairan dana desa kepada tiap-tiap desa penerima dicatat sebagai transaksi pelunasan utang.

1. **Transfer Pemerintah Provinsi**

Alokasi Transfer Pemerintah Provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 122/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 14 Februari 2020 serta direvisi dengan SK Nomor 730/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Alokasi DBH Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan TA 2020.

Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi-LO meliputi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak Rokok.Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO pada Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp62.576.254.736,68 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.118Transfer Pemerintah Provinsi-LO**

| **Transfer Pemerintah**  **Provinsi** | **LO (Rp)** | **LRA (Rp)** | **Selisih**  **LO – LRA (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Bagi Hasil Pajak Daerah | 62.576.254.736,68 | 47.882.821.446,68 | (213.142.481,00) |
| Bagi Hasil Pajak Rokok | 14.906.575.771,00 | 14.906.575.771,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **62.576.254.736,68** | **62.789.397.217,68** | **(213.142.481,00)** |

1. Bagi Hasil Pajak Daerah meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor (PKB), Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBN KAA), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, disajikan sebesar transfer yang telah diterima pada tahun 2020 sebesar Rp47.882.821.446,68 dikurangi dengan penurunan PutangDBH Pajak Daerah selama tahun 2020sebesar Rp4.756.681.395,00 ditambah dengan Piutang Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp4.543.538.914,00 .

Mapping nilai DBH Pajak Daerah LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penerimaan DBH Pajak Daerah LRA | : | Rp47.882.821.446,68 |
| *Dikurangi* penurunan piutang DBH Pajak Daerah di TA 2020 | : | (Rp 4.756.681.395,00) |
| DBH Pajak Daerah Murni TA 2020 | : | Rp43.126.140.051,68 |
| *Ditambah*Piutang DBH Pajak Daerah di TA 2020 | : | Rp 4.543.538.914,00 |
| Penerimaan DBH Pajak Daerah LO | : | Rp 47.669.678.965,68 |

1. Pendapatan DBH Pajak Rokok pada Laporan Operasional disajikan sebesar pendapatan yang telah diterima pada tahun 2020 sebesar Rp14.906.575.771,00. Tidak terdapat piutang per 31 Desember 2020 atas pendapatan tersebut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

1. **Bantuan Keuangan**

Penerimaan alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi terdiri bantuan keuangan bersifat khusus (SK Gubernur No. 396/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan SK Gubernur No. 654/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 13 November 2020), serta bantuan keuangan dalam rangka integrasi BPJS (SK Gubernur No. 214/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 30 Maret 2020).

**Tabel 7.119Bantuan Keuangan-LO**

| **Bantuan**  **Keuangan Provinsi** | **LO (Rp)** | **LRA (Rp)** | **Selisih**  **LO – LRA (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Bantuan Keuangan Bersifat Khusus | 29.477.560.000,00 | 29.477.560.000,00 | 0,00 |
| Bantuan Integrasi BPJS | 4.284.653.352,00 | 3.585.009.852,00 | 699.643.500,00 |
| **Jumlah** | **33.762.213.352,00** | **33.062.569.852,00** | **699.643.500,00** |

Pendapatan Bantuan Keuangan pada Laporan Operasional disajikan sebesar Rp33.762.213.352,00. Perbedaanantara Bantuan Keuangan Provinsi yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp699.643.500,00 merupakan penambahan Piutang Premi Jamkesda APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

1. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2020 terealisasi sebesar Rp33.641.074.683,00dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.120Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lain-lain Pendapatan**  **Daerah yang Sah** | **Realisasi 2020**  **(Rp)** | **Realisasi 2019**  **(Rp)** |
| Pendapatan Hibah | 26.886.255.891,00 | 28.825.036.316,00 |
| Pendapatan Lainnya | 6.754.818.792,00 | 21.980.844.369,00 |
| **Jumlah** | **33.641.074.683,00** | **50.805.880.685,00** |

Selisih sebesar Rp7.809.584.683,00 antara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang tercatat di LO sebesar Rp33.641.074.683,00dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp25.831.490.000,00dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. **Pendapatan Hibah**

Selisih sebesar Rp1.054.765.891,00antara Pendapatan Hibah yang tercatat di LO sebesar Rp26.886.255.891,00dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp25.831.490.000,00merupakan hibah barang persediaan berupa obat-obatan dan alat KB dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih.

1. **Pendapatan Lainnya**

Selisih sebesar Rp6.754.818.792,00antara Pendapatan Lainnya yang tercatat di LO sebesar Rp6.754.818.792,00dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp0,00 merupakan hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian PUPR sebesar Rp5.206.733.792,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Hibah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi dari Kementerian ESDM sebesar Rp470.935.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.077.150.000,00 pada Dinas Perhubungan.

1. **Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagaiberikut.

**Tabel 7.121Beban**

| **Beban** | **Realisasi 2020**  **(Rp)** | **Realisasi 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- |
| Beban Pegawai | 391.710.256.673,00 | 384.442.504.463,00 |
| Beban Persediaan | 63.895.281.935,96 | 96.993.496.616,29 |
| Beban Jasa | 154.443.805.442,61 | 164.836.564.127,29 |
| Beban Pemeliharaan | 10.807.231.931,00 | 12.056.677.934,00 |
| Beban Perjalanan Dinas | 88.661.054.992,52 | 102.665.548.309,09 |
| Beban Hibah | 53.595.876.685,00 | 40.043.117.865,04 |
| Beban Bantuan Sosial | 165.000.000,00 | 1.139.000.000,00 |
| Beban Penyusutan | 163.068.674.574,42 | 239.200.188.034,69 |
| Beban Amortisasi | 474.692.939,63 | 234.486.000,00 |
| Beban Penyisihan Piutang | 2.678.889.199,35 | 2.905.708.645,29 |
| Beban Lain-Lain | 8.727.476.560,47 | 6.961.460.985,60 |
| Bantuan Keuangan ke Desa | 7.513.880.000,00 | 7.513.880.000,00 |
| Bantuan Keuangan ke Partai Politik | 938.701.918,00 | 882.012.066,00 |
| **Jumlah** | **946.680.822.851,96** | **1.059.874.645.046,29** |

1. **Beban Pegawai**

Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan Beban Pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai Beban Pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2020 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2020.

Beban Pegawai pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp391.710.256.673,00dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.122Beban Pegawai**

| **Beban Pegawai** | **LO (Rp)** | **LRA (Rp)** | **Selisih**  **LO – LRA (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaji & Tunjangan PNS Daerah dan DPRD | 284.262.269.795,00. | 281.904.208.491,00 | 2.358.061.304,00 |
| Tambahan Penghasilan PNS | 103.425.442.112,00 | 100.127.718.312,00 | 3.297.723.800,00 |
| Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH dan DPRD | 3.549.600.000,00 | 3.549.600.000,00 | 0,00 |
| Biaya Pemungutan Pajak | 48.847.084,00 | 48.847.084,00 | 0,00 |
| Uang Lembur | 424.182.000,00 | 424.182.000,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **391.710.340.991,00** | **386.054.555.887,00** | **5.655.785.104,00** |

Selisih antara LO dengan LRA sebesar Rp5.655.785.104,00dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Lebih antara LO dengan LRA Gaji &Tunjangan PNS Daerah dan DPRDsebesarRp2.358.061.304,00merupakan Penambahan Utang Iuran Jaminan PNSD tahun 2020.
2. Selisih Lebih antara LO dengan LRA Tambahan Penghasilan PNS sebesarRp3.297.723.800,00 merupakan Penambahan utang Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan beban Kerja (Sertifikasi Guru) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA 2020.
3. **Beban Persediaan**

Beban Persediaan pada TA 2020terealisasi sebesar Rp65.073.995.837,03 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.123 Beban Persediaan**

| **Beban Persediaan** | **LO (Rp)** | **LRA (Rp)** | **Selisih**  **LO – LRA (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Bahan Pakai Habis | 14.543.081.722,51 | 16.051.296.693,00 | (1.508.214.970,49) |
| Bahan/Material | 17.706.907.452,26 | 8.358.911.347,00 | 9.347.996.105,26 |
| Cetak dan Penggandaan | 8,138.525.636,75 | 7.981.441.270,00 | 157.084.366,75 |
| Makanan dan Minuman | 21.488.204.124,44 | 21.475.653.100,00 | 12.551.024,44 |
| Pakaian Dinas dan Atributnya | 518.925.000,00 | 518.925.000,00 | 0,00 |
| Pakaian Kerja | 347.055.000,00 | 612.705.000,00 | (265.650.000,00) |
| Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu | 1.152.583.000,00 | 1.152.583.000,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **63.895.281.935,56** | **56.151.515.410,00** | **7.586.682.159,21** |

Perhitungan beban persediaan per rincian objek serta penjelasan atas selisih perbedaan LRA dan LO tersaji pada **Lampiran17**.

1. **Beban Jasa**

Beban Jasa pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp154.288.799.370,85 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.124Beban Jasa**

| **Beban Jasa** | **LO (Rp)** | **LRA (Rp)** | **Selisih**  **LO – LRA (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Jasa Kantor | 86.563.277.650,00 | 88.366.132.768,00 | (1.802.855.118,00) |
| Premi Asuransi | 15.168.552.631,57 | 13.377.510.373,00 | 1.791.042.258,57 |
| Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir | 144.652.350,00 | 144.652.350,00 | 0,00 |
| Sewa Sarana Mobilitas | 234.234.987,00 | 263.140.000,00 | (28.905.013,00) |
| Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.836.963.000,00 | 1.837.440.000,00 | (477.000,00) |
| Belanja Jasa Konsultansi | 25.611.000,00 | 4.450.779.000,00 | (4.425.168.000,00) |
| Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek PNS | 563.733.500,00 | 563.733.500,00 | 0,00 |
| Honorarium Non Pegawai | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| Honorarium PNS | 13.055.064.135,04 | 17.733.963.294,00 | (4.678.899.158,96) |
| Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN | 3.873.271.665,00 | 3.873.271.665,00 | 0,00 |
| Honor Pengelola Barang Daerah | 651.200.000,00 | 651.200.000,00 | 0,00 |
| Honor Pengelola Keuangan Daerah | 1.479.822.200,00 | 1.479.822.200,00 | 0,00 |
| Dana BOS | 16.396.367.074,00 | 17.202.827.193,00 | (811.275.039,00) |
| Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | 13.130.923.750,00 | 32.675.447.688,00 | (19.544.523.938,00) |
| Dekorasi | 136.100.000,00 | 136.100.000,00 | 0,00 |
| Jasa Iklan dan Peliputan | 558.945.000,00 | 558.945.000,00 | 0,00 |
| Berobat Gratis | 127.636.500,00 | 127.636.500,00 | 0,00 |
| Uang untuk Pihak Ketiga/Masyarakat | 522.950.000,00 | 522.950.000,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **154.443.805.442,61** | **183.967.051.531,00** | **(29.501.061.008,39)** |

Perhitungan beban jasa serta penjelasan atas selisih perbedaan LRA dan LO tersaji pada **Lampiran18**.

1. **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp10.807.231.931,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.125Beban Pemeliharaan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beban Pemeliharaan** | **LO (Rp)** | **LRA (Rp)** | **Selisih**  **LO – LRA (Rp)** |
| Perawatan Kendaraan Bermotor | 4.025.541.150,00 | 5.485.470.401,00 | (1.459.929.251,00) |
| Belanja Pemeliharaan | 4.680.765.681,00 | 4.742.705.681,00 | (61.940.000,00) |
| Belanja Servis | 2.100.925.100,00 | 2.100.925.100,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **10.807.231.931,00** | **12.329.101.182,00** | **(1.521.869.251,00)** |

Perhitungan beban pemeliharaan serta penjelasan atas selisih perbedaan LRA dan LO tersaji pada **Lampiran19**.

1. **Beban Perjalanan Dinas**

Realisasi beban perjalanan dinas LO pada TA 2020 sebesar Rp88.661.054.992,52,00 sedangkan realisasi perjalanan dinas pada LRAsebesar Rp90.078.000.295,00. Selisih kurang antara LO dengan LRA sebesar Rp1.416.945.302,48 merupakan realisasi perjalanan dinas yang dikapitalisasikan ke nilai perolehan aset tetap.

1. **Beban Hibah**

Beban Hibah meliputi beban hibah uang kepada lembaga/organisasi kemasyarakatan, BOP PAUD masyarakat, BOP Pendidikan Kesetaraan,dan beasiswa kepada 49 mahasiswa penerima beasiswa Politeknik Energi Mineral (PEM) Akamigas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 6/KPTS/BKD/2020 tanggal 2 Januari 2020dan perubahannya Nomor 289/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 13 November 2020, serta konversi Beban Barang yang Diserahkan ke Masyarakat.

Realisasi Beban Hibah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp53.595.876.685,00 dengan rincian beban hibah ke organisasi/lembaga kemasyarakatan Rp4.249.078.264,00; hibah BOP PAUD sebesar Rp1.956.000.000,00; hibah BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp985.900.000,00; dan konversi beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp46.404.898.421,00.

1. **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp165.000.000,00 meliputi pemberian bantuan beasiswa kepada 55 siswa SMA/SMK/MAN yang kurang mampu masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 sesuai Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 285/KPTS/DISDIKBUD/2020 tanggal 26 Oktober 2020. Tidak terdapat perbedaan antara nilai belanja bantuan sosial pada LRA dengan nilai beban bantuan sosial pada LO.

1. **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan digunakan untuk mencatat penyusutan aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan irigasi dan jaringan yang dimiliki pemerintah daerah yang masih memiliki nilai buku dan menjadi beban di tahun berjalan. Perhitungan Beban Penyusutan menggunakan metode garis lurus berdasarkan perkiraan masa manfaat tanpa nilai residu dengan pendekatan bulanan.

Perhitungan Beban Penyusutan tahun 2020 dan 2019 masing-masingsebesar Rp287.641.217.862,73 dan Rp239.200.188.034,69sebagai berikut.

**Tabel 7.126 Beban Penyusutan**

| **Beban Penyusutan** | **Beban Penyusutan**  **TA 2020 (Rp)** | **Beban Penyusutan**  **TA 2019 (Rp)** |
| --- | --- | --- |
| Peralatan dan Mesin | 20.811.132.601,07 | 27.494.781.369,82 |
| Gedung dan Bangunan | 16.318.135.108,00 | 15.566.328.497,00 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 125.939.406.865,35 | 196.139.078.167,87 |
| **Jumlah** | **163.068.674.574,42** | **239.200.188.034,69** |

1. **Beban Amortisasi**

Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat amortisasi aset tak berwujud berupa *software* komputer, lisensi, franchise, hak cipta/patent, hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang yang dimiliki pemerintah daerah yang masih memiliki nilai buku dan menjadi beban di tahun berjalan.

Perhitungan Beban Amortisasi tahun 2020 dan 2019 masing-masingsebesar Rp474.692.939,63dan Rp234.486.000,00 sebagai berikut.

**Tabel 7.127Beban Amortisasi**

| **Beban Amortisasi** | **Realisasi 2020**  **(Rp)** | **Realisasi 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- |
| **Bappeda** |  |  |
| * RDTR Kec. Prabumulih Utara | 19.294.000,00 | 19.294.000,00 |
| * RDTR Kec. Prabumulih Barat | 19.294.000,00 | 19.294.000,00 |
| * Survei dan Pemetaan | 19.422.500,00 | 19.422.500,00 |
| * RDTR Kec. Cambai, Prabumulih Selatan | 40.414.000,00 | 40.414.000,00 |
| * Perencanaan Anak Sungai | 20.207.000,00 | 20.207.000,00 |
| * Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RDTR | 8.739.500,00 | 8.739.500,00 |
| * Perencanaan Pengembangan Perbatasan | 5.984.000,00 | 5.984.000,00 |
| * Kajian Potensi Unggulan Daerah Kota Prabumulih | 7.276.000,00 | 7.276.000,00 |
| * Rencana Detail Tata Ruang Kawasan | 18.205.000,00 | 18.205.000,00 |
| * Aplikasi Software e-monev RKPD | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| **Sekretariat Daerah** |  |  |
| * Aplikasi Software SIMPP | 48.650.000,00 | 48.650.000,00 |
| **BKPSDM** |  |  |
| * Aplikasi Software Absensi | 36.850.000,00 | 0,00 |
| **Dinas Perhubungan** |  |  |
| * - Aplikasi Software Balai KIR | 10.634.898,95 | 0,00 |
| * Aplikasi SIM PKB | 10.500.000,00 | 0,00 |
| **BPKAD** |  |  |
| * Aplikasi SIM PBB P2 | 29.386.777,50 | 0,00 |
| * Software Aplikasi Pelayanan | 4.125.000,00 | 0,00 |
| **Dinas Komunikasi dan Informatika** |  |  |
| * Software Komputer | 90.251.003,58 | 0,00 |
| **Jumlah** | **474.692.939,63** | **234.486.000,00** |

1. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang digunakan untuk mencatat beban cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Perhitungan Beban Penyisihan Piutang tahun 2020dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.678.889.199,35 dan Rp2.905.913.645,29dan sebagai berikut.

**Tabel 7.128 Beban Penyisihan Piutang**

| **Beban Penyisihan Piutang** | **Realisasi 2020**  **Rp** | **Realisasi 2019**  **Rp** |
| --- | --- | --- |
| **Piutang Pendapatan** |  |  |
| * Piutang Pajak Daerah | 2.579.093.676,61 | 2.525.579.064,19 |
| * Piutang Retribusi | 0,00 | 347.945.625,00 |
| * Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 99.795.522,74 | 30.518.587,66 |
| **Sub Jumlah** | **2.678.889.199,35** | **2.904.043.276,85** |
| **Piutang Lainnya - Piutang Pegawai** | **0,00** | 1.665.368,44 |
| **Jumlah** | **2.678.889.199,35** | **2.905.708.645,29** |

1. **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban pemerintah daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban di atas.

Perhitungan Beban Lain-lain pada Tahun 2019dan 2018 masing-masing sebesar Rp8.706.568.060,47 dan Rp6.961.460.985,60 sebagai berikut.

**Tabel 7.129Beban Lain-lain**

| **Beban Lain-lain** | **Realisasi 2020**  **Rp** | **Realisasi 2019**  **Rp** |
| --- | --- | --- |
| Beban Penurunan Nilai Investasi | 4.397.492.152,01 | 2.914.571.573,59 |
| Beban Penghapusan Aset Tetap | 14.559.696,46 | 283.260.845,75 |
| Beban Hibah Aset | 1.626.846.005,00 | 254.905.656,00 |
| Beban Lain-lainnya | 2.688.578.707,00 | 3.508.722.910,26 |
| **Jumlah** | **8.727.476.560,47** | **6.961.460.985,60** |

1. Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp4.397.492.152,01 merupakan penurunan nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih akibat selisih antara pengakuan proporsi rugi pada PDAM Tirta Prabujaya sebesar Rp5.142.452.385,51dan pengakuan laba PT Petro Prabu sebesar Rp744.960.233,50.
2. Beban penghapusan Aset Tetap sebesar Rp14.559.696,46 merupakan selisih anatar nilai perolehan Aset Tetap yang dihapuskan sebesar Rp647.322.142,54 dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dihapuskan sebesarRp632.762.446,08.
3. Beban Hibah Aset sebesar Rp1.626.846.005,00 terdiri dari hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp500.907.182,00; hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp930.000.000,00; hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp74.249.999,00 dan hibah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp121.688.842,00.
4. Beban Lain-lainnya sebesar Rp2.688.578.707,00merupakan pembebanan atas aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.437.173.131,00; Gedung dan Bangunan sebesar Rp172.922.829,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp78.482.747,00yang nilainya di bawah ketentuan nilai kapitalisasi dan dicatat secara ekstrakomptabel.
5. **Beban Transfer - Bantuan Keuangan ke Desa**

Beban Transfer bantuan keuangan ke Desa hanya terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kota Prabumulih (SK Walikota Nomor 51/KPTS/DPMD/2020 tanggal 8 Januari 2020) sebesar Rp7.513.880.000,00 dan tidak termasuk Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp21.868.335.000,00. Hal tersebut mengacu pada Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual bahwa kinerja pemanfaatan Dana Desa ada di desa dan bukan pada Pemerintah Kota Prabumulih.

Rincian realisasi beban transfer bantuan keuangan ke Desa TA 2020 sebesar Rp7.513.880.000,00 sebagai berikut.

**Tabel 7.130 Bantuan Keuangan ke Desa**

| **No.** | **Nama Desa** | **Kecamatan** | **ADD**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karang Bindu | Rambang Kapak Tengah | 601.574.000,00 |
| 2 | Talang Batu | Rambang Kapak Tengah | 598.523.000,00 |
| 3 | Rambang Senuling | Rambang Kapak Tengah | 566.719.000,00 |
| 4 | Jungai | Rambang Kapak Tengah | 565.128.000,00 |
| 5 | Sinar Rambang | Rambang Kapak Tengah | 568.011.000,00 |
| 6 | Karangan | Rambang Kapak Tengah | 594.290.000,00 |
| 7 | Karya Mulya | Rambang Kapak Tengah | 681.419.000,00 |
| 8 | Kemang Tanduk | Rambang Kapak Tengah | 625.621.000,00 |
| 9 | Tanjung Menang | Prabumulih Selatan | 661.009.000,00 |
| 10 | Tanjung Telang | Prabumulih Barat | 630.241.000,00 |
| 11 | Muara Sungai | Cambai | 679.833.000,00 |
| 12 | Pangkul | Cambai | 741.512.000,00 |
|  | **Jumlah** |  | **7.513.880.000,00** |

1. **Beban Transfer – Bantuan Keuangan ke Partai Politik**

Penetapan bantuan keuangan ke Partai Politik TA 2020 adalah berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih No. 71 Tahun 2019 yaitu untuk anggota dewan hasil Pemilu Legislatif tahun 2019 dan dilantik pada tanggal 27 September 2019.

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik TA 2020 sebesar Rp938.701.918,00 dengan rincian partai politik penerima bantuan keuanganadalah sebagai berikut.

**Tabel 7.131 Bantuan Keuangan ke Partai Politik**

| **No.** | **Partai Politik** | **LO (Rp)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Partai Demokrat | 69.725.964,00 |
| 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 123.496.912,00 |
| 3 | Partai Bulan Bintang | 78.939.168,00 |
| 4 | Partai Amanat Nasional | 76.031.648,00 |
| 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 90.469.302,00 |
| 6 | Partai Nasional Demokrasi | 58.495.668,00 |
| 7 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 98.764.820,00 |
| 8 | Partai Golongan Karya | 155.724.954,00 |
| 9 | Partai Keadilan Sejahtera | 92.640.856,00 |
| 10 | Partai Gerindra | 94.412.626,00 |
|  | **Jumlah** | **938.701.918,00** |

Tidak terdapat perbedaan antara nilai transfer bantuan keuangan ke Partai Politik pada LRA dengan nilai beban transfer bantuan keuangan ke Partai Politik pada LO.

1. **Surplus/(Defisit) Operasional**

Dari realisasi Pendapatan LO sebesar Rp973.481.319.021,58 dikurangi Beban Operasi sebesar Rp938.228.240.933,96dan Beban Transfer sebesar Rp8.452.581.918,00 maka dihasilkan Surplus Operasional untuk TA 2020 sebesar Rp26.800.496.169,62.

1. **Surplus/(Defisit) Non Operasional**

Tidak terdapat Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional pada TA 2020.

1. **Pos Luar Biasa**

Terdapat Beban Luar Biasa pada TA 2020 berupa Belanja Tak Terduga sebesar Rp46.743.845.500,00 yang digunakan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp45.689.495.500,00 terdiri dari belanja bidang kesehatan sebesar Rp11.940.510.500,00; penyediaan jaring pengaman sosial sebesar Rp33.063.310.000,00 dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp685.675.000,00, serta penanganan Non Covid-19 sebesar Rp1.054.350.000,00 yang digunakan untuk penanggulangan akibat dari bencana alamseperti seperti banjir, kebakaran, dan angin puting beliung.

1. **Surplus/(Defisit) LO**

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar Rp19.912.758.830,38.

1. **Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

1. **Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

1. Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari penerimaan:
2. Pendapatan Pajak Daerah;
3. Pendapatan Retribusi Daerah;
4. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
5. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
6. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak;
7. Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
8. Pendapatan Dana Alokasi Umum;
9. Pendapatan Dana Alokasi Khusus;
10. Pendapatan Dana Penyesuaian;
11. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi;
12. Bantuan Keuangan dari Provinsi;
13. Pendapatan Hibah.
14. Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari pengeluaran:
15. Belanja Pegawai;
16. Belanja Barang;
17. Belanja Hibah;
18. Belanja Bantuan Sosial;
19. Belanja Tak Terduga;
20. Transfer Bantuan Keuangan.
21. **Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi diperoleh dari pendapatan atas pelepasan/penjualan aset tetap dan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan arus keluar kas diperoleh dari pembelian aset tetap.

1. **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

1. **Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Pajak, Taspen, Taperum dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dalam penyajian kembali Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

1. **Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019 masing-masing surplus sebesarRp138.624.715.380,39 dan Rp356.049.347.995,25 merupakan jumlah kas bersih dari arus kas masuk operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi.

Rincian arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.132Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

|  | **Uraian** | **Tahun 2020**  **(Rp)** | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arus Kas Masuk** | |  |  |
|  | Pendapatan Pajak Derah | 28.487.061.805,00 | 30.189.400.658,00 |
|  | Pendapatan Retribusi Daerah | 2.802.140.946,50 | 3.738.661.449,00 |
|  | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.073.589.783,33 | 1.759.160.257,30 |
|  | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 51.674.262.851,88 | 65.288.342.593,27 |
|  | Bagi Hasil Pajak | 73.597.425.102,00 | 116.429.339.643,00 |
|  | Bagi Hasil Bukan Pajak | 123.484.470.497,00 | 191.564.405.242,00 |
|  | Dana Alokasi Umum | 399.247.165.000,00 | 440.240.422.000,00 |
|  | Dana Alokasi Khusus | 119.153.209.570,00 | 113.613.291.337,00 |
|  | Dana Penyesuaian | 48.548.591.000,00 | 41.591.875.000,00 |
|  | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 62.789.397.217,68 | 122.374.609.670,12 |
|  | Bantuan Keuangan dari Provinsi | 33.062.569.852,00 | 66.842.275.500,00 |
|  | Pendapatan Hibah | 27.322.490.000,00 | 26.844.297.739,00 |
|  | Jumlah Arus Kas Masuk | **972.242.373.625,39** | **1.220.476.081.088,69** |
| **Arus Kas Keluar** | |  |  |
|  | Belanja Pegawai | 386.056.021.569,00 | 391.334.909.403,00 |
|  | Belanja Barang dan Jasa | 341.042.004.087,00 | 395.461.753.356,44 |
|  | Belanja Hibah | 29.298.275.591,00 | 46.692.331.425,00 |
|  | Belanja Bantuan Sosial | 165.000.000,00 | 1.139.000.000,00 |
|  | Belanja Tidak Terduga | 46.713.255.000,00 | 212.037.000,00 |
|  | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Parpol | 30.320.916.918,00 | 29.586.701.909,00 |
|  | Jumlah Arus Kas Keluar | **833.595.473.165,00** | **864.426.733.093,44** |
|  | **Arus Kas Bersih dari**  **Aktivitas Operasi** | **138.646.900.460,39** | **356.049.347.995,25** |

1. **Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 dan 2019 masing-masing defisit sebesar Rp220.756.462.110,66 dan Rp316.422.302.708,00 merupakan jumlah kas bersih dari arus kas masuk investasi dikurangi dengan arus kas keluar investasi.

Rincian arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.133Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

|  | **Uraian** | **Tahun 2020**  **(Rp)** | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arus Kas Masuk** | |  |  |
|  | Jumlah Arus Kas Masuk | **0,00** | **0,00** |
| **Arus Kas Keluar** | |  |  |
|  | Belanja Modal Tanah | 922.500.000,00 | 12.298.968.500,00 |
|  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 29.748.022.380,00 | 42.997.941.318,00 |
|  | Belanja Modal Bangunan dan Gedung | 32.883.633.009,00 | 52.419.507.854,00 |
|  | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 153.927.062.066,66 | 201.516.008.439,00 |
|  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.275.244.655,00 | 2.482.876.597,00 |
|  | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0,00 | 4.707.000.000,00 |
|  | Jumlah Arus Kas Keluar | **220.756.462.110,66** | **316.422.302.708,00** |
|  | **Arus Kas Bersih dari**  **Aktivitas Investasi** | **(220.756.462.110,66)** | **(316.422.302.708,00)** |

1. **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Tidak terdapat Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2020 dan 2019 yang merupakan jumlah kas bersih dari arus kas masuk pendanaan dikurangi dengan arus kas keluar pendanaan.

Rincian arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.134Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

|  | **Uraian** | **Tahun 2020**  **(Rp)** | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arus Kas Masuk** | |  |  |
|  | Penerimaan Piutang Daerah | 0,00 | 0,00 |
|  | Jumlah Arus Kas Masuk | **0,00** | **0,00** |
| **Arus Kas Keluar** | |  |  |
|  | Pembayaran Pokok Utang | 0,00 | 0,00 |
|  | Jumlah Arus Kas Keluar | **0,00** | **0,00** |
|  | **Arus Kas Bersih dari**  **Aktivitas Pendanaan** | **0,00** | **0,00** |

1. **Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar deficit Rp42.159,00 dan Rp0,00 merupakan jumlah kas bersih arus kas masuk transitoris dikurangi arus kas keluar transitoris.

Rincian arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.

**Tabel 7.135Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

|  | **Uraian** | **Tahun 2020**  **(Rp)** | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arus Kas Masuk** | |  |  |
|  | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 53.473.244.889,00 | 68.863.745.323,00 |
|  | Jumlah Arus Kas Masuk | **53.473.244.889,00** | **68.863.745.323,00** |
| **Arus Kas Keluar** | |  |  |
|  | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 53.473.287.048,00 | 68.863.745.323,00 |
|  | Jumlah Arus Kas Keluar | **53.473.287.048,00** | **68.863.745.323,00** |
|  | **Arus Kas Bersih dari**  **Aktivitas Transitoris** | **(42.159,00)** | **0,00** |

1. **Saldo Akhir Kas**

Saldo akhir Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp89.757.216.580,36dan Rp171.866.820.389,63.

Saldo akhir kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp89.757.216.580,36berasal dari saldo Kas akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp171.866.820.389.63 dikurangi dengan defisit anggaran atau penurunan bersih kas selama tahun berjalan sebesarRp82.109.603.809,27

**Tabel 7.136 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020 dan 2019**

|  | **Uraian** | **Tahun 2020**  **(Rp)** | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Kenaikan /(Penurunan) Bersih Kas  Selama Periode | | (82.109.603.809,27) | 39.627.045.287,25 |
| Saldo Awal Kas | | 171.866.820.389,63 | 132.239.775.102,38 |
| **Saldo Akhir Kas** | | 89.757.216.580,36 | **171.866.820.389.63** |
| **Kas di Neraca** | |  |  |
|  | Kas di Kas Daerah | 87.507.331.198,97 | 168.816.826.752,24 |
|  | Kas di Bendahara Penerimaan | 10.053.730,00 | 1.342.500,00 |
|  | Kas di Bendahara Pengeluaran | 40.313,00 |  |
|  | Kas di BLUD | 746.174.790,83 | 2.060.684.828,83 |
|  | Kas di Bendahara FKTP | 368.261.727,56 | 367.842.136,56 |
|  | Kas di Bendahara BOS | 1.125.354.820,00 | 620.124.172,00 |
|  | Setara Kas - Deposito | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Akhir Kas** | | **89.757.216.580,36** | **171.866.820.389,63** |

Terdapat selisih kurang di rekening Kas Daerah (BUD) sebesar Rp42.159,00 antara SiLPA TA 2020 sebesar Rp89.757.258.739,36 dengan saldo akhir Kas per 31 Desember 2020 sebesarRp89.757.216.580,36yang merupakan Piutang PFKpegawai atas kekurangan potongan iuran IWP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bagian Oktober TA 2020.

1. **Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo akhir ekuitas pada LPE berasal dari saldo awal ekuitas ditambah/dikurangi oleh surplus/defisit pada Laporan Operasional periode bersangkutan dan perubahan lainnya berupa dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/koreksi kesalahan, sebagai berikut.

**Tabel 7.137Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019**

|  | **Uraian** | **Tahun 2020**  **(Rp)** | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ekuitas Awal** | | **2.480.243.940.512,61** | **2.424.268.958.471,70** |
| **Surplus/Defisit LO** | | **(151.739.434.122,48)** | **51.890.247.218,91** |
| **Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan Akuntansi/Koreksi Kesalahan** | |  |  |
|  | Koreksi Selisih Revaluasi Penilaian Kembali Aset Tetap | 0,00 | 2.651.389.550,00 |
|  | Koreksi Nilai Beban Amortisasi Tahun Sebelumnya | (58.646.909,93) | 0,00 |
|  | Koreksi Investasi Permanen - Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Prabujaya | (588.928.703,75) | 56.507.077,00 |
|  | Koreksi Investasi Permanen - Penyertaan Modal pada PD Petro Prabu | 350.700.000,00 | 0,00 |
|  | Koreksi Nilai Utang Beban Jasa Listrik, Air dan Telepon | (4.717.228,00) | 0,00 |
|  | Koreksi Nilai Utang Beban BLUD | 1.140.548.676,00 | 0,00 |
|  | Koreksi Nilai Utang Pengadaan Aset Tetap | 15.455.352,00 | 0,00 |
|  | Koreksi Nilai Piutang Pendapatan BLUD | (596.253.178,00) | 0,00 |
|  | Koreksi Nilai Piutang Pendapatan Retribusi | (27.500.000,00) | 0,00 |
|  | Koreksi Nilai Piutang Pendapatan | 0,00 | 1.543.367.441,14 |
|  | Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya | (352.204.201,39) | 22.025.753,86 |
|  | Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 155.313.792.954,09 | (170.630.000,00) |
|  | Koreksi Ekuitas Lainnya | (6.254.903.501,03) | (17.925.000,00) |
|  | **Jumlah** | **148.937.343.259,99** | **4.084.734.822,00** |
| **Ekuitas Akhir** | | **2.609.268.524.942,22** | **2.480.243.940.512,61** |

1. **Ekuitas Awal**

Saldo awal ekuitas tahun 2020 sebesar Rp2.480.243.940.512,61 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2019.

1. **Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)**

Defisit Laporan Operasional (LO) sebesar Rp151.739.434.122,48 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual)dan beban luar biasa yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2020.

1. **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar**

Selisihnya sebesar minus Rp209.388.249,32 dapat dijelaskan sebagai dampak kumulatif karena perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan dengan rincian sebagai berikut.

1. Koreksi Nilai Beban Amortisasi atas Aset Tidak Berwujudreklasifikasi dari aset tetap Tahun 2019 sebesar Rp58.646.909,93.
2. koreksi nilai penyertaan modal pada PDAM TirtaPrabujaya karena kekurangan perhitungan proporsi rugi tahun 2019 berdasarkan laporan keuangan audited tahun 2019 sebesar Rp588.928.703,75.
3. koreksi nilai penyertaan modal pada PD Petro Prabu karena kekurangan perhitungan proporsi laba tahun 2019 berdasarkan laporan keuangan tahun 2019 sebesar Rp350.700.000,00.
4. Koreksi Nilai Utang Beban atas kurang catat nilai Utang Beban Jasa Listrik, Air dan Telepon tahun 2019 sebesar Rp4.717.228,00.
5. Koreksi Nilai Utang Beban atas kurang catat nilai Utang Beban BLUD Tahun 2019 sebesar Rp1.140.548.676,00.
6. Koreksi Nilai Utang Pengadaan Aset Tetap atas temuan kurang volume Dinas PUPR Tahun 2019.sebesar Rp15.455.352,00
7. Koreksi Nilai Piutang Pendapatan atas lebih catat nilai piutang pendapatan BLUD Tahun 2019 sebesar Rp596.253.178,00.
8. Koreksi Nilai Piutang Pendapatan atas lebih catat nilai piutang Retribusi Tahun 2017 sebesar Rp27.500.000,00.
9. Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya merupakan koreksi tambah atas saldo awal temuan audit berupakurang volumetahun 2018 yang dicatat sebagaiAset Lain- lain sebesar Rp440.046.257,64 dan Koreksi kurang atas Aset Tetap SMA, SMK dan SLB yang belum diserahkan ke Pemerintah Prov. Sumatera Selatan dan masih tercatat sebagai Aset Tetap di Neraca Per 31 Desember 2020 sebesar Rp87.842.056,25
10. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp155.313.792.954,09 merupakan koreksi atas Beban Penyusutan Tahun sebelumnya karena adanya koreksi umur ekonomis/manfaat Aset Tetap.
11. Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar minus Rp6.254.903.501,03 merupakan koreksi atas aset ekstrakompatabel yang masih tercatat di neraca per 31 Desember 2020.
12. **Ekuitas Akhir**

Ekuitas akhir Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2020 adalah sebesar Rp2.609.268.524.942,22.

1. **Penjelasan atas Dana Non APBD Kota Prabumulih**

Pemerintah Kota Prabumulih selain melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan penunjang juga melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2020 didalamnya belum termasuk Laporan Keuangan yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Prabumulih, karena merupakan dana APBN sehingga pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawabannya dilakukan secara tersendiri melalui mekanisme APBN.

Rincian dana-dana Non APBD yang diterima Pemerintah Kota Prabumulih pada TA 2020 adalah sebagaiberikut.

1. **Dana Dekonsentrasi**

DIPA Dana Dekonsentrasi terdapat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan danPemerintah Kota Prabumulih hanya sebagai pelaksana atau tim dan lokasi target sasaran. Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.138Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi2020 dan 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **SKPD** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran**  **(Rp)** | **Realisasi**  **(Rp)** | **%** | **Realisasi**  **(Rp)** |
| 1 | Dinas Tenaga Kerja | 464.264.000,00 | 434.978.283,00 | 93,69 | 1.644.293.797,00 |
| 2 | Dinas Ketahanan Pangan | 310.595.000,00 | 301.231.250,00 | 96,99 | 437.699.150,00 |
| 3 | Dinas Pertanian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.125.000,00 |
|  | Jumlah | **774.859.000,00** | **720.609.533,00** | **95,01** | **2.125.117.947,00** |

Pada Tahun 2020Dana Dekonsentrasi pada Pemerintah Kota Prabumulih dengan target anggaran sebesar Rp774.859.000,00 dan terealisasi sebesar Rp720.609.553,00 atau mencapai 95,01% terdapat pada 2 OPD sebagai berikut.

1. Dinas Tenaga Kerja

Target anggaran sebesar Rp464.264.000,00 terealisasi sebesar Rp434.978.283,00atau mencapai 93,69% digunakan untuk membiayai Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas/Pelatihan Berbasis Kompetensi,

1. Dinas Ketahanan Pangan

Target anggaran sebesar Rp310.595.000,00 terealisasi sebesar Rp301.231.250,00atau mencapai 96,99% digunakan untuk membiayai Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

1. **Dana Tugas Pembantuan**

Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan Pemerintah Kota Prabumulih dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel7.139Anggaran dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan 2020 dan 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **SKPD** | **Tahun 2020** | | | **Tahun 2019** |
| **Anggaran**  **(Rp)** | **Realisasi**  **(Rp)** | **%** | **Realisasi**  **(Rp)** |
| 1 | Dinas Pertanian | 454.950.000,00 | 445.889.000,00 | 98,01 | 784.037.500,00 |
|  | **Jumlah** | **454.950.000,00** | **430.689.000,00** | **98,01** | **784.037.500,00** |

Pada Tahun 2020 Dana Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kota Prabumulih dengan target anggaran sebesar Rp454.950.000,00terealisasi sebesar Rp445.889.000,00atau mencapai 98,01% hanya terdapat pada OPD Dinas Pertanian digunakan untuk membiayai program:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, terealisasi sebesar Rp318.789.000,00atau 97,24% dari anggarannya sebesar Rp327.850.000,00.
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, terealisasi sebesar Rp127.100.000 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp127.100.000.
3. **Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**
4. **Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih merupakan Kota hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, secara administratif terbagi ke dalam 6 Kecamatan. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Prabumulih merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pemerintah Kota Prabumulih merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, secara administratif terbagi ke dalam 6 kecamatan dan 25 kelurahan serta 12 desa.

Secara geografis Kota Prabumulih memiliki luas wilayah 434,46 km2, yang terletak pada posisi antara 3020’09.1” sampai 3034’24.7” Lintang Selatan (LS) dan 104007’50.4” sampai 104019’41.6” Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Tanah AbangKabupaten PALI;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambang dan Kecamatan LubaiKabupaten Muara Enim;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.
5. **Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya**

Pemerintah Kota Prabumulih merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kota Prabumulih juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui program kegiatan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

1. **Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan operasional bagi Pemerintah Kota Prabumulih adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih serta peraturan perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kota Prabumulih.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanandasar, 15 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 urusan pemerintahan pilihan, dan 6 urusan pemerintahan fungsi penunjang.

1. **Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan**

Sebagai tindak lanjut dari reorganisasi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, telah dilaksanakan pelantikan ulang pada seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih pada awal tahun 2017.

Pada tanggal 27 Juni 2018, Kota Prabumulih telah mengadakan Pilkada serentak pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk masa jabatan tahun 2019 s.d. 2023. Pada tanggal 17 September 2018 telah dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah Bapak Ir. H. Ridho Yahya, MM dan Bapak H. Andriansyah Fikri, SH.

Kemudian selama tahun 2020, dalam rangka meningkatkan kinerja di lingkungan PNS Pemerintah Kota Prabumulih dan untuk mengisi kekosongan jabatan telah dilaksanakan beberapa kali mutasi dan pergantian pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih terutama pada OPD yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumuli yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD, serta 2 Bagian yang baru dibentuk pada Sekretariat Daerah yaitu Bagian Sumber Daya Alam dan Bagian Kerjasama Daerah.

1. **Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih serta Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kota Prabumulih, jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih di TA 2012 adalah sebanyak 35 entitas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih terdapat penambahan 1 SKPD yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sebagai pengembangan dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam pelaksanaan APBD TA 2014 adalah sebanyak 36 entitas SOTK.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih, terdapat penambahan dan pemekaran SKPD serta peningkatan eselon SKPD dari kantor menjadi dinas/badan serta peningkatan kelurahan menjadi SKPD, sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 58 entitas SOTK yang mulai berlaku pada TA 2015.

Pada tahun 2016 terdapat reorganisasi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga jumlah OPDdi lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 35entitas SOTK yang mulai berlaku pada TA 2018.

Pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, terdapat pembentukan 2 OPD baru yaitu pemecahan Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); serta pemecahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),sehingga jumlah OPDdi lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 37 entitas SOTK terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Daerah (20 Dinas);
5. Badan Daerah (8 Badan); dan
6. Kecamatan (6 Kecamatan).

Selain OPD tersebut di atas juga ditambah UPT Dinas Kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih yang bersifat otonom dan telah menerapkan PPK BLUD, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

1. **Penutup**

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai Tahun Anggaran 2015. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, LKPD yang disusun Pemerintah Kota Prabumulih terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Prabumulih selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Prabumulih.

Pemerintah Kota Prabumulih telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Prabumulih dimasa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

WALIKOTA PRABUMULIH,

**H. RIDHO YAHYA**